

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS ELETRONIK DI
KABUPATEN ENREKANG DALAM MENCAPAI KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik

Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Oleh

ARDIANSYAH

4363 101 18 001



PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTARASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2022

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS ELETRONIK DI
KABUPATEN ENREKANGDALAM MENCAPAI PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Di susun dan diajukan oleh :

ARDIANSYAH

4363 101 18 001

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Untuk Diseminarkan

Rappang , 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Jamaluddin Ahmad, S.Sos.,M.Si.
NIDN . 0907057001

Dr.Andi Nilwana,S.E.,M.Si.
NIDN . 0901096401

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr.Andi Nilwana,S.E.,M.Si.
NIDN.0901096401

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : ARDIANSYAH

NPM : 4363 101 18 001

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini merupakan hasil Penelitian dan benar merupakan hasil karya saya, bukan mengabil alihan tulisan atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Rappang, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan

ARDIANSYAH

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas segala karunia-Nya, sehinggah tesis ini berhasil diselesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Tesis yang disusun ini, berjudul “Penerapan Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang Dalam Mencapai Pemerintahan yang Baik”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sindenreng Rappang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kualitas pelayanannya .

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda H.Drs.Amir Saleh,MM dan Dra.Dinar Masba yang tidak lelah mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap aktivitas akademiknya,serta doa restu yang selalu mengiringi penulis;
2. Teristimewa kepada istri tercinta Dita Sasmita yang selalu memberikan dukungan moril, memberikan semangat dan kepada penulis, sehinggah bisa menyelesaikan jenjang pendidikan pasca sarjana ini;
3. Saudara – Saudari penulis yang selalu memberikan motivasi serta doanya;

4. Bapak Dr.H.Jamaluddin Ahmad,S.Sos.,M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr.Andi Nilwana,S.E.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan arahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis selama menyusun tesis ;
5. Ibu Dr.Muliani S.,S.I.P,M.Si., Ibu Dr.Nurjannah Nonci,M.Si., Serta Bapak Dr.Andi Sirang,M.Si selaku dosen penguji dan narasumber yang telah memberi banyak masukan dalam tesis ini;
6. Aparatur Pemerintah Kabupaten Enrekang atas izinnya yang memperbolehkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang.
7. Bapak – bapak dan ibu-ibu Aparatur Sipil Negeri yang telah meluangkan waktunya menjadi informan dan responden dalam penelitian ini;

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari ALLAH SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, AMIN.

Wassalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Rappang, Oktober 2022

ARDIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Konsep dan Teori	16
1. Konsep Administrasi Publik.....	16
a. Istilah Administrasi.....	16
b. Pengertian Administrasi Publik.....	17
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	18

a. Istilah Kebijakan.....	18
b. Kebijakan Publik.....	19
c. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
3. Konsep <i>E – Government</i>	23
4. Konsep <i>Good Governace</i>	72
a. <i>Governace</i>	72
b. <i>Good Governace</i>	78
6. Perencanaan.....	95
7. Sistem Informasi <i>e-planning</i>	96
a. Sistem Informasi	96
b. <i>e – planning</i>	101
BAB III METODE PENELITIAN	117
A. Lokasi Penelitian	117
B. Pendekatan Metode Penelitian	117
C. Jenis Sumber Data	118
D. Teknik Pengumpulan Data	119
E. Teknik Analisis Data	121
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	123
A. Hasil Penelitian.....	123
B. Pembahasan.....	238
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	298
A. Kesimpulan.....	298

B. Saran.....	300
DAFTAR PUSTAKA	301
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Usulan pada Musrembang 2021.....	10
2.1 Pengaruh <i>e-government</i> terhadap <i>good governace</i>	104
2.2 Penelitian Terdahulu.....	105
2.3 Operasional Konsep.....	115
3.1 Daftar Informan.....	121
4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Enrekang....	124
4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang.....	125
4.3 Nama Perangkat Daerah.....	126
4.4 Persentase Wawancara Pada dimensi Manfaat.....	163
4.5 Persentase Wawancara Pada Dimensi Efisiensi.....	185
4.6 Persentase Wawancara Pada Dimensi Partisipasi.....	200
4.7 Persentase Wawancara Pada Dimensi Transparansi.....	214
4.8 Persentase Wawancara Pada Dimensi Manajemen Perubahan.	230
4.9 Persentase Wawancara Lima Dimensi IT BSC Pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik Di Kabupaten Enrekang... ..	234
4.10 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Transparansi.....	245
4.11 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Akuntabilitas.....	253
4.12 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Efisiensi.....	262
4.13 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Resposivitas.....	270
4.14 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Responsivitas.....	272
4.15 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Partisipasi.....	275

4.16 Persentase Wawancara Lima Dimensi GoodGovernance.....	289
--	-----

DAFTAR GAMBAR

1.1 Tampilan <i>e – Planning</i>	12
1.2 Tampilan <i>e – Budgeting</i>	12
1.3 Tampilan <i>e – Monev</i>	13
2.1 Pola Hubungan Budaya Birokrasi Dengan E-Goverment ...	60
2.2 Hubungan Komponen Moral dengan Ketiga Komponen UNDP.....	78
2.3 Keseimbangan Tiga Komponen dari UNDP.....	83
2.4 Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi.....	97
2.5 Komponen-Komponen Sistem Informasi.....	100
2.6 Kerangka Pikir.....	111
4.1 Alur Kinerja <i>e-planning</i> dalam Perumusan Perencanaan Di Kabupaten Enrekang.....	138
4.2 Form Input Visi RPJPD.....	139
4.3 Form Input Misi RPJMD.....	139
4.4 Form Input Tujuan RPJMD.....	140
4.5 Form Input Sasaran RPJMD.....	140
4.6 Form Input Strategi.....	140
4.7 Form Input Arah Kebijakan.....	141
4.8 Form Input Program RPJMD.....	141
4.9 Laporan RPJMD.....	141
4.10 Form Usulan Musrembang.....	142
4.11 Form Input Forum SKPD.....	142

4.12	Form Input Pokok Pikiran Dewan.....	143
4.13	Form Input Musrembang Kabupaten.....	143
4.14	Form Input Sumber Dana.....	143
4.15	Form Input RKPD.....	144
4.16	Form Input PPAS-RKA.....	144
4.17	Alur Kinerja Aplikasi <i>e-budgeting</i>	148
4.18	Form Penyusunan RKA-PD.....	149
4.19	Form Penyusunan APBD	149
4.20	Form Penyusunan DPA-PD.....	150
4.21	Alur Kinerja Aplikasi <i>e-monev</i>	155
4.22	Form Input Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	156
4.23	Form Input Realisasi Kegiatan.....	156
4.24	Form Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun ...	157
4.25	Pelaksanaan Musrembang melalui Zoom.....	160
4.26	Hasil Word Cloud Dimensi Manfaat.....	164
4.27	Hasil Matrix Coding Pada Dimensi Manfaat.....	165
4.28	Hasil Cluster Analisis Pada Dimensi Manfaat.....	166
4.29	Hasil Word cloud Dimensi Efisiensi.....	186
4.30	Hasil Matrix Coding Pada Dimensi Efisiensi.....	187
4.31	Hasil Cluster Analisis Pada Dimensi Efisiensi.....	188
4.32	Pelaksanaan Musrembang.....	192
4.33	Rapat Monitoring dan Evaluasi.....	198
4.34	Hasil Word Cloud Dimensi Partisipasi.....	201

4.35 Hasil Matrix Coding Dimensi Partisipasi.....	202
4.35 Hasil Cluster Analisi Dimensi Partisipasi.....	203
4.36 Tampilan Laporan Usulan Musrembang.....	206
4.37 Tampilan Laporan Pokok Pikiran Dewan.....	207
4.38 Form Tampilan Usulan.....	208
4.39 Tampilan Publikasi APBD.....	210
4.40 Tampilan Publikasi Realisasi Anggaran.....	211
4.41 Tampilan Publikasi Realisasi Anggaran.....	213
4.42 Hasil Word Cloud Dimensi Transparansi.....	214
4.27 Hasil Matrix Coding Pada Dimensi Transparansi.....	215
4.28 Hasil Cluster Analisis Pada Dimensi Transparansi.....	216
4.29 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Manajemen Perubahan.....	231
4.30 Hasil Matrix Coding Pada Dimensi Manajemen Perubahan.....	232
4.31 Hasil Cluster Analisis Pada Dimensi Manajemen Perubahan.....	233
4.32 Hasil Word Cloud Terhadap Lima Dimensi Balanced E-Government Scorecard.....	235
4.33 Hasil Matrix Coding Pada Lima Dimensi Balanced E- Government Scorecard.....	236
4.34 Hasil Cluster Analisis Pada Lima Dimensi Balanced E-Government Scorecard.....	237
4.35 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Transparansi.....	247
4.36 Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Trasnparansi.....	248
4.37 Percentage Coverage Pada Dimensi Transparansi.....	248

4.38 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Akuntabilitas.....	255
4.39 Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Transparansi.....	256
4.40 Percentage Coverage Pada Dimensi Transparansi.....	256
4.41 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Efisiensi.....	263
4.42 Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Efisiensi.....	264
4.43 Percentage Coverage Pada Dimensi Efisiensi.....	265
4.44 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Responsivitas.....	271
4.45 Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Responsivitas.....	272
4.46 Percentage Coverage Pada Dimensi Responsivitas.....	273
4.47 Hasil Word Cloud Pada Dimensi Transparansi.....	276
4.48 Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Partisipasi.....	277
4.49 Percentage Coverage Pada Dimensi Partisipasi.....	278
4.50 Hasil Word Cloud Pada Lima Dimensi Good Governace.....	290
4.51 Tampilan Explore Diagram Pada Lima Good Governace	291
4.52 Percentage Coverage Pada Lima Dimensi Good Governace.....	292
4.53 Hasil Cluster Analisis Pada Lima Dimensi Good Governace.....	293

ABSTRAK

ARDIANSYAH.2022.Penerapan Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang dalam Mencapai Kepemerintahan yang Baik di bimbing oleh (Jamaluddin Ahmad dan Andi Nilwana).

Implementasi Perencanaan berbasis Eletronik diterapkan dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dalam mencapai pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara , observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolah dan analisis data menggunakan aplikasi *software* Nvivo 12 Plus.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang sudah berdampak baik namun masih terdapat masalah yang penulis temui yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat yang membutuhkan pengembangan sistem sehinggah dapat di akses oleh Masyarakat, dengan kewenangan akses dapat memonitoring usulan yang di input oleh User/Operator Kelurahan, Kecamatan tersebut hingga proses verifikasi yang dilakukan oleh User/Operator OPD dan dapat disempurnakan Sehingga dapat terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah lainnya seperti E-SIRUP, LPSE, SIM-Anggaran, dsb untuk menciptakan

sinkronisasi hasil usulan program dan kegiatan dengan RPJMD, RENSTRA, OPD dan RENJA.

Kata Kunci : Implementasi Perencanaan, Pemerintahan yang Baik, Berbasis Eletronik

ABSTRACT

ARDIANSYAH. 2022. Implementation of e-planning in Enrekang Regency in Achieving Good Governance guided by (Jamaluddin Ahmad and Andi Nilwana).

Implementation of E-Planning is implemented in order to achieve good governance in the Government of Enrekang Regency. This study aims to analyze the effect of implementing electronic-based planning in Enrekang Regency in achieving good governance in the Government of Enrekang Regency.

This research uses a qualitative research approach with a descriptive research type. Research informants were determined by purposive sampling method. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. Data management and analysis techniques use the Nvivo 12 Plus software application.

The results of the research that has been done can be concluded that the impact of implementing electronic-based planning in Enrekang Regency has had a good impact, but there are still problems that the authors encountered, namely the lack of community participation that requires system development so that it can be accessed by the community, with access authority can monitor the proposals made input by the User/Operator of the Kelurahan, Kecamatan until the verification process is carried out by the User/Operator of the OPD and can be refined so that it can be integrated with other regional development systems such as E-SIRUP,

LPSE, SIM-Budget, etc. to create synchronization of the results of proposed programs and activities with RPJMD, RENSTRA, OPD and RENJA.

Keywords: Planning Implementation, Good Governance, Electronic
Based

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan *Electronic Government* atau lebih dikenal dengan *e-government*. *E-government* lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa *e-government* mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh *e-government* tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik.

Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan

untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah berusaha dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis.

Sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik saat ini, memberikan makna mengenai penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang berkeadilan. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah mampu memenuhi dua tuntutan masyarakat yang berkaitan erat yaitu masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya serta masyarakat yang menginginkan agar aspirasi mereka didengar. Kedua tuntutan itu sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *electronic government* (*e-government*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik

secara efektif dan efisien. Salah satu bagian dari penerapan *e-government* dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang biasa dikenal dengan istilah perencanaan elektronik atau *e-planning* yang merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk mengimplementasikan wujud dari penguatan *good governance* di Kabupaten Enrekang. *E-Planning* digunakan sebagai media untuk meningkatkan perencanaan daerah terpadu dalam pembangunan terintegrasi di Kabupaten Enrekang untuk wujudkan *good governance*.

Proses perencanaan pembangunan juga dituntut sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*). maka Pada tataran teknis perencanaan pembangunan ditingkat daerah secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah..Pada pasal 5 menyebutkan rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pada pasal 16 menyebutkan rencana pembangunan disusun dengan tahapan:(1)Persiapan penyusunan;(2)Penyusunan rancangan awal;(3)penyusunan rancangan;(4)Pelaksanaan Musrembang;(5)Perumusan Rancangan Akhir;dan (6)Penetapan serta pada pasal 14 ayat (3) tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Pemerintah Kabupaten Enrekang salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan *e-government* di dalam menjalankann urusan pemerintahannya guna mewujudkan prinsip-prinsip *good governace*. Hal ini sejalan dengan misi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang yaitu penguatan *good governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang maju, aman dan sejahtera terdapat dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2008 -2028.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal itu pun sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kab Enrekang, di mana dengan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Enrekang berupaya untuk melakukan berbagai upaya pembenahan atau reformasi untuk menciptakan suatu *good governance*. Salah satu yang diharapkan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan aplikasi *e-planning* sebagai konsep *e-government*.

Diterapkannya *e-planning* ini ditujukan sebagai solusi mewujudkan *good governance* dengan manfaat antara lain untuk meningkatkan transparansi prosesperencanaan, meningkatkan efektivitas & efisiensi dalam hal biaya, waktu

dan pengendalian terhadap hasil, mendukung tercapainya kompetisi yang lebih berkualitas dan sehat, meningkatkan proses monitoring dan pelaporan, peningkatan kapasitas institusi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, penyederhanaan proses/*workflow* dan pengurangan *paperwork*, dan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam penyelenggaraan *e-planning*.

Dalam setiap organisasi diperlukan adanya publik untuk mengetahui sejauhmana organisasi itu berkembang. Sebagai lembaga pemerintah, instansi-instansi pemerintah memerlukan dukungan masyarakat untuk mendukung kebijaksanaan yang dibuat, selain itu dukungan itu diperlukan untuk menyukseskan program pemerintah karena tanpa dukungan maka penilaian orang tentang tindakan pemerintah dapat merugikan pemerintah (Sutanta,2003). Implementasi aplikasi *e - planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan transparansi atau keterbukaan di semua tingkatan struktur birokrasi pemerintah sehingga semua pihak dapat dengan jelas mengetahui apa yang sedang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-government*, pengembangan aplikasi *e - planning* sebagai aplikasi pengelola perencanaan daerah merupakan tahap pertama dalam pengembangan *e-government* dan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan layanan informasi publik. Sehingga jelas bahwa posisi aplikasi *e - planning* bagi

pemerintah daerah sebagai salah satu sarana strategis dalam menjalankan aktivitas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah Daerah dalam tugas penyelenggarannya mampu memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya lewat pembangunan daerah maka perencanaannya harus dilakukan secara baik serta meminimalisirkan faktor-faktor penghambat pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Enrekang yang berikan kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah Pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA menjadi unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah yang juga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati. Dalam menjalankan tugas dan fungsi agar lebih efektif dan efisien dalam penyusunan dokumen perencanaan BAPPEDA telah menggunakan aplikasi *e-planning*. Penggunaan aplikasi *e-planning* telah sejalan dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 14 yang menyatakan bahwa proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kab Enrekang harus berbasis *e-planning*. Dengan terimplementasinya *e-planning* maka seluruh program kerja yang dilakukan dapat terintegrasi, dioptimalkan dan kemungkinan tidak selarasnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah dapat diatasi..

Dengan diterapkannya *e-planning* menunjukkan kesungguhan BAPPEDA Kab Enrekang dalam upaya melakukan perbaikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah Kab Enrekang dalam rangka mewujudkan penerapan *good*

governance di lingkungan BAPPEDA Kab Enrekang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah. BAPPEDA merupakan unsur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Beratnya tugas, pokok, dan fungsi yang diemban BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas. Penerapan *e-planning* di lingkungan BAPPEDA merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang merupakan refleksi dari perwujudan *good governance* serta merupakan salah satu pembaharuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) dalam hal perencanaan (*e-planning*).

Sebelum Tahun 2017, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang belum menggunakan sistem informasi atau masih bersifat manual, sehingga dalam proses penyusunan dokumen perencanaan menjadi tidak efektif dan efisien (memakan tenaga dan waktu), sering terjadi ketidakselarasan antar dokumen perencanaan (belum terintegrasi), tidak transparan dan lebih subjektif. Mulai Tahun 2017, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang merespon penggunaan sistem informasi yang diamanatkan oleh pemerintah

dengan nama *e-planning*. *e-planning* merupakan sistem yang dibentuk dengan kerja sama dengan BPKP dan dikelola sendiri Bappeda Kabupaten Enrekang.mengembangkan sistem informasi pada proses perencanaan, yaitu Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Perencanaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan penggunaan SIMDA Perencanaan selain bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran juga berfungsi membantu pemerintah daerah untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif kepada publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tersebut yang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang desa serta menyepakati rencana kegiatan masing-masing desa di kecamatan yang bersangkutan. Hasil dari musrenbang kecamatan berupa rencana pembangunan kecamatan yang kemudian hasil tersebut langsung diinput kedalam aplikasi *e-planning*.

Data yang di input kedalam aplikasi *e-planning* merupakan data perencanaan pembangunan daerah kabupaten Enrekang. Perencanaan ini dimulai dari tingkat desa berupa musrenbang desa yang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta bekerjasama dengan masyarakat desa, kemudian hasil usulan dari perencanaan pembangunan yang di sepakati pada tingkat desa ini berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan dan menyusun rencana 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa. Kemudian hasil Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diusulkan lagi pada Musrenbang Kecamatan.. Untuk saat ini desa belum bisa mengakses aplikasi *e-planning* sehingga untuk menginput hasil rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh kecamatan.

Pada tahap Musrenbang kabupaten, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang. Pada tahap ini OPD akan melakukan Verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD. Program/usulan yang disetujui akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Kemudian hasil dari Renja-OPD ini diinput oleh masing-masing operator OPD kedalam aplikasi *e-planning*. berdasarkan hasil penginputan usulan hasil Musrenbang reguler, Anak, Gender, Kemiskinan dan Pokir ke dalam aplikasi *e-planning* pasca forum lintas perangkat daerah jumlah keseluruhan usulan sebanyak 11.919, jika diklasifikasi jumlah usulan per OPD sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Usulan pada Musrebang 2021

No	Nama OPD	Jumlah Usulan
1	Diknas	1.350
2	Dinkes	830
3	DPU	1.674
4	Perkim TR	1.550
5	Dinsos	672
6	Satpol PP dan Damkar	4
7	DPPPA	324
8	DLH	215
9	Disdukcapil	1
10	DPMD	387
11	Dispenduk KB	222
12	Dishub	109
13	Diskominfo	120
14	DKUKM Nakertrans	329
15	DPMPTSP	9
16	Dispopar	408
17	Dispustaka	32
18	Distan	2.586
19	Disnakin	895
20	Disperindag	174
21	BPBD	28
	JUMLAH	11.919

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Jika dibandingkan laporan pada saat pelaksanaan forum lintas perangkat daerah jumlah usulan yang ada dalam *e-planning* sebanyak 9.135 usulan membutuhkan anggaran sebesar 5 Triliun, namun setelah forum lintas perangkat daerah Jumlah usulan menjadi 11.919 usulan, itu berarti dan penambahan 2.784

usulan dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebesar 6,3 T. (sumber laporan Musrenbang RKPD 2021 Kab Enrekang) .

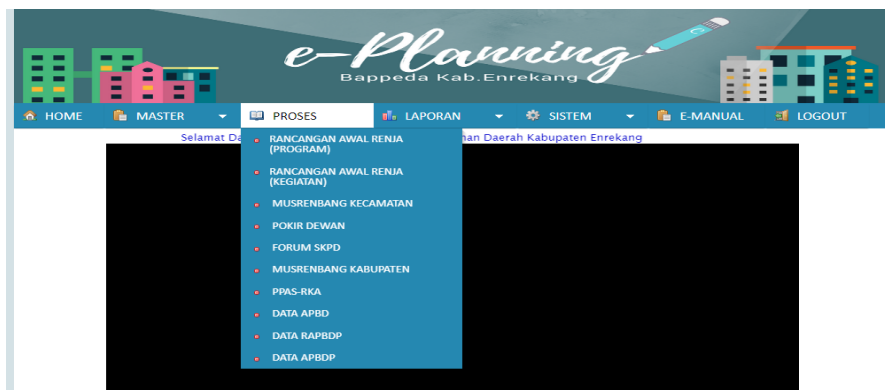
Pola sistem komunikasi *e- planning* ini dinilai mampu menjadi sebuah inovasi dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia dan seluruh daerah karena penerapan aplikasi *e- planning* menyajikan data akurat, kegiatan tepat sasaran, pengelompokan jenis usulan pekerjaan lebih mudah hingga memperpendek waktu rekapitulasi data usulan dan mudah diakses. *e – planning* ini nantinya meliputi perencanaan yang perwujudannya adalah proses musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten (Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten), bergulir terus menjadi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Penetapan Plafon Anggaran Sementara), penetapan R-APBD yang dirapatkan dengan legislatif, sampai pada penetapan APBD.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang saling terkait satu dengan yang lainnya yaitu:(1) Tahapan penyusunan rencana(*planning*);(2) Tahapan penetapan rencana atau bisa juga disebut sebagai tahap penganggaran (*budgeting*);(3)Tahapan pengendalian atau monitoringpelaksanaan rencana dan (4) Tahapan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan.. Tahapan ketiga dan keempat pada praktiknya seringdigabungkan menjadi satu menjadi tahapan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut maka, didalam sistem perencanaan secara eletronik (*e-planning*) di Kabupaten Enrekang terdapat 3 jenis aplikasi yang saling terintegrasi satu sama lain yang *berupa e-planning, e-budgeting dan e-monev.*:

1. *E – Planning* adalah aplikasi perencanaan di tahap Musrembang, Rancangan RKPD, Rancangan Renja dan menampung hasil pokok-pokok pikiran dewan dalam proses penyusunan RKPD dan APBD.

Gambar 1.1

Tampilan *e - Planning*



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

2. *E – Budgeting* adalah aplikasi perencanaan di tahap rancangan KUA – PPAS

Gambar 1.2

Tampilan *e - Budgeting*



Gambar 2. Tampilan *E – Budgeting*

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

3. *E – Monev* adalah aplikasi monitoring dan dan evaluasi dari realisasi anggaran di tiap perangkat daerah.

Gambar 1.3

Tampilan *e - Monev*

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KECAMATAN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018 KEADAAN BULAN JANUARI - MARET SUMBER DANA APBD												
NO	KODE	SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA /DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN/RP	REALISASI (%) FISIK/KEUANGAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		PRESENTASE TERTIMBANG		DPTK/PELAKSANA	KET.
							NARASI	SATUAN (UNIT)	FISIK/KEUANGAN (%)	KEUANGAN (%)		
	3.01.08.01.00	Kecamatan Enrekang										
1	1.01.05.3.01.08.01.00.16	Program Pemeliharaan Kantirathimas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	5,500,000									
1.1	1.01.05.3.01.08.01.00.16.06	Pemangangan/pemeliharaan Kantirathimas	5,500,000	0.76			Terlaksananya Pemeliharaan Kantirathimas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	12 Bulan				
		Pegawai	5,500,000	0.76								
2	1.01.06.3.01.08.01.00.16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4,000,000									
2.1	1.01.06.3.01.08.01.00.16.09	Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan	4,000,000	0.55			Terlaksananya Koor. Perumusan Kebijakan Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemurnan Kesenjangan	18 Desa / Kelurahan				
		Bantuan Sosial	4,000,000	0.55	0	0	0		0	0	Gaby Soraya Omdaya	
3	1.02.04.3.01.08.01.00.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	4,000,000									
3.1	1.02.04.3.01.08.01.00.17.01	Facilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	4,000,000	0.55			Terlaksananya Konflik Pertanahan Di Desa Dan	18 Desa / Kelurahan				

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Sedarmayanti (2003) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*”, (1997), mendefinisikan *good governance* sebagai

“Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.”

UNDP dalam Sedarmayanti (2004) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), adalah meliputi: (1) Partisipasi (*Participation*); (2) Aturan Hukum (*Rule of Law*); (3) Transparansi (*Transparency*), (4) DayaTanggap(*Responsiveness*);(5)Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*); (6) Berkeadilan (*Equity*); (7)Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness dan Efficiency*); (8)Akuntabilitas (*Accountability*);(9)Bervisi Strategis(*Strategic Vision*).

Dari fenomena seperti yang telah disebutkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang Dalam Mencapai Pemerintahan Yang Baik**“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dalam mencapai pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang dalam mencapai pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ilmu Pemerintahan yang Baik (*Good Governace*) serta Perencanaan Berbasis Eletronik;
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi perkembangan implementasi prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governace*) pada perencanaan berbasis elektronik Kabupaten Enrekang;
3. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi keputakaan Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan bagi kalangan penulis lainnya yang Tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governace*) terhadap penerapan perencanaan berbasis elektronik di tempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep dan Teori

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, *e government* dan *Good Governace*

1. Konsep Administrasi Publik

a. Istilah Administrasi

Pendapat A.Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (dalam Keban,2014) menunjukkan variasi batasan tentang “administrasi”.Administrasi, menurut pendapat A.Dunsire, dapat diartikan arahan ,pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pendapat Trecker yang dikutip oleh Donovan dan Jakson (dalam Keban,2014) bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan meterial melalui koordinasi dan kerjasama.

Menurut Siagian (dalam Ahmad,2015) bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang orang manusia atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ahmad dalam bukunya (2015) administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara rasional atas dasar pertimbangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses kerjasama dalam suatu kelompok dengan menggunakan perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan.

b. Pengertian Administrasi Publik

Konsep administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam buku Ilmu Administrasi Publik karya Syafiie (2006) menjelaskan: (a) suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka; (b) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahan, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik; (c) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan kepada masyarakat; (d) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Pakar lain Pfiffner dan Presthus (Syafiie, 2006) menambahkan pengertian administrasi publik adalah: (1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; (2) dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi

pekerjaan sehari-hari pemerintah; (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang

Syafiie (2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa konsep dari administrasi publik itu terdiri dari Isu Pembangunan, Birokrasi Publik, Kebijakan Publik dan Konsep Pelayanan Publik.

Ahmad (2015) dalam bukunya bahwa definisi “Adminisrasi publik adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam wadah organisasi yang digerakkan manajemen untuk mencapai tujuan pemerintahan negara yang telah ditetapkan secara rasional”.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Istilah Kebijakan

Konsep Kebijakan menurut Keban (2014) dalam bukunya adalah serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Pendapat Graycar yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014) kebijakan merupakan suatu tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasi.

Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Turner dan Hulme (dalam Keban, 2014) yang membeberkan serangkaian definisi atau pengertian tentang kebijakan (*policy*) yang menunjukkan makna yang berbeda-beda. Kebijakan dapat diartikan sebagai “label dari suatu kegiatan” seperti kebijakan ekonomi, kebijakan

industri dan kebijakan hukum; dapat juga diartikan sebagai suatu “eksperisi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan “,seperti menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin dan membasmi kemiskinan; kebijakan dapat diartikan sebagai usulan atau “proposal khusus” seperti pemberian pendidikan gratis; kebijakan juga dapat dilihat sebagai “keputusan pemerintah” seperti keputusan presiden; juga dapat di defenisikan sebagai program seperti program kesehatan wanita, bisa juga sebagai “teori” atau model misalnya insentif petani; dan juga sebagai “proses ”seperti penetapan tujuan , pembuatan keputusan untuk implementasi dan evaluasi. Sedangkan menurut Shafrits dan Russel (keban,2014) kebijakan merupakan suatu keputusan dan sifatnya hirarkis mulai tingkat paling tinggi sampai pada paling bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang yang dibuat oleh pemimpin / pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran atau menagani masalah yang timbul .

b. Kebijakan Publik

Menurut kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano,1988) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan, Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya didalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Thomas R. Dye (Subarsono, 2012) mendefinikan kebijakan publik mengandung makna bahwa (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Selanjutnya, Peterson (dalam keban, 2014:61) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dapat dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin, (3) bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai bentuk kongkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Dan program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan di atas.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Model-model implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011), antara lain :

1. Model Van Meter dan Van Horn Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik,

implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, 14 implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sabatier Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (a framework for implementation analysis). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.
3. Model Hogwood dan Gunn Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.
4. Model Goggin, Bowman, dan Lester Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5. Model Grindle Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.
- f. Model Elmore, dkk Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.
6. Model George C. Edward III Model ini menegaskan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah lack of attention to implementation (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully (tanpa implementasi yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : komunikasi, resources, disposition, dan struktur birokrasi.
7. Model Nakamura dan Smallwood Model ini menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusi nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli

para professor kebijakan publik, namun juga para praktisnya di birokrasi dan lembaga Administrasi Publik lainnya.

8. Model Jaringan Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen, interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Berdasarkan model-model implementasi kebijakan publik diatas penulis menggunakan model jaringan dalam implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dalam mencapai pemerintahan yang baik.

3. Konsep *E –Government*

Sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisitik saat ini, memberikan makna mengenai penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang berkeadilan. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah mampu memenuhi dua tuntutan masyarakat yang berkaitan erat yaitu masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya serta masyarakat yang

menginginkan agar aspirasi mereka didengar. Kedua tuntutan itu sangat berkaitan dengan akses informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan antara politik, demokrasi dan masyarakat. E-government adalah salah satu cara dalam mewujudkan proses politik agar lebih partisipatif dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perkembangan teknologi internet tidak saja telah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan publik, tetapi juga telah memungkinkan debat-debat yang bersifat publik yang bertujuan untuk mendiskusikan, mengkritisi dan menganalisis keputusan politik dan tindakan administrasi publik.

Miftah Thoha di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi Publik Kontemporer di tahun 1999 menyebutkan bahwa paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari sarwa Negara ke sarwa masyarakat. Istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Perubahan ini membawa pengaruh yang besar sekali di dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain adalah ditematkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya *e-government* dalam pembangunan masyarakat yaitu:

1. Komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk partisipasi dan interaksi keduanya. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih

singkat, disamping tingkat kenyamanan pelayanan yang semakin tinggi. Selain itu, bentuk transaksi baru akan menyebabkan meningkatnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah.

2. Teknologi informasi dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses yang berbelit-belit. Tujuan realistis yang hendak dicapai melalui teknologi informasi adalah efisiensi pelayanan dan penghematan financial. Informasi online dalam pelayanan publik dapat meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan sebuah pelayanan publik.
3. *E-government* menyajikan juga informasi informasi local setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan global.

Salah satu bentuk dari perwujudan konsep baru tersebut di atas nampak di dalam fenomena administrasi melalui *internet*. Orang berfikir mengenai berlipatnya fungsi pelayanan publik dari para pihak berwenang terhadap warga Negara melalui internet. Informasi detail dapat diakses dengan mudah setiap waktu. Hal ini harus dilihat sebagai satu penggantian fungsi pelayanan yang selama ini diberikan pegawai negeri. Sebagian besar komponen umum tidak lagi memberikan pelayanan secara langsung tetapi menyediakan satu administrasi yang dijalankan masyarakat secara *online*. Dampak potensial pelayanan ini akan meningkatkan secara langsung kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Informasi ini tidak lagi menjadi komoditas langka melainkan sebuah komoditas yang

diterima secara universal. Kontak langsung terhadap pemerintah seperti kunjungan fisik tidak perlu lagi dilakukan, lebih jauh lagi dapat menghilangkan biaya yang timbul karena interaksi langsung. Kombinasi antara buah pikiran tentang *New Public Management*(NPM) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet ini melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut *Electronic Government*.

Melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang bermanfaat untuk memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah. Memudahkan masyarakat untuk mengakses sebuah *website* resmi pemerintah yang menyediakan informasi, berita, mekanisme-mekanisme pengaduan, pelayanan dan seluruh kebutuhan masyarakat yang dapat disediakan oleh pemerintah. Melalui sarana berbasis digital tersebut, arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan baik antara pemerintah, masyarakat dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan. Dengan demikian sinergi yang diharapkan antara ketiga unsur tersebut dapat benar-benar optimal. Dalam hal ini birokrasi pemerintah lebih banyak memberikan wewenang kepada masyarakat, memfasilitasi proses perubahan melalui pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih banyak melakukan kontrol sekaligus memecahkan masalah-masalah pelayanan publik. Untuk semua itu diperlukan *good will* pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi melalui *e-government*.

Peran *e-government* sebagai suatu wahana berdemokrasi, selain melalui partai politik sangat dimungkinkan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah. Masyarakat, kemudian dapat dengan mudah mengakses sebuah website resmi pemerintah dimana disana tersedia semua informasi, berita, mekanisme-mekanisme pengaduan, pelayanan dan seluruh kebutuhan masyarakat yang dapat disediakan oleh pemerintah. Melalui sarana IT tersebut, arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan baik antara pemerintah, masyarakat dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan. Dengan demikian sinergi yang diharapkan antara ketiga unsur tersebut dapat benar-benar optimal. Dalam hal ini birokrasi pemerintah lebih banyak memberikan wewenang kepada masyarakat, memfasilitasi proses perubahan melalui pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih banyak melakukan kontrol sekaligus memecahkan masalah-masalah pelayanan publik. Untuk semua itu diperlukan *good will* pemerintah untuk menerapkan system pemerintahan berbasis digital teknologi melalui *e-government*.

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi memberikan perubahan besar dalam tatanan masyarakat terutama dalam hal komunikasi dan pelayan publik di lingkungan pemerintah. perkembangan tersebut membawa dampak pada beralihnya sistem-sistem pelayanan tradisional yang *based on paper administration* atau pelayanan yang berbasis manual dengan menggunakan kertas berganti pada pelayanan berbasis elektronik. Hal ini kemudian mendorong lahirnya layanan informasi yang berbasis media elektronik dengan lahirnya *e-*

governement sebagai jawaban dari perkembangan teknologi dan informasi. Pada sistem pelayanan publik pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah secara bertahap mulai mengadaptasi konsep *e-government* dalam pelayanannya.

E-government memiliki banyak manfaat dalam sistem berdemokrasi yang saat ini kita terapkan diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan, menghemat anggaran pemerintah, serta memudahkan alur informasi yang dapat diakses secara terbuka guna mewujudkan cita-cita *good governance* dan *open government* pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Mengutip pernyataan Dunleavy saat memperkenalkan konsep digital *governance* pada tahun 2005 sebagai pengganti *New Public Management* (NPM) yang banyak diadopsi di pemerintahan mengatakan, begitu pentingnya digital dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan Publik London *School of Economics and Political Science* (LSE) juga menyatakan bahwa "*New Public Management is Dead, Long Live Digital Era Governance*". Dengan kata lain era digital yang saat ini kita hadapi pada Revolusi Industri 4.0 dalam tata kelola pemerintahan mau tidak mau harus segera diimplementasikan.

Pengembangan *e-government* di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang *E-government*. Inpres tersebut antarlain mengintruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota

di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya program pengembangan e-governemnt secara nasional (Kasiyanto dalam Mulyadi, 2016).

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak luar. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha (Sutanta, 2003).

Pengertian *e-government* merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Dalam kaidah internasional, (The World Bank Group, 2001) mendefinisikan e-government sebagai berikut:

"E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government".

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut:

"Egovernment is the application of information and communication Technology (ICT) by governments agencies" (Indrajit, 2002).

(*E-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah). Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 mendefinisikan *E-Government* sebagai, pemanfaatan teknologi komunikasi

dan Informasi dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari definisi yang sangat umum ini, dapat dilihat bahwa *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan efektif. Dalam banyak literatur, *e-government* juga dikaitkan dengan konsep *digital government* atau *online government* dan biasanya dibahas dalam konteks *transformational government*. Inti dari pengertian ini adalah penggunaan teknologi *internet* yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat, pelaku bisnis dan tentunya pihak pemerintah sendiri. Dalam hal ini harus diingat bahwa yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, bahwa *e-government* bukan sekedar pemakaian teknologinya tetapi juga keharusan bahwa pemanfaatan teknologi membuat sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik akan lebih baik.

Terlepas pemikiran yang berbeda tersebut, esensi yang terpenting dari *E-Government* menurut Sutedi (2009) adalah pemanfaatan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dimana peningkatan kinerja instansi pemerintah tersebut tidak hanya diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada

publik. Tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan merupakan indikator dari rendahnya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi.

Menurut Setiyadi (2006) penerapan *e-government* tidak hanya sekedar tampil di internet, lebih dari itu penerapan *e-government* harus dapat memberikan perubahan radikal di dalam sistem dan tata laksana pemerintahan yang menuntut teladan kepemimpinan, kesediaan merubah paradigma, berani bertindak transparan, dan semua itu bukan sekedar untuk melayani kepentingan public semata, tetapi mencakup kepentingan yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*good governance*).

Berdasarkan seluruh kajian definisi tersebut diatas maka dapat diperoleh tiga kesamaan dari setiap definisi *E-Government*, yaitu masing-masing adalah: 1) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*), 2) Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama melalui teknologi internet), 3) Memperbaiki kualitas pelayanan ke arah yang lebih baik cepat, mudah, transparan dan biaya ringan.

Sedangkan menurut Indrajit (2002) menyatakan bahwa konsep mengenai *e-government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu:

1. Sebagai sebuah konsep *e-government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap Negara memiliki skenario

implementasi ataupun penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *e-government* pun menjadi beraneka ragam;

2. Spektrum implementasi aplikasi *e-government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah Negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
3. Pengertian dan penerapan *e-government* di sebuah Negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari Negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari Negara yang bersangkutan;
4. Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah Negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai negara berlomba mengimplementasikan *e-government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas kinerja pemerintah terutama dalam lingkup pelayanan informasi bagi masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Adapun tujuan *e-government* ini adalah sebagai berikut: (1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara

pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah. (2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah dan lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. (3) Menunjang *good government* dan keterbukaan. (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah. (Anwar & Oetomo,)

Kebijakan tentang penataan *e-government* diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat tujuan strategis *e-government* yang perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi. Strategi *e-government* adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *e-government* harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan *e-government* dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain tampak dengan keluarnya Keppres No.20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas). Dewan yang diketuai oleh Menteri Kominfo ini terdiri dari 14 pengarah yang di bawah presiden dan jajaran menteri kabinet terkait, 9 orang pelaksana, beberapa penasihat, dan tim mitra yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pelaku industri elektronik. Tugas dari DeTIKNas adalah: 1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2) Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK; 3) Melakukan koordinasi nasional dengan instansi pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas TIK serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK; dan 4) Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Banyak lembaga pemerintah telah memanfaatkan revolusi digital dan menyediakan berbagai layanan pemerintah dan layanan informasi publik secara online untuk para *stakeholder e-government*. Stakeholder tersebut meliputi:1) Masyarakat;2) Kalangan bisnis;3) Pegawai Pemerintah;4) Lembaga, Departemen dan kementerian pemerintah;5) Pemimpin perserikatan;6) Pemimpin masyarakat; 7) Politikus;8) Investor Asing.

E-government sendiri memiliki dua tipe kemitraan antara lain:

1. Kemitraan internal, yakni kemitraan antaracabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)
2. Kemitraan eksternal, yakni hubungan pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis.

Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif melahirkan dua hal utama dalam pengertian e-government yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya. Penyelenggaraan e-government melahirkan 4 model hubungan yaitu:

1. G2C (Government to Citizen) yaitu penyampaian layanan publik dan informasi oleh pemerintah kemasyarakat
2. G2B (*Government to Business*) yaitu transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan

bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya adalah sistem *e procurement*

3. G2G (*Government to Government*) yaitu komunikasi dan pertukaran informasi *online* antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.
4. G2E (*Government to Employees*) terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dan pegawai pemerintahan.

Dengan adanya *e-government* dapat memangkas jalur birokrasi yang ada sebelumnya. *e-government* bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Penggunaan teknologi informasi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi serta dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Secara jelas dua negara besar terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e – government*, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan menerapkan konsep *e-Government* bagi suatu negara ,antara lain :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya(masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal

kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governace*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain secara mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi *e-government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, Implementasinya disuatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik yang pada akhirnya akan memberikan / mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.(indrajit,2016)

Melaksanakan maksud dari pengembangan layanan *E-Government* di Indonesia sendiri diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

- a. Pembentukan jaringan Informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara;
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *E-Government*. Salah satu cara mengategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama yaitu;

- a. Aspek Kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *E-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan

b. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya (Indrajit, 2002).

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek *E-Government* dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu Publish, Interact, dan Transact. (Indrajit, 2002).

1. Publish

Jenis ini merupakan implementasi *E-Government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan sebagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet (Indrajit, 2002).

2. Interact

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, pengguna hanya dapat

mengikuti link saja). Kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV* dsb) maupun tidak langsung (melalui email, newsletter dll) (Indrajit, 2002).

3. *Transact*

Kelas ini adalah kelas dua arah seperti pada kelas *Interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Selain memperlihatkan dimensi kompleksitas dan manfaat, klasifikasi ini dapat pula dipergunakan sebagai sebuah inisiatif dari *E-Government* dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih (Indrajit, 2002).

Menurut Gronlund (2007) dengan melaksanakan *e-government* akan menghasilkan keuntungan dengan berkurangnya korupsi akibat dari meningkatnya transparansi di lingkungan pemerintah, peningkatan penerimaan negara dan pengurangan biaya. Disamping itu, implementasi *e-government* memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *e-government* juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam perkembangannya, implementasi *e-government* pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Sehingga banyak persepsi yang beranggapan bahwa ketika suatu instansi menyediakan website maka instansi terutama ditingkat daerah dianggap sudah menerapkan *e-governent*. Padahal *e-governent* sendiri tidak saja menampilkan informasi pemerintah melalui website saja melainkan pemerintah juga dituntut untuk memupuk kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di daerah dalam upaya mensukseskan *e-government*. Karena pelaksanaan *e-government* tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri melainkan memerlukan dukungan dan sokongan dari berbagai pihak, baik masyarakat hingga swasta.

Suksesnya pengembangan *e-government* perlu ada dukungan dari berbagai elemen, dimana menurut Prof. Richardus Eko Indrajit (2013) ada tiga elemen tersebut; *pertama*, Dukungan (*support*), dukungan merupakan elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*. Dimana keinginan tersebut bukan hanya sekedar mengikuti trend saja, sehingga untuk menerapkan implementasi program *e-governemnet* yang efektif harus dari pimpinan pemerintah yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih kepada *action* yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung *e-government* seperti pengalokasian sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan

lain-lain).Pembangunan infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah). Serta disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

Kedua, Kapasitas (*capacity*) merupakan elemen yang berbasis pada unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-government* seperti ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Ketiga, Nilai (*value*), pada elemen ini pemerintah di dalam mengimplementasikan *e-government* pemerintah dituntut untuk benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena tanpa memperhatikan kebutuhan tersebut akan mendatangkan bumerang sendiri bagi pemerintah. Sehingga dalam menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*).

Ketiga elemen tersebut merupakan kunci bagi suksesnya implementasi *e-government* didalam pemerintahan baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sehingga hal tersebut menuntut tiap tingkatan pemerintah yang ada di negara ini untuk mulai merubah sistem kerja pelayanan publik yang ada dengan berbasis

elektronik. Dimana berdasarkan tiga elemen yang dijelaskan tersebut, pemerintah menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pelaksanaan *e-government* di daerah masing-masing.

.Sedangkan menurut Indrajit (2002), manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya *e-government* bagi suatu negara atau daerah menurut adalah sebagai berikut:

1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder(masyarakat, bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good governance*;
3. mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada;

6. memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Menurut *world bank* dalam (Sofyaningrum,2010) manfaat penerapan *e-government*, antara lain:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan

daerah dapat dilakukantanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagisemua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Sedang menurut Ndou(dalam Sofyaningrum,2010), beberapa manfaat dari penerapan *e-government* adalah:

1. *Cost reduction and efficiency gains*, memberikan pelayanan secara *on-line* secara substansial dapat menurunkan biaya operasional dari berbagai kegiatan dibandingkan dengan cara-cara manual.
2. *Quality of service delivery to bussinesses and customers*, denganditerapkannya *e-government* akan memangkas jalur birokrasi sehinggamenciptakan transaksi yang nyaman, aman serta tingkat kemudahan akses yang tinggi.
3. *Transparency, antycorruption and accountability*, dengan *e-government* akanmendukung terjadinya proses transparansi dalam proses pembuatankeputusan.
4. *Increase the capacity of government*, Intranet memungkinkan bagian ataudepartemen yang berbeda saling tukar informasi dan data sehingga aliran informasi akan lebih cepat serta proses pembuatan keputusan akan lebih cepat dan lebih baik.
5. *Improve the quality of decision making*, dengan terciptanya komunitas, forum serta interaksi dan komunikasi yang terus menerus antara pemerintah danwarga negara akan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilankeputusan.

6. *Network and Community Creation*, dengan teknologi informasi menimbulkan kesempatan terhadap pembangunan jaringan dan komunitas.
7. *Promote use of ICT in other sectors of the society*, bahwa interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan stakeholder-nya menyumbang pembentukan pemahaman mengenai potensi teknologi informasi yang dapat disumbangkan bagi kegiatan masyarakat.

Penerapan *e-government* pasti akan banyak berdampak positif baik kepada masyarakat dan pemerintahan. Secara umum ada beberapa keuntungan penerapan *e-government* (Setiyadi, 2003):

1. Transparansi informasi dari pemerintah kepada publik akan sangat jelas, masyarakat akan dengan sangat mudah mengikuti, memantau dan mengontrol perkembangan jalannya pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dalam segala hal. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, tepat dan terpercaya.
3. Membangun dan menciptakan saling percaya antara publik dan pemerintah, karena berbagai informasi kinerja pemerintah kepada publik terekspose dengan dalam *e-government* dan masyarakat dapat mengaksesnya, sehingga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah akan lebih tinggi.
4. Menutup pintu “kejahatan” aparat pemerintah dalam melakukan korupsi.

5. Mengurangi tingkat kesalahan dan mengurangi adanya duplikasi data yang tidak diperlukan melalui basis data yang terintegrasi dan situs jaringan *web* dan *gateway* lainnya.
6. Menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi.
7. Meningkatkan kepuasan kepada masyarakat, pengambilan keputusan yang lebih baik dan bermutu serta menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab.

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011), yakni:

1. *E-Government* meningkatkan efisiensi;

Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dalam hal pemrosesan tugas dan operasi administrasi publik dalam jumlah besar dengan dan antar pemerintahan.

2. *E-Government* meningkatkan pelayanan;

Jika pemerintahan ingin fokus pada pengguna mengimplikasikan bahwa seorang pengguna tidak seharusnya mengerti struktur dan hubungan pemerintahan yang kompleks dengan tujuan berinteraksi dengan pemerintah. Internet bisa membantu untuk mencapai tujuan ini dengan memudahkan pemerintah untuk muncul sebagai organisasi yang bersatu dan menyediakan pelayanan online. Pelayanan e-Government harus dibangun dalam kaitan dengan permintaan dan nilai untuk pemakai sebagai bagian dari strategi pelayanan yang melibatkan banyak saluran.

3. *E-Government* membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu.

Internet bisa membantu pemangku kepentingan (stakeholder) membagi informasi dan ide dan maka itu berkontribusi terhadap keluaran kebijakan tertentu. Sebagai contoh, informasi online bisa menyebarkan penggunaan sebuah program pendidikan atau pelatihan, pembagian informasi dalam sektor kesehatan bisa meningkatkan penggunaan sumber daya dan perhatian terhadap pasien dan pembagian informasi antara pemerintahan pusat dan sub-nasional bisa memfasilitasi kebijakan lingkungan.

4. *E-Government* bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi;

E-Government membantu mengurangi korupsi, menambah keterbukaan dan kepercayaan dalam pemerintahan dan berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi. Dampak khusus mencakup pengeluaran pemerintahan yang berkurang melalui program yang lebih efektif dan efisiensi dan peningkatan dalam produktivitas bisnis melalui teknologi komunikasi dan informasi memudahkan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan informasi pemerintahan.

5. *E-Government* bisa menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi;

Teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung reformasi dalam banyak area, sebagai contoh dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi pembagian informasi dan meng-highlight ketidak konsistenan internal.

6. *E-Government* bisa membantu membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga Negara;

Manfaat dari dimensi pemerintahan lainnya dari pelaksanaan *e-Government* antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

- g. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas (Indrajit, 2005).

Melihat beberapa pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan dari manfaat yang diharapkan dari aplikasi *e-Government* adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengakibatkan penghematan biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah.
- b. Dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik.
- c. Dapat mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Dapat menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan perubahan global dan *trend* yang ada.
- g. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain pengambilan berbagai kebijakan publik dan demokratis.
- h. Menciptakan masyarakat informasi yang berkualitas.

Untuk membangun *e-government* sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005), menyarankan 8 (delapan) strategi *e-government*:

1. Perencanaan strategi secara keseluruhan. Kombinasikan antara perencanaan dari sisi strategis dan detail operasionalnya di lapangan. Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya;
2. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana;
3. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pastimemerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang;
4. Perbandingan pelaksanaan *e-government* secara internasional. Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses adaptasi dan penyesuaian perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi secara lokal;
5. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena *e-government* akan melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, standarisasi menjadi faktor dan memungkinkan adanya pertukaran data;
6. Oreantasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa *e-government* membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena itu pengembangan sistem informasi yang akan

dilaksanakan haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakannya;

7. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan ada insentif yang diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan *e-government* di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak akan mempunyai manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. *e-government* adalah proses yang sangat besar yang membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan program *e-government* tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis perlu dilakukan.

Menurut Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005), terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detail. Kelima dimensi itu adalah:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah:
 - a. Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan;

- b. Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam one stop shop dari satu portal menuju berbagai layanan;
 - c. Kemudahan pengguna dalam mendapatkan layanan tersebut.
2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, diantaranya:
- a. Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan database yang bisa berjalan dengan baik ketika dibutuhkan;
 - b. Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik;
 - c. Pemanfaatan platform teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek.
 - d. Kualitas dan ruang lingkup bagi para staf dan pegawai.
3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya:
- a. Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web;
 - b. Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat;
 - c. Pengaruh dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan;.

Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas chat, forum, dan, milis).

4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya:
 - a. Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain);
 - b. Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak;
 - c. Topicality of information.
5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya:
 - a. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi ditempat lain;
 - b. Kualitas kontrol dan review;
 - c. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

Menurut Indrajit (2005), terdapat sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-government*, yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-government*;
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah, dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-government*;
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, yang akan menjadi “pemain utama” atau subek di dalam inisiatif *e-government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *e-government*;
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran, sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *e-government* yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya;
5. Perangkat Hukum, karena konsep *e-Government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta

intelektual, misalnya, akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

6. Perubahan Paradigma, pada hakekatnya penerapan *e-Government* merupakan suatu proyek *changemanagement* yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dengan cara berfikir.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi sejumlah praktisi *e-Government* di berbagai negara dalam Indrajit (2002), secara pokok ada 3 (tiga) tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep *e-government* di negaranya masing-masing, yaitu:

1. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
2. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain diluar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur *e-Government* yang dibutuhkan; dan
3. Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan *e-Government* ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Di samping itu, menurut Indrajit (2005) standar ukuran dampak aplikasi *e-*

government, yaitu:

1. Persentase jumlah pelanggan yang menggunakan *e-government* dibandingkan dengan aktivitas terdahulu;
2. Jumlah “kunjungan” atau akses terhadap aplikasi *e-government* melalui internet sehari-harinya;
3. Besarnya pengurangan biaya yang terjadi baik di kalangan institusi pemerintahan maupun yang harus ditanggung oleh masyarakat atau penikmat/pengguna/pemakai pelayanan yang diberikan pemerintah;
4. Peningkatan ragam produk atau jasa baru dari pemerintah yang disediakan bagi komunitas masyarakatnya;
5. Kemudahan dalam “mengonsumsi” pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya; dan lain sebagainya.

Adapun menurut Sosiawan (2007), menjelaskan tentang beberapa rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahan hambatan-hambatan dalam implementasi *e-government*, yaitu:

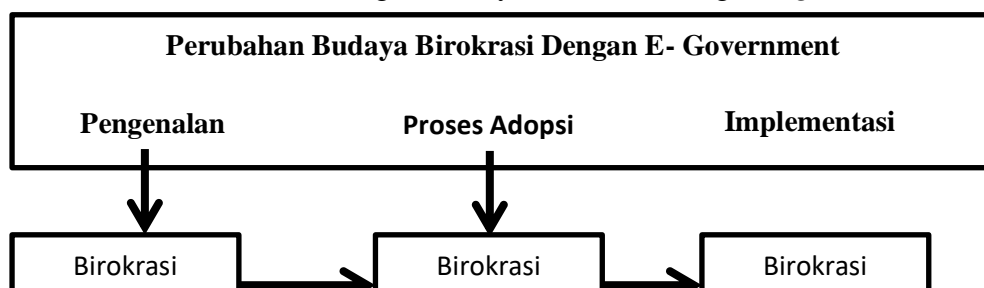
1. Untuk memecahkan hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan situs website pemerintah daerah maka pemerintah pusat perlu membuat perencanaan dan strategi *e-government* yang dituangkan dalam Undang-Undang atau peraturan Pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka.

2. Untuk memecahkan hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
3. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, maka diperlukan suatu kerja sama dengan pihak swasta khususnya provider teknologi informasi dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak.
4. Untuk mengatasi belum meratanya *literacy* masyarakat tentang penggunaan *e-government*, maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan beberapa tahap, yaitu sosialisasi kepada pimpinan lembaga pemerintah, memberikan penekanan dalam sosialisasi *e-government* di kalangan para pimpinan mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan teknologi informasi dalam tata pemerintahan, dan memberikan pengetahuan yang luas kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam *e-government*.

Berdasarkan pengalaman di beberapa Negara maju menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan e-government dapat mengakselerasi langkah-langkah reformasi dalam pelayanan publik. Di China, misalnya, yang selama ini diketahui bermasalah dengan implementasi strategi pembangunan berkelanjutan karena kurangnya informasi yang akurat serta ketersediaan informasi yang masih tersebar di beberapa organisasi yang berbeda.

Dengan menggunakan ICTs China berhasil mengembangkan apa yang disebut dengan jaringan agenda nasional 21, khususnya yang menghubungkan serangkaian kunci pemerintahan nasional, dengan pemerintahan lokal dan lembaga-lembaga riset sector publik. Sistem tersebut membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan sumber-sumber data yang terpercaya, dengan lebih cepat dan informasi yang diterima juga lebih lengkap sehubungan dengan pengambilan keputusan strategis di bidang lingkungan. Selain itu, Korea Utara juga telah mencoba mengembangkan *e-governance* khususnya *e-service* dan *e-citizen* yang ditujukan untuk program pemberantasan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam hal perijinan. Teknologi ini memungkinkan terciptanya open sistem (*Online Procedures Enhancement for civil applications*) dimana memuat seluruh informasi yang diperlukan masyarakat yang akan mengurus perijinan. Sehingga masyarakat benar-benar mengetahui prosedur dan standar pelayanan yang sebenarnya tanpa harus dikelabui oleh pihak-pihak atau bahwa oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga dapat ikut memantau proses pelayanan apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Masih banyak lagi pengalaman-pengalaman penerapan *e-government* yang membawa perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan seperti di Afrika Utara dengan sistem pemilunya, Chili dengan *Tax return filing* nya, India dengan pengembangan masyarakat perdesaan, dan lain sebagainya. Berikut adalah pola perubahan budaya birokrasi melalui *e-government*:

Gambar 2.1 Pola Hubungan Budaya Birokrasi Dengan *e-goverment*





Good Governace

Sumber : Nurhakim (2014)

Setiap perubahan, walaupun itu adalah untuk perbaikan, tentu akan menimbulkan berbagai reaksi mulai dari sekedar meragukan efektivitasnya sampai pada penolakan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi tersembunyi (*vested interest*) yang bertentangan dengan tujuan perubahan tersebut. Apalagi perubahan yang diterapkan di sector pemerintahan tentu jauh lebih kompleks dan karenanya akan sangat sulit jika dibandingkan dengan perubahan yang diintroduksikan di sektor privat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pola penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang telah dilalui selama berpuluh-tahun, dan telah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Oleh karenanya melakukan perubahan atau pembaharuan di sektor ini jelas sangat membutuhkan upaya keras dan konsisten.

Riley (dalam Nurhakim,2014) menyebutkan bahwa Penerapan *e-government* sebagai suatu strategi inovasi di kalangan organisasi pemerintah, sebagaimana strategi inovasi yang diterapkan pada sebuah organisasi bisnis, jelas mensyaratkan adanya manajemen perubahan (*change management*) yang tepat demi kesuksesannya. Menerapkan *e-government* berarti melakukan serangkaian perubahan atau reformasi budaya (*cultural change*)., Manajemen perubahan dalam konteks ini difokuskan pada bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelayanan publik memasuki masa transisi dari pendekatan tradisional ke manajemen, dari era teknologi pre-information dan communication menuju era baru dimana lingkungan selalu berubah dengan cepat melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih .

Dengan demikian, manajemen perubahan lebih ditekankan untuk mempersiapkan individu-individu yang terlibat dalam suatu proses transformasi. Hal ini mengingat keberhasilan suatu program pembaharuan atau perubahan sangat ditentukan oleh sikap dan dukungan dari setiap komponen organisasi pada semua level. Perubahan menuntut adanya komitmen yang tinggi serta konsistensi tindakan kearah nilai-nilai yang ingin dikukuhkan menggantikan sistem nilai lama yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Setiap perubahan, apapun bentuk dan motifnya, akan selalu menghadapi upaya penolakan (*resistensi*) dari beberapa pihak yang kurang mendukung terhadap adanya perubahan tersebut atau juga pihak-pihak yang kurang optimis terhadap keberhasilan suatu perubahan. Oleh karenanya yang perlu untuk mendapat perhatian adalah bagaimana meminimalisir

daya resistensi tersebut dan menggalang komitmen bersama untuk mensukseskan perubahan yang dikehendaki.

Penerapan *e-government* akan mendorong terjadinya perubahan cultural, yang berarti juga perubahan sistem nilai, tidak saja di kalangan birokrasi pemerintah, tetapi juga masyarakat secara menyeluruh termasuk *privat sector* dan NGOs. Dari budaya birokrasi yang tertutup menuju budaya yang transparan, dimana tuntutan adanya transparansi itu semakin kuat dari level lokal, nasional dan sampai ke level internasional (antara negara). Hal ini jelas sangat membutuhkan kesiapan mental serta kemampuan (*skills*) sumberdaya manusia yang memadai.

Di Indonesia, kendala utama dari penerapan *e-government* tidak dapat disangkal lagi adalah faktor internal pemerintah utamanya faktor manusianya atau lebih jelasnya adalah kurangnya *good will* pimpinan (Bupati/ Walikota) selaku decision maker di tingkat lokal. Ketika wacana ini dilontarkan tidak sedikit sikap pesimis yang nampak sebagai refleksi keengganan individual untuk melakukan pembaharuan secara sungguh-sungguh. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor antara lain: kendala sumberdaya baik finansial, maupun masih rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintahan daerah setempat. Sikap pesimis atau ketidak siapan tersebut nampaknya memang cukup rasional mengingat *e-government* ini memang memerlukan adanya penguasaan teknologi komunikasi serta kemampuan finansial yang tinggi, belum lagi pengaruh factor-faktor spesifik atau kondisi tertentu di masing-masing negara. Sebagai contoh, membangun sirkuit internet untuk *e-government* di Fiji

memakan biaya 9 kali lipat dari yang dihabiskan di Jamaica (Campo,2002). Selain itu kendala juga dapat berasal dari luar pemerintah (faktor eksternal) yakni ketidak siapan masyarakat sendiri karena belum banyak yang familier dengan komunikasi melalui digital teknologi. Hal ini terbukti ketika diterapkannya sistem *electronic data interchange (EDI)* untuk pengurusan prosedur ekspor impor di Kantor Bea Cukai banyak customer atau perusahaanyang tidak siap dengan sistem tersebut.

Huseini (1999) dalam paparannya menguraikan adanya tiga jenis tantangan dalam penerapan *e-government* yakni yang bersifat *tangible*, *intangible* dan *very intangible* (dalam Prasajo, 2001). Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasaran fisik jaringan telekomunikasi dan listrik termasuk yang *tangible*. Sedangkan yang *intangible* misalnya tantangan financial, dan keterbatasan SDM. Sementara yang tergolong *very intangible* adalah keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* berikut penerapan berbagai tindakan sebagai konsekwensi yang harus dilakukan seperti menegakkan disiplin atas segala pelanggaran serta bagaimana membangun *knowledge society* di kalangan birokrasi pemerintah itu sendiri (Prasajo, 2001).

Banyaknya kendala dan tantangan dalam *e-government* sebenarnya dapat diatasi sepanjang harapan pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut tetap kuat dan konsekwen. Masyarakat terutama di negara-negara sedang berkembang akan dengan cepat berevolusi menuju masyarakat digital yang ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut (Campo, et.al.,2002):1) meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan komputer;2) turunnya biaya komunikasi;3) kemudahan dalam pemakaian dan mengakses informasi;4)meningkatnya tuntutan

masyarakat; 5) meningkatnya teknologi komunikasi;6. meningkatnya aktivitas ekonomi global.

Perubahan pola beraktivitas di kalangan masyarakat luas tersebut, sesungguhnya merupakan suatu peluang bagi penerapan *e-government*. Kegagalan sebagaimana pada kasus EDI di Bea Cukai, paling tidak dapat diminimalisir dengan adanya jangkauan system yang lebih luas dan dapat diakses oleh masyarakat umum, tidak terbatas hanya pada *specific customers*. Masyarakat dengan karakteristik *computer literate* dan *information minded* yang semakin banyak tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota, merupakan salah satu penggerak utama *e-government*. Hal ini identik dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam *good governance*, hanya partisipasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam *e-government* ini akan semakin terdorong oleh adanya kepentingan bersama akan adanya layanan publik yang makin professional dan berkualitas, serta adanya kesadaran akan *governance*. Dalam rangka itu perlunya membangun hubungan antara berbagai pihak demi mewujudkan *good governace* maka *e-government* menjadi suatu kebutuhan dan merupakan sarana paling efektif, dengan pertimbangan beberapa keunggulan *e-government* sebagaimana dipaparkan terdahulu. Selain itu berdasarkan hasil analisis biaya-manfaat sebagaimana yang ditulis oleh Idham(2001), dari beberapa alternatif kebijakan, *e-government* dianggap dapat memenuhi kualitas layanan prima sebagaimana ditetapkan pada kriteria- kriteria tujuan kebijakan sehingga layanan publik ini mampu menjadi instrument kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun kriteria-kriteria tujuan

kebijakan tersebut meliputi:1)Reformasi layanan publik dalam kerangka pasar bebas dan *free internal trade*;2) Desentralisasi dan Otonomi;3. Optimalisasi dan efektivitas asset dan sumberdaya insani;4) Perimbangan keuangan daerah Pusat dan kemandirian daerah;5) Ukuran biaya manfaat yang layak bagi kepentingan publik;6) Efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut tentunya tidaklah mudah. Hal penting yang harus dipertimbangkan adalah membangun harmonisasi antara pilar *good governance*, terutama dalam membentuk pola pikir terhadap konsepsi akuntabilitas publik yang selama ini belum sepenuhnya tepat. Untuk itu diperlukan seperangkat kebijakan dalam rangka mendorong keberhasilan inovasi tersebut. Kebijakan tersebut antara lain dapat berupa(Campo,2002):

1. Kebijakan yang dapat menciptakan iklim politik yang mendorong pengambilan resiko di kalangan birokrasi pemerintah. Nilai-nilai yang mendasari pola perilaku birokrat yang cenderung status quo sangat anti terhadap resiko, cenderung tidak suka dengan inovasi yang belum jelas keberhasilannya dan lebih memilih pola-pola lama yang sudah dianggap benar,sudah waktunya diganti dengan nilai-nilai yang menghargai inovasi dan kreativitas.
2. Kebijakan yang mendorong inisiatif lokal. Mengurangi dominasi pusat atau pemerintah nasional, untuk kemudian lebih memberdayakan institusi lokal karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, kelompok-kelompok kemasyarakatan dan bisnis. Melalui reorganisasi

struktur pemerintah lokal dapat menjadi peluang bagi kebebasan berpikir dan melakukan perubahan termasuk melaksanakan ICT.

3. Kebijakan yang menempatkan tujuan bisnis dalam pelayanan publik. Hal ini tidak berarti menciptakan nuansa bisnis dalam memberikan pelayanan publik, tetapi lebih untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat sebagai *customer* melalui *system appraisal* yang kompetitif. Melalui kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan akan mampu mengubah sistem nilai dan pola perilaku lama menuju ke pola perilaku baru yang mengedepankan *connectivity* antara berbagai komponen dan level masyarakat, swasta/pengusaha dan pemerintah yang menjamin adanya kemudahan, kecepatan dan akhirnya memberikan kepuasan. Terbentuknya hubungan tersebut merupakan investasi budaya luar biasa yang dalam jangka panjang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Effendi (2001) mengungkapkan bahwa Sudah merupakan fenomena umum bahwa selama ini pemerintahan di negara-negara sedang berkembang memakan biaya tinggi, namun memberikan sedikit pelayanan, dan kurang begitu responsive atau kurang akuntabel. Untuk itulah reformasi diperlukan guna mengatasi pathologi birokrasi yang sudah menjadi kronis tersebut. Namun sejauh ini pula hasil yang diperoleh dari serangkaian proses pembangunan yang telah dilalui belum memberikan hasil yang maksimal, melainkan masih sangat jauh dari harapan. Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah melalui *good*

governance, maka perlu dibangun jaringan yang partisipatif, transparan, dan responsive antara pilar-pilar *good governance* tersebut. Dan hubungan semacam itu hanya dapat dibangun dengan menerapkan teknologi informasi atau manajemen berbasis *e-governance*.(dalam idham,2002)

Belajar dari kegagalan-kagagalan pembangunan serta sulitnya mengubah perilaku birokrasi atau mentalitas birokrasi maka diperlukan adanya pemahaman kembali mengenai hakekat pembangunan daerah dan bagaimana mewujudkannya melalui *e-governance* tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Effendi (2001) Pembangunan daerah di era otonomi dalam konteks *good governance* paling tidak harus memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi kehidupan material secara adil dan merata.
2. Meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja masyarakat daerah
3. Mendorong penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi.
4. Mengembangkan peradaban
5. Meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan yang berkelanjutan

Beberapa hal lain yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia antara lain:

1. Budaya berbagi belum ada. Budaya berbagi informasi dan mempermudah urusan belum ada. Bahkan banyak oknum yang

menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

2. Budaya mendokumentasikan belum lazim. Salah satu kesulitan terbesar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
3. Masih langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. SDM untuk bidang teknologi informasi umumnya dimiliki oleh lingkungan bisnis/industri. Hal ini akan lebih parah jika kekurangan kemampuan pemerintah ini dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan sangat mahal.
4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Kalaupun ada fasilitas harganya masih relatif mahal.
5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan point di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, Pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau. Ini yang harus lebih ditingkatkan di Indonesia.

Apa yang ditawarkan oleh *e-government* itu merupakan keunggulan utama dari *Information Communication Technologies* (ICT) yang mendorong terjadinya tiga perubahan yang mendasari terciptanya *good governance* di Negara yang sedang berkembang, yang meliputi:

1. *Automation* yaitu pergeseran dari pemrosesan informasi secara manual ke teknologi digital
2. *Informatisation* yaitu mempercepat proses pengolahan informasi misalnya dalam rangka pengambilan keputusan dan implementasi keputusan
3. *Transformation* yaitu penciptaan metode-metode pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Dari ketiga perubahan fundamental ini, akan membawa beberapa keunggulan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan khususnya pembangunan daerah dan pelayanan publik, yakni:

1. Efisiensi, yang artinya pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan dengan lebih murah, mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, dan mampu bekerja lebih cepat. Pemerintah mampu menghasilkan *output* yang sama dengan biaya yang lebih murah, pemerintah mampu menghasilkan sejumlah output yang lebih besar dengan total biaya yang sama, serta pemerintah mampu menghasilkan output yang sama dengan biaya sama, namun waktu yang lebih cepat.
2. Efektivitas, yang artinya pemerintah mampu bekerja lebih baik dan lebih inovatif. Pemerintah mampu menghasilkan sejumlah output yang sama, dengan biaya dan waktu yang relative sama, namun dengan standar kualitas layanan yang lebih baik, serta mampu menangkap aspirasi masyarakat yang dilayaninya dengan memberikan pilihan alternatif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat tersebut.

Pemerintah Indonesia perlu memikirkan untuk dengan segera menerapkan *e-government* sebagai bentuk kepedulian terhadap kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Penerapan e-government ini sebagai salah satu bentuk Pemerintah Indonesia menuju pemerintahan terbuka dan modern. Pemerintah Indonesia dengan sistem “pemerintah terbuka” akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kuat dan bersih serta akuntabilitasnya terpercaya dimata publik Indonesia maupun dunia.

Jika *e-government* di Indonesia diterapkan maka pemerintah Indonesia harus sudah memikirkan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah harus menganggarkan dana bagi pembangunan infrastruktur TIK. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan mempercepat penerapan *e-government* dalam pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan.
2. Kebijakan baru yang berkaitan dengan aturan, landasan hukum, kebebasan data, dan perlindungan data.
3. Sumber daya manusia (SDM), pemerintah perlu mempersiapkan SDM yang mempunyai kapasitas pengetahuan dalam hal manajerial dan penguasaan TIK. Untuk saat ini Indonesia telah memiliki banyak pakar-pakar dalam bidang ini, sehingga hal ini merupakan modal untuk segera mengembangkan *e-government*.
4. Kemitraan dan kolaborasi, hal ini dilakukan untuk mendukung berjalannya *e-government* dengan baik. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan kemitraan dengan masyarakat agar

E-government berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena jalannya

E-government mendapat pantauan dari pihak-pihak yang independen.

Sebagai konsep yang aplikatif, *e-government* menawarkan alternatif untuk mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi. Namun hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang sangat mungkin menjadi tidak efektifnya implementasi *e-government* di suatu negara. Di Indonesia, hambatan utama justru terletak pada *goodwill* pemerintah untuk menerapkan *e-government* tersebut. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peran serta aktif dari berbagai komponen masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri dalam rangka perumusan produk-produk kebijakan publik yang lebih inovatif. Oleh karenanya, interaksi dan sinergi yang efektiflah yang memungkinkan dapat diterapkannya *e-government* dengan baik.

Masyarakat kita saat ini sedang mengalami fase evolusi dalam hal berorganisasi dan berkomunikasi. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu tanggap dan menyesuaikan dengan polapola dan kecenderungan baru yang akan selalu terjadi di masyarakat. Sehingga setiap perubahan yang terjadi ini harus diantisipasi dan difahami serta selanjutnya difasilitasi dengan bentuk penyediaan teknologi *support system* yakni *e-government*. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah harus diperhatikan cara-cara pengawasannya. Sehingga bagaimanapun teknologi yang semakin maju, tetap yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana memenuhi kewajiban pelayanan publik dengan baik dan bagaimana Pemerintah mempertanggungjawabkannya dengan transparan.

4. Konsep *Good Governace*

a. *Governace*

Kata *governance* dan *government* sering disalah artikan dan digunakan secara tumpang tindih. Rewansyah (2010:80) menjelaskan bahwa meskipun antara dua kata tersebut terdapat hubungan yang erat, tetapi pengertian yang terkandung dalam kata *governance* jauh lebih luas dari kata *government* meskipun kata asalnya sama, yaitu *to govern*. Padanan kata *governance* dalam Bahasa Indonesia adalah penabdiran, berarti: pemerintahan, pengelolaan. Dasar kata dari penabdiran adalah *tadbir*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: perihal mengurus atau mengatur (memimpin, mengelola); pemerintahan; administrasi negara (publik). Penabdir berarti: penyelenggara, pengurus, dan pengelola. Dalam bahasa Indonesia umumnya kata *government* diterjemahkan sebagai pemerintah atau sama maknanya dengan penabdir, namun kata penabdiran kurang familiar ditelinga masyarakat.

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc.*” Atau dalam bahasa Indonesia berarti: “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.”

Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris: “*Governance*“ yaitu: “*the act, fact, manner of governing,*” berarti: “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian

“*governance*” adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2009:273) bahwa *governance* lebih merupakan:

“Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”, seperti dikutip oleh Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut:

“ *Governance is exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.*”

Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan intergritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. UNESCAP (2009:1) mendefinisikan *governance* sebagai:

“ *Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).*”

Governance, *government*, dan *good governance* merupakan terminologi yang berbeda satu sama lain, meskipun ketiganya saling berhubungan. Untuk memahami ketigaterminologi tersebut, uraian berikut diharapkandapat membantu. Dalam memahami perbedaan antara *governance* dan *government*, Schwab dan Kubler (2001) melihatnya dari 5 (lima) fitur dimensi berdasarkan pengamatan

mereka terhadap interaksi pada sebuah rangkaian pengaturan kebijakan antara *governance* dan *government* sebagai berikut : dimensi aktor, dimensi fungsi, dimensi struktur, dimensi konveksi interaksi, dan dimensi distribusi kekuasaan.

Dilihat dari dimensi aktor, *governance* dicirikan dengan banyaknya jumlah peserta baik yang berasal dari sektor publik maupun privat yang terlibat dalam pengaturan sebuah kebijakan. Sementara itu, *government* dicirikan dengan sangat sedikit dan terbatasnya jumlah peserta dalam proses pengaturan kebijakan tersebut, aktor yang terlibat pun biasanya merupakan badan-badan (lembaga) pemerintahan. Dari dimensi fungsi, *governance* dicirikan melalui banyaknya konsultasi yang dilakukan dalam pengaturan kebijakan. Hal ini memungkinkan adanya kerjasama dalam pembuatan kebijakan antara aktor-aktor yang terlibat. sehingga isu-isu kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sempit. Hal ini berbeda dengan *government* yang dicirikan dengan sedikitnya konsultasi, tidak adanya kerjasama antar aktor dalam pembuatan kebijakan yang menyebabkan luasnya isu kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan dimensi struktur, *governance* dicirikan dengan adanya batas-batas yang didefinisikan secara fungsional dan sangat terbuka selain keanggotaan dari struktur yang bersifat sukarela. Batas-batas yang didefinisikan secara fungsional di sini berarti pertimbangan pengaturan kebijakan didasarkan atas kebutuhan fungsional. Hal ini tidak seperti *government* yang mendefinisikan batas-batas berdasarkan kewilayahan dan bersifat tertutup selain tentu saja keanggotaannya yang tidak sukarela, artinya untuk dapat masuk sebagai struktur harus merupakan anggota dari organisasi sektor publik.

Dari dimensi interaksi, *governance* dicirikan dengan konsultasi yang sifatnya horisontal dengan pola hubungan yang bersifat kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. Sementara itu *government* dicirikan dengan adanya hirarki kewenangan sehingga polahubungan yang terjadi lebih banyak bersifat konflik dan dipenuhi dengan banyak kerahasiaan.

Berdasarkan dimensi distribusi kekuasaan, *governance* dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta keseimbangan atau simbiosis antar aktor. Sementara itu *government* dicirikan dengan adanya dominasi negara yang dalam banyak hal tidak terlalu memperhatikan kepentingan masyarakat serta tidak adanya keseimbangan antar aktor yang terlibat.

Selanjutnya Sedarmayanti (2004) mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a) Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
- b) Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c) Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-

tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2004) dalam sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi, negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, pembedaan antara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.

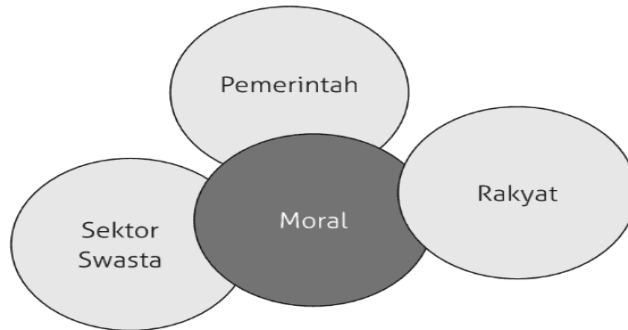
Jika kekuasaan negara melampaui kekuasaan masyarakat (*civil society*) dan pasar (*market*), demokrasi dinilai tidak akan tumbuh karena terlalu didiktekan dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuasaan *civil society* dan negara, berarti kekuatan uanglah atau kaum kapitalislah yang menentukan segalanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi, jika kekuasaan yang dominan adalah *civil society*, sementara negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah kehidupan bersama yang *chaos, messy, government-less*, yang berkembang tanpa arah yang jelas. Karena itu, yang dianggap paling ideal untuk demokrasi adalah apabila ketiga wilayah kekuasaan itu tumbuh secara seimbang, sama-sama kuat dan saling pengaruh

mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang fungsional dan sinergis. Jika salah satu di antaranya paling dominan dibanding yang lain maka yang lain menjadi lemah. Sebagai ilustrasi, jika negara kuat atau mempunyai pengaruh besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama dibanding *civil society* dan swasta, maka keputusannya akan otoriter atau terjadi tindakan yang repressif, sebaliknya jika *civil society* (masyarakat madani) lebih kuat dibanding yang lain, maka keputusan-keputusan lembaga-lembaga negara substansinya akan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan massa, demikian pula halnya jika pasar (*market*) atau swasta lebih kuat, maka akan menciptakan ketidakteraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Asshiddiqie, 2014).

Menurut Miftah Thoha (2014) selain dari komponen pemerintah, swasta, dan rakyat, satu komponen yang sangat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Moral menghubungkan ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Gambar 2.1

Hubungan Komponen Moral dengan Ketiga Komponen UNDP



Sumber : Miftah Thoha(2014)

b. *Good Governace*

Tata Pemerintahan yang baik (*good governace*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini digunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa yang lalu, konsep *good governace* ini lebih dekat digunakan dalam reformasi sektor publik. Didalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekan pada peran manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manegerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan ooleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan manejerial yang bersih bebas dari korupsi.(Thoha,2004).

Sejumlah perpektif muncul dari paradigma ini dan hal ini mendorong ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi. Diantara perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan timbul adalah :

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar.
2. Hubungan pemerintah dengan rakyatnya.
3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi voluntari dan sektor privat.
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat).
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan perdesaan.
6. Hubungan antara legislative dan eksekutif.
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional.

Dalam menganalisis perpektif ini, banyak praktisi dan teoretisi dalam bidang administrasi publik merumuskan berbagai prosedur dan proses yang bisa digunakan untuk mencapai dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan asumsi – asumsi dari tata pemerintahan yang baik. Sementara itu Negara donor dan lembaga-lembaga multilateral telah mengambil peran yang mengemuka (*a leading role*) dalam merumuskan *Good Governace*. Salah satunya ialah UNDP.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah *governace* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelolah masalah-masalah sosialnya. Istilah *governace* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya

digunakan untuk pembangunan, tetapi juga menciptakan kohesi, integrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemampuan suatu Negara untuk dapat tujuan pembangunannya sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan yang baik dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Seperti dikatakan didepan bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*Business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan tata pemerintahan yang baik tersebut.

Upaya untuk menyeimbangkan ketiga komponen tersebut merupakan peran yang harus dimainkan oleh ilmu administrasi publik, apabila peran yang harus dimainkan oleh administrasi publik. Apabila peran yang dimainkan tidak mampu menjamin adanya kongruensi dan cohesiveness antara ketiganya, maka akan menjadi ketidakseimbangan, karena ada kemungkinan satu komponen mempengaruhi bahkan menguasai komponen lainnya.

Dengan demikian, ilmu administrasi publik berperan dalam mengkaji dan mewujudkan program aksi dari tata pemerintahan yang demokratis dan berjalan

secara baik. Proses Keseimbangan ini yang dijaga oleh pratika administrasi publik agar tidak berhenti sampai sketsa.

Di dalam tatanan pemerintahan yang demokratis , komponen rakyat (*civil society*) harus memperoleh peran utama. Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya berada di penguasa, melainkan ditangan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu , peran rakyat oleh administrasi publik difasilitasi berada pada posisi yang menentukan dalam konstelasi keseimbangan tersebut.

Demikian juga peran sektor swasta atau business sangat mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik. Dalam suatu sistem administrasi publik yang kurang memperhatikan proses keseimbangan ini, suatu ketika peran sektor swasta ini bisa berada diatas . Hal ini bisa terjadi jika pembuat kebijakan publik dalam sistem administrasi publik terkolusi dan tergoda untuk memberikan akses yang longgar kepada para usahawan swasta. Keadaan seperti ini akan memberikan warna yang jelas terhadap corak dari sistem dan tata pemerintahan yang kolusif dan nepotisme (*Bad Goverments*). Hal lain juga terjadi, jika kekuasaan negara melebihi dari tataran keseimbangan antara tiga komponen tersebut .Kekuasaan Negara berada pada posisi diatas dua komponen tersebut . Apabila kemungkinan ini terjadi maka sistem administrasi publik umumnya disebut sebagai sistem yang sentralistis dan otokratis.

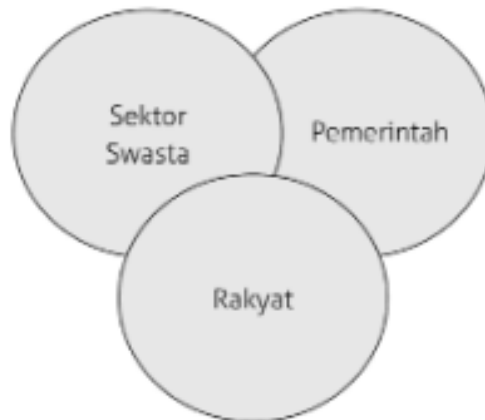
Ilmu administrasi publik berperan untuk menjaga agar ketiga komponen itu tidak lemah posisinya satu sama lain dan tidak saling mendominasi. Jika

ketiganya-tiganya lemah menimbulkan situasi chaos. Dan jika salah satu yang lemah maka akan menimbulkan situasi tata pemerintahan kurang serasi. Baik kondisi chaos maupun kurang serasi akan menimbulkan tata perintahan yang tidak baik.

Kontelasi keseimbangan dari tiga komponen yang tidak imbang tersebut akan membawa pengaruh yang besar terhadap terciptanya tata pemerintahan baik .Bagi ilmu administrasi publik tidak lain fungsinya kecuali menjamin agar suatu sistem dan tatacara dalam mekanisme keperintahan berada dalam posisis seimbang , selaras, koheresif dan kongruen dimana peran rakyat amat menentukan . Fungsi menyeimbangkan ini tidak mudah karena sering kali tergoda oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik, sedangkan administrasi publik berada di wilayah birokrasi publik. Tarik – menarik antara kedua wilayah ini telah lama menjadi bahan perselisihan yang tidak ada henti-hentinya sampai sekarang ini.

Gambar 2.2

Keseimbangan Tiga Komponen dari UNDP



Sumber : Miftah Thoha (2014)

Kita harapkan di masa-masa yang akan datang konstelasi ketiga komponen itu dapat menimbulkan hubungan yang kohesif, kongruen, selaras dan kesetaran. Sehingga masing-masing komponen memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan tatanan keperintahan yang baik. Ketiga komponen UNDP itu perlu ditambah dengan komponen moral sebagai pembalut dari ketiganya. Dengan menyertakan komponen keempat ini, semoga korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi penghalang terciptanya tata pemerintahan yang baik bisa dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan.

Timbulnya korupsi sebagai salah satu penyakit yang menghalangi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik, karena pada hakikatnya keseimbangan peran dari ketiga komponen tersebut berat sebelah . Peran pemerintah yang sentral memberikan kontribusi yang besar terhadap komponen sektor swasta (bisnis) tanpa diimbangkan peran rakyat untu k mengontrolnya .

Komponen rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini memberikan sebagian kekuasaan kepada pemerintah . Dengan demikian kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat tersebut agar dapat dijalankan dengan baik, harus diimbangi dengan pengawasan dilakukan rakyat. Apabila terjadi proses keseimbangan seperti ini, maka segala macam penyimpangan termasuk korupsi dapat dideteksi seawal mungkin sehingga tidak berlarut-larut.

Selain itu, terciptanya keseimbangan dari tiga komponen tersebut sangat tergantung pada upaya untuk selalu berpegang pada ditegakkannya hukum secara konsekuen. Landasan hukum perlu dipegang secara teguh dan adil. Mesin administrasi pemerintah dijalankan diatas aturan dan hukum . Tanpa aturan atau hukum, administrasi pemerintah tidak mampu menunjukkan kinerja yang efektif dan bersih. Jika administrasi publik kita berjalan diluar tatanan aturan formal, maka administrasi pemerintah tidak lagi menjamin terselenggaranya kinerja yang bersih . Dengan hukum dan peraturan administrasi pemerintah melakukan impersonalitas terhadap macam-macam kepentingan orang dan diatur dan dilayani.

Good dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang

solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect, governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (Widodo, 2001).

Kasman Abdullah (2002) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formulayang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamaartikandan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak muarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Bank Dunia memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang

bertanggung jawab pada publiknya. Gerald Meier memberikan pengertian *good governance*, yaitu "prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilan yang bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya". (abdullah, 2002)

UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa "*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a voice in influencing decision-making*". Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan (*transparent*) agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil (*business and civil society organizations*) harus bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi *stakeholders*. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (*fasilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) ketimbang mengontrol (*controlling*), melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan (*the rule of law*) (widodo, 2001).

Tata kelola (*governance*) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak

diimplementasikan). Menurut UNDP dalam Rewansyah (2010), ada tiga model *good governance*, yaitu:

- a. Kepemerintahan Politik (*Political Governance*) yang mengacu pada proses proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan strategis (*policy strategy formulation*);
- b. Kepemerintahan Ekonomi (*Economic Governance*) yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy making proseses*) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. Kepemerintahan ekonomi ini memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
- c. Kepemerintahan Administratif (*Administrative Governance*) yang mengacu kepada sistem implementasi kebijakan.

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan prundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara

program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (Equity)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayananan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangkapanjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Loffler memberikan definisi good governance sebagai suatu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, mengandung kebenaran, adil,demokratis, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan oleh Tjokroaminoto, prinsip utama good governance disebutkan mencakup sembilan indikator yaitu: partisipasi, penerapan aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategi.

Jelas bahwa jumlah komponen atau prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Dalam hal ini menurut peneliti paling tidak ada sejumlah prinsip yang akan diambil sebagai prinsip utama yang melandasi good

governance, antara lain: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

1. Efisiensi

Pada dasarnya pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi warganya. Salah satu cara untuk menyediakan layanan yang baik dapat dilakukan melalui penerapan e-government. Menurut Setiyadi (2005) penerapan e-government tidak hanya terkait dengan otomatisasi layanan, tetapi lebih dari itu terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”. Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”

Peningkatan efisiensi menurut Saidi dan Yared (2001) adalah melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan. Dengan demikian masyarakat menjadi semakin mudah dan murah dalam mendapatkan pelayanan publik.

2. Akuntabilitas

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (e-government) menurut Siallagan (2002) telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Mardiasmo (2001) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Solihin (2009) indikator minimal dari akuntabilitas adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme reward and punishment. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal berupa pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sedangkan menurut Steward dalam Ellwood (1993) dikemukakan bahwa akuntabilitas publik sangat kompleks.

Tahapan akuntabilitas dapat dilihat dari kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

3. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Siagian (2000) dalam pembahasannya mengenai Teori Pengembangan Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Sehingga birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dilulio (1994) dalam Dwiyanto (2002), menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dalam studinya tentang reformasi birokrasi, Dwiyanto (2002), mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu :

keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan

pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

4. Transparansi

Menurut Yulianto (2005), dalam menyusun sistem dan prosedur pelayanan, birokrasi harus menjelaskan secara tegas dan detil tentang tugas, kewajiban dan wewenang petugas. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban para pengguna jasa. Dengan demikian masyarakat akan selalu dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

5. Partisipasi

Teori partisipasi yang sangat terkenal dikemukakan oleh Arnstein (1982) yang mengemukakan mengenai "ladder of participation"/tangga partisipasi. Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci kembali dalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat terendah adalah non partisipasi, derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi dan derajat yang tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Secara rinci delapan anak tanggatersebut adalah: manipulasi, terapi, pemberian informasi,

konsultasi, penentruman, kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga.

6. PERENCANAAN

Y. Dror dalam bukunya yang berjudul *The Planning Process* (dalam Kunarjo, 2002:14) menyebutkan bahwa:

Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapanseperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada masa yang akan datang.

Sedangkan perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut:

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, makaterdapat empat elemen dasar dalam perencanaan, yaitu sebagai berikut (Kunarjo, 2002:14):

- a) Merencanakan berarti memilih;
- b) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya;
- c) Perencanaan merupakan alat dalam mencapai tujuan; dan
- d) Perencanaan untuk dimasa yang akan datang.

Pembangunan sendiri menurut Suryono (2010:4) adalah sebagai berikut:

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan (development) terkandung unsur-unsur: (a) Perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan; (b) Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan (c) Potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan menurut Athur W.Lewis (dalam Sjafrizal, 2016:24) ialah sebagai berikut:

Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Dalam meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

7. Sistem Informasi *e – planning*

a. Sistem Informasi

Banyak pendapat tentang sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli. Sebelum kita mendefinisikan tentang sistem informasi, terlebih dulu harus kita jelaskan apa arti dari informasi dan juga sistem. Menurut Wahyudi

Kumorotomo (dalam Sofyaningrum,2010), Informasi merupakan data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat untuk dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi ini dipergunakan bagi setiap anggota dalam organisasi dalam proses penentuan keputusan sesuai dengan tujuan atau sasaran organisasi yang akan dicapai.

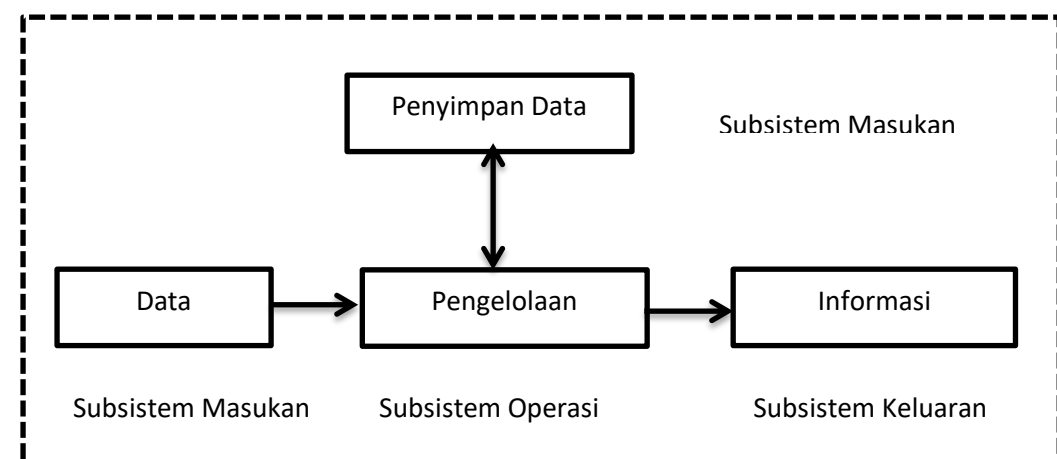
David Kroenke dan Richard Hatch (1994) menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Sedangkan data adalah fakta atau penggambaran yang terekam.

“Information is knowledge derived from data. Data, in turn, is defined as recorded facts or figures. Information is data placed within a context. Information as the amount of uncertainty that is reduced when a message is received.”

David dan Olson (dalam Sofyaningrum,2010) menjelaskan transformasi data menjadi informasi dalam suatu sistem informasi sebagai berikut:

Gambar 2.3

Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi



Sumber : David dan Olson (dalam Sofyaningrum,2010)

Untuk dapat menjadi informasi, data harus diproses atau diolah terlebih dahulu. Subsistem masukan yang berupa data kemudian diolah dalam sub sistem pengolahan untuk dijadikan informasi dalam subsistem keluaran. Dalam subsistem operasi dilakukan juga penyimpanan data dalam sub sistem penyimpanan.

Menurut Davis (1995) sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan saling melengkapi karena satu maksud, tujuan atau sasaran.

Konsep sistem menurut O'Brien (dalam Sofyaningrum, 2010) yang mendasari bidang sistem informasi adalah suatu kombinasi orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi (*network*), dan sumber daya data yang terorganisir yang bertujuan mengumpulkan, mengubah bentuk dan menyebarkan informasi tersebut di suatu organisasi. Jadi, menurut O'Brien dalam sebuah sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk memproses informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi.

Keseluruhan komponen tersebut saling mempengaruhi proses penyampaian informasi. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bagaimana konsep sistem informasi bekerja, maka harus diperhatikan aktivitas dan komponen yang terlibat dalam proses konsep sistem informasi tersebut. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:

- a. Perangkat keras (*hardware*), yang mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer;
- b. Perangkat lunak (*software*) atau program, yang merupakan sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data;
- c. Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki;
- d. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi;
- e. Basis data (*database*) sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data;
- f. Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Sistem Informasi menurut Suwardi (dalam Sofyaningrum,2010) adalah kumpulan prosedur, mesin dan orang yang mendapatkan, mengolah, serta menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Irwin (dalam Sofyaningrum,2010) sistem informasi didefinisikan sebagai komponen-komponen yang telah diatur dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.

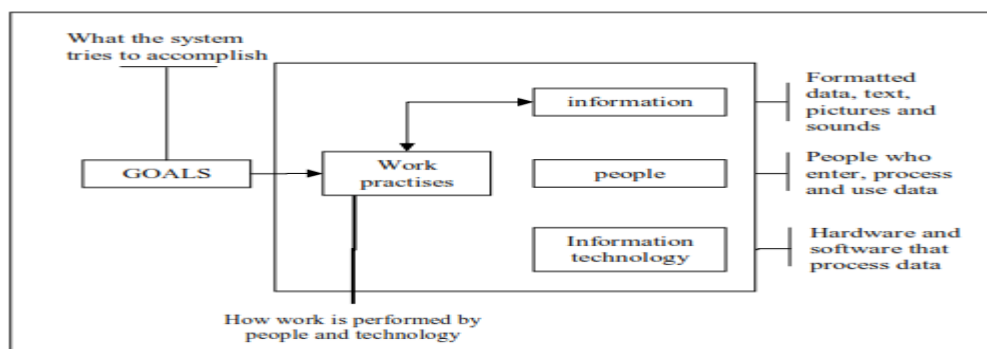
Kroenke (1994) menjelaskan bahwa sistem informasi bermanfaat dalam memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas,

manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu sangat berguna bagi kegiatan bisnis.

Pengertian sistem informasi oleh Alter (dalam Sofyaningrum, 2010) digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4.

Komponen-Komponen Sistem Informasi



Sumber: Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi, 2003

Sistem informasi dijelaskan sebagai sekumpulan informasi, orang dan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari keseluruhan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam mencapai tujuan pengambilan keputusan.

a. e-planning

Aplikasi *e-planning* menurut Silva (2010) adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas

teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi *virtual reality*) dari sistem perencanaan berbasis kertas/manual sebagai sistem perencanaan konvensional. Aplikasi *e-planning* juga sering disinonimkan sebagai *e-government* atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah. Secara garis besar *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian menurut Perpres SPBE, yaitu sebagai berikut (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2018):

- a) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (LAPBE), merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah. Layanan ini meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan; dan
- b) Layanan Publik Berbasis Elektronik (LPBE), merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi serta sektor strategis lainnya.

Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 mendefinisikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut:

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik.

Kementerian Dalam Negeri menyiapkan SIPD yang terdiri dari *e-database*, *e-planning*, *e-money*, dan *e-reporting*. Sedangkan pada Pasal 1 Permendagri Nomor 98 Tahun 2018; mendefinisikan *e-planning* atau Perencanaan Berbasis Elektronik sebagai berikut (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018):

Aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis daring.

8. Impelementasi *e-planning* menurut perspektif *Good Governace*

Terkait dengan implementasi e-government dalam mendukung penerapan *good governance*, banyak negara telah membuktikan keberhasilannya dalam mengimplementasikan *e-government* dalam mendukung *good governance*. Hal ini karena penerapan *e-government* sebagai sarana pelayanan publik telah menghasilkan suatu pelayanan yang transparan, adil (*fair*), efektif dan dapat mengakomodir partisipasi seluruh warga masyarakat.

Penerapan *e-planning* dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah supaya lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga mendukung *good governance*. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung perencanaan daerah agar efisien dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didukung oleh pendapat Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya *good governance*.

Implementasi teknologi informasi dalam kaitannya dengan *good governance* di nyatakan oleh Magno dan Serafica (2001), sebagai berikut:

“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accuratedecision making and public participation, and (3) by enhancing the efficientdelivery of public goods and services.”

IT mendukung *good governance* dalam tiga hal mendasar: (1) menaikkan ketransparanan, informasi, dan tanggung-jawab; (2) memfasilitasi pengambilankeputusan yang akurat dan keikutsertaan publik, dan (3) meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Long (dalam Sofyaningrum,2010) berpendapat bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dapat dipertimbangkan dalam membangun konsep *good governance*. Lebih lanjut dikatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti: hubungan dalam pembuatan dan koordinasi suatu kebijakan, demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan, konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, serta transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan dapat diimplementasikan dengan *e-government*.

Dalam kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan publik serta dalam kaitannya antara *e-government* dan *good governance*, Leitner (dalam Sofyaningrum,2010) memberikan gambaran hubungan keduanya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pengaruh *e- government* Terhadap *good governance*

Prinsip <i>good governace</i>	Pengaruh <i>e-government</i>
Koordinasi dalam penyusunan kebijakan	Memungkinkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik untuk berkoordinasi dengan mudah
Demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan	Memungkinkan stakeholder terlibat dalam pengambilan keputusan
Konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan	Memfasilitasi kerja sama dan pembentukan network sehingga implementasi kebijakn dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah
Transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses kebijakan	Informasi secara luas dapat diakses dengan murah

Sumber : Leitner (dalam Sofyaningrum,2010)

B. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam penelitian ini, sehingga uraian yang dibuat tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan logika. Oleh karena itu, berikut akan diangkat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>EVIANA D SOFYANINGRU M</p>	<p>TESIS : EVALUASI PENERAPAN SePP (SISTEM e-PENGADAAN PEMERINTAH) MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif <i>good governance</i> sudah sangat baik, namun untuk perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan menilai penerapan SePP menurut perspektif <i>good governance</i> adalah baik.</p>
<p>Perbedaan : Pada penelitian ini menjadikan Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai lokus penelitian dan objek penelitiannya adalah sistem pengadaan elektronik</p>		

Sumber : Hasil Kajian Peneliti,2020

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
SYAYUTI	IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERITAH KABUPATEN BUNGO	Pelaksanaan Konsep Good Governace dalam pengadaan barang dan jasa pada program pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik, prinsip partisipasi, rule of law, kesamaan hak dan pemerataan , konsensus, efisien dan efektivitas serta akuntabilitas telah terwujud dan telah terlaksana. Pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Bungo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden

		Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, untuk realisasi pada tingkat Kabupaten Bungo diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Perbedaan : Pada Penelitian ini menjadikan Kabupaten Bungo sebagai lokus penelitian dan objek penelitian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa		

Sumber : Hasil Kajian Peneliti, 2020

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
LIA HERIAWATI	PENGARUH PENERAPAN ELECTRONIC PROCUREMENT DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGADAAN	Penerapan <i>E-Procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengadaan

	<p>BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG</p>	<p>Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 34,61 %. Dengan kata lain, semakin baik Penerapan <i>E-Procurement</i> yang ada, maka Kinerja Pengadaan Barang/Jasa akan semakin meningkat.</p>
<p>Perbedaan :Pada Penelitian ini menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai Lokus pennisitian dan Sistem Pengadaan barang dan Jasa sebagai Objek Penelitian</p>		

Sumber : Hasil Kajian Peneliti,2020

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis

1. Kerangka Pikir

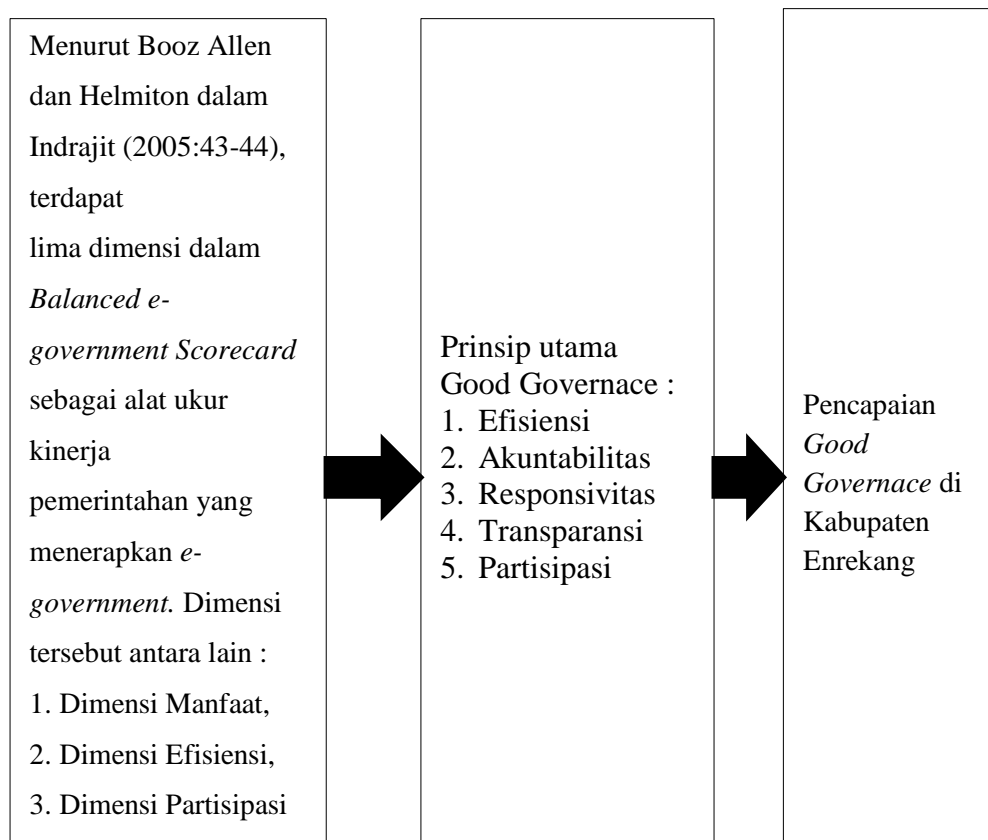
Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Maka, berdasarkan judul penelitian Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang Dalam Mencapai *Good Governace*. Merupakan wujud *e – government* menggunakan lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan e-government antara lain : *Dimensi Manfaat*, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. *Dimensi Efisiensi*, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. *Dimensi Partisipasi*, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. *Dimensi Transparansi*, apakah pemerintah dalam hal ini, mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. *Dimensi Manajemen Perubahan*, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik.

Jika lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* tersebut dapat dijalankan oleh BAPPEDA Kab Enrekang seperti penerapan perencanaan berbasis elektronik, maka pencapaian *Good Governace* di Kabupaten Enrekang dapat dikatakan terwujud karena dari masing-masing dimensi yang ada dalam indikator

dapat menjawab permasalahan yang peneliti temukan di lapangan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikirannya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pikir



Sumber : Hasil Kajian Peneliti,2020

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasar pendapat Magno dan Serafica yang menyatakan bahwa:

“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accuratedecision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.”

Serta berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa *penerapan e-government* dalam implementasi perencanaan berbasis eletronik atau *e-*

planning terhadap *good governace* memiliki pengaruh signifikan terhadap terwujudnya *good governace*, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “ Implemetasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang mendukung terwujudnya *Good Governace*”

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah merupakan mandat, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Dalam penelitian ini dimensi *good governance* yang akan dipergunakan oleh peneliti antara lain mengacu pada pendapat dari Loffler dan Tjokroaminoto yang telah disebutkan dalam kerangka teori diatas, yaitu efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

a. Efisiensi

Indikator efisiensi yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Saidi dan Yared (2001) yaitu efisiensi diukur melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta peningkatan proses pelayanan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan stándar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan

atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, system pengawasan dan mekanisme *reward and punishment* .

c. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini diukur berdasar indikator yang mengacu pada pendapat Siagian (2000) yang mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, dan pendapat dari Dwiyanto (2002) yang mengembangkan beberapa indicator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

d. Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada pendapat Yulianto (2005), yaitu sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, ketersediaan informasi, keterbukaan keputusan dan kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan

aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa.

e. Partisipasi

Partisipasi diukur menurut indikator sebagai berikut: Manipulasi, Terapi, pemberian informasi, konsultasi, Penentraman, Kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga .

Jika digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
Operasional Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan biaya operasional • Pemberian layanan tepat waktu • Peningkatan proses layanan
	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian antara program dan kebijakan • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan / kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan • Dokumentasi proses kegiatan • Adanya mekanisme pertanggung jawaban
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi aspirasi baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru • Kemampuan / sikap aparat dalam menghadapi keluhan pengguna jasa • Kecepatan menangani keluhan • Penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik

		<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan
	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan sistem dan prosedur layanan • Ketersediaan informasi • Keterbukaan keputusan • Kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan telah sesuai dengan ketentuan • Kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa
	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulasi • Terapi • Pemberian informasi • Konsultasi • Penentraman • Kemitraan • Kuasa yang di delegasi • Kendali warga

Sumber: diolah berdasar pendapat Loffler dan Tjokroaminoto

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pengolahan dan pengoperasian dari perencanaan secara elektronik atau aplikasi *e – planning* dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang guna mewujudkan penerapan *good governace*. Adapun waktu penelitian yang dilakukan selama 6 Bulan dimulai bulan juli sampai desember tahun 2020.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini juga lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia. Pertimbangan penulis memilih pendekatan kualitatif oleh karena obyek penelitian ini menyangkut penerapan aplikasi sistem Informasi perencanaan pembangunan yang dirasakan sangat kompleks sehingga sulit diperoleh data jika menggunakan instrumen penelitian kuantitatif. Selain itu, penulis bermaksud mendalami penerapan sistem informasi di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Meleong, (2014:6) bahwa penelitian kualitatif bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Jenis dan Sumber Data

Arikunto, (2013:25) menyatakan bahwa Sumber data dapat berupa manusia, benda, situasi, kejadian atau peristiwa, penampilan dan perilaku, dan berbagai bentuk tulisan, gambar, grafik serta bentuk-bentuk grafis lainnya. Agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya serta data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya (Harbani Pasolong, 2013:70). Data yang diperoleh adalah jenis *server* aplikasi *e-planning*, daftar OPD dan Kecamatan Yang bisa mengakses *e-planning*, Standar Operasional Prosedur Penerapan *e-planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Enrekang serta data lainnya. Sumber informan pada penelitian ini adalah Aparatur pelaksana kebijakan penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Harbani Pasolong, 2013:70). Data yang diperoleh adalah informasi serta keterangan yang diperoleh dari kantor Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang seperti surat-surat pribadi, notulen rapat, dokumen-dokumen resmi serta informasi dari internet dan data pendukung lainnya yang berkenaan dengan Penerapan sistem *e-planning* dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data pada penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 308) jika peneliti tidak mengetahui dari pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditentukan. Dengan yang sudah diatur, maka peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017: 203) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang untuk menghimpun kesatuan, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. Di antaranya berupa proses-proses pengamatan dan ingatan. Adapun observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mencatat proses penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Bappelitbangda.

2. Wawancara

Moleong (2014:186) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan informasi tambahan.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak pelaksana kebijakan penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dan pihak-pihak lain yang terlibat. Pihak pelaksana kebijakan sebagai *key informan* adalah Kabid Litbang Monev Perencanaan Makro, Kasubid Perencanaan Makro, Kasubid Monev dan Pelaporan, Kepala Bidang Anggaran, Kasubid Penyusunan APBD dan` Pihak lain yang terlibat sebagai *secondary informan* adalah para kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat pengguna aplikasi *e-planning* di Kabupaten Enrekang

Pihak yang diwawancarai (*interview*) oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

Kode	Nama Informan	Jabatan / Pekerjaan	Keterangan
1	Sumardin,SE,M.AP	Kabid Litbang Monev & Perencanaan Makro	<i>Key Informan</i>
2	Sri Wahyuni,S.Kom	Kasubid Perencanaan Makro	<i>Key Informan</i>
3	Marwah M,S.Si	Kasubid Monev dan Pelaporan	<i>Key Informan</i>
4	Permadi Hasan,SE.,M.AP	Kabid Anggaran	<i>Key Informan</i>
5	Kasfun Nur,SE	Kasubid Penyusunan APBD	<i>Key Informan</i>
6	Nasir	Operator <i>e-planning</i>	<i>Key Informan</i>
7	Masyarakat	Pengguna <i>e-planning</i>	<i>Secondary Informan</i>

3. Dokumentasi

Sugiyono, (2017:329) mengemukakan Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini dokumentasi yang akan diteliti yaitu dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Enrekang diantaranya RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA Perangkat daerah.

E. Analisis Data

Sugiyono (2017: 335) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara bagian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian terkecil, melakukan sintesa, ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang dapat dipelajari, dan membuat simpulan sehingga bisa mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Pada penelitian penelitian ini penulis menggunakan analisis data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dengan proses coding dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi. Nvivo adalah paket perangkat lunak analisis data kualitatif (QDA) yang diproduksi oleh QSR International. Ini telah dirancang untuk para peneliti kualitatif yang bekerja dengan informasi berbasis teks dan / atau multimedia yang sangat kaya, di mana diperlukan tingkat analisis mendalam pada volume data yang kecil atau besar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian ± 3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar $1.784,93 \text{ Km}^2$ atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah $\pm 2.83 \%$ dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 km di sebelah Utara Kota Makassar atau terletak antara $3^{\circ}14'36'' - 3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ}40'53'' - 120^{\circ}6'330''$ Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 47meter sampai 3.329 Meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten TanaToraja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang pada awal tahun 1995 hanya dimana Kabupaten Enrekang hanya memiliki 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan, namun dalam perkembangan selanjutnya Kabupaten Enrekang pada saat ini telah memiliki 12 Kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan. Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Enrekang, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa / Kelurahan Kabupaten Enrekang

Kecamatan	Desa	Dusun	Kelurahan	Lingkungan
Maiwa	21	73	1	3
Bungin	6	23		
Enrekang	12	44	6	28
Cendana	7	31		
Baraka	12	54	3	11
Buntu Batu	8	31		
Anggeraja	12	40	3	11
Malua	7	21	1	6
Alla	5	20	3	14
Curio	11	57		
Masalle	6	32		
Baroko	5	22		
Kabupaten Enrekang	112	448	17	73

Sumber : Enrekang Dalam Angka 2020

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Jumlah KK Total
	Laki – Laki	Perempuan		
Maiwa	14.197	13.952	28.149	8.779
Bungin	2.902	2.673	5.575	1.552
Enrekang	18.910	18.525	37.435	11.419
Cendana	5.068	5.108	10.176	3.249
Baraka	8.018	7.543	15.561	4.434
Buntu Batu	12.126	11.694	23.820	6.962
Anggeraja	14.450	14.181	28.631	8.400
Malua	4.603	4.591	9.194	2.687
Alla	12.663	11.904	24.567	7.156
Curio	9.242	8.673	17.915	4.785
Masalle	7.623	7.232	14.855	4.242
Baroko	6.198	5.749	11.947	3.510
Kabupaten Enrekang	116.000	111.825	227.825	67.175

Sumber : Enrekang Dalam Angka 2020

Adapun nama-nama perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang dan jumlah anggaran yang dikelola dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Nama Perangkat Daerah

NO	UNIT KERJA (SKPD)	ANGGARAN (RP)	JUMLAH KEGIATAN	BOBOT
1	Dinas Kesehatan	80,019,376,995	124	31,2
2	RSUD Massenrempulu	39,145,538,450	49	15,26
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	5,999,991,273	65	2,34
4	Dinas Perhubungan	1,419,095,406	28	0,55
5	Dinas Lingkungan Hidup	178,500,000	10	0,07
6	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,457,647,195	34	0,57
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,252,693,116	39	0,49
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,934,502,610	35	0,75
9	Dinas Sosial	2,176,221,915	55	0,85
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,095,336,480	40	1,21
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,350,573,000	33	0,53
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	39,349,191,200	39	15,34
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,024,301,883	27	0,4
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,249,792,679	13	0,49
15	Satuan Polisi Pamong Praja	3,593,016,909	31	1,4
16	Sekretariat DPRD	19,470,702,150	40	7,59
17	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5,463,297,899	69	2,13
18	Badan Pendapatan Daerah	3,841,563,908	39	1,5
19	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	4,753,290,985	40	1,85
20	Kecamatan Enrekang	3,767,980,000	35	1,47
21	Kecamatan Anggeraja	2,110,779,000	36	0,82
22	Kecamatan Baraka	2,081,596,313	36	0,81

23	Kecamatan Maiwa	1,292,911,000	32	0,5
24	Kecamatan Cendana	631,000,000	29	0,25
25	Kecamatan Buntu Batu	663,000,000	30	0,26
26	Kecamatan Baroko	653,000,000	28	0,25
27	Dinas Ketahanan Pangan	1,311,154,400	35	0,51
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,677,428,375	47	1,43
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,123,985,838	41	0,83
30	Dinas Pertanian	14,871,286,660	29	5,8
31	Dinas Peternakan dan Perikanan	3,978,491,131	51	1,55
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,515,976,944	47	0,98
	JUMLAH :	256,453,223,714	1284	99,98

Sumber : Aplikasi Emonev 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintahan Kabupaten Enrekang. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang (20 tahun), jangka pendek (5 tahun) maupun perencanaan tahunan daerah. Dalam melaksanakan tugas yang diemban Bappeda Kabupaten Enrekang masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani proses tersebut, agar lebih efektif, efisien dan berkualitas sesuai proses dan mekanisme yang telah diatur.

Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Dalam kaitan ini, BAPPEDALITBANG menerima tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang

perencanaan pembangunan daerah. Bappeda memiliki fungsi untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, juga melakukan fungsi lain yang berkenaan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematis dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut, menuntut seluruh aparatur pemerintah daerah termasuk BAPPEDA-LITBANG untuk lebih kreatif dalam memecahkan permasalahan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Dalam kaitan ini perlu juga memperhatikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Prinsip *good governance* ini tampaknya telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang dimasa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* yang secara nyata dapat

dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data-data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton yang terdapat lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard* sebagai Kinerja Pemerintahan yang Menerapkan *E-Government. Balanced E-Government Scorecard*, terdapat lima jenis dimensi yaitu:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah:
 - a. Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan;
 - b. Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam *one stop shop* dari satu portal menuju berbagai layanan;
 - c. Kemudahan pengguna dalam mendapatkan layanan tersebut.
2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, diantaranya:
 - a. Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan basis data yang bisa berjalan dengan baik ketika dibutuhkan;
 - b. Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik;

- c. Pemanfaatan platform teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek.
 - d. Kualitas dan ruang lingkup bagi para staf dan pegawai.
3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya:
- a. Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web;
 - b. Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat;
 - c. Pengaruh dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan;. Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas chattig, forum, dan, milis).
4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya:
- a. Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain);
 - b. Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak;

c. *Topicality of information.*

5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya:

- a. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain;
- b. Kualitas kontrol dan review;
- c. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

Dari 5 (lima) jenis Dimensi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai Kinerja Pemerintahan yang Menerapkan *E-Government*. Peneliti 5 (lima) jenis dimensi tersebut, yaitu Dimensi Manfaat, Dimensi Efisiensi Dimensi Partisipasi, Dimensi Transparansi, dan Dimensi Manajemen Perubahan. 5 (lima) jenis dimensi ini dipilih karena peneliti menganggap bahwa kelima jenis dimensi ini cocok digunakan sebagai indikator kinerja pelayanan publik berbasis *e-government* di Kabupaten Enrekang.

2.1 Dimensi Manfaat pada Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang

Dimensi Manfaat berhubungan dengan bagaimana kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Pada penelitian mengenai Kinerja Pelayanan Publik *Berbasis e-government* di Kabupaten Enrekang, peneliti menemukan beberapa temuan yang

bisa menjadi bahan untuk di teliti pada indikator dimensi manfaat *Balanced E-Government Scorecard* antara lain :

1. Dimensi Manfaat pada Aplikasi *e – planning*

Perencanaan pembangunan memiliki faktor keberhasilan apabila perencanaan yang dibuat benar-benar terarah dan tersusun dengan baik yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Sama dengan sebuah sistem, sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan akan memiliki manfaat bagi penciptanya maupun penggunaanya untuk bekal kemanfaatan kedepannya. Dalam hal ini aplikasi *e-planning* ini memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aplikasi *e-planning* yang dibuat dan digunakan secara online agar mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah melalui *website* <http://eplanning.enrekangkab.go.id> sejak januari 2018 memiliki tujuan dan manfaat khususnya untuk Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang proses dan tahapan perencanaan daerah. Dengan harapan adanya aplikasi *e-planning* dapat mempermudah pekerjaan para pegawai dengan cara menjaga konsistensi agar apa yang sudah direncanakan atau yang sudah diusulkan bisa tetap konsistensi dan tidak berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Aplikasi *e-planning* yang dibuat dan digunakan secara online agar mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah melalui *website* <http://eplanning.enrekangkab.go.id> sejak januari 2018”

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Tujuan penerapan *e-planning* berdampak pada suatu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara beraturan dan berjenjang, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat memenuhi semua aspek yang ada di dalam peraturan perundang-undangan terutama pada aspek ketepatan waktu dan juga substansi sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis *e-planning* atau sistem online bisa dilakukan dengan efektif, efisien, responsif, transparan, dan partisipatif.

Dengan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* atau sistem online rencana yang disusun atau dihasilkan akan lebih berkualitas dilihat dari aspek tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan memunculkan suatu program-program yang baru dimana program tersebut kedepannya bisa menjadi suatu program yang unggulan serta Penggunaan aplikasi *e-planning* sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musreimbang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis web sehingga proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musreimbang dilaksanakan sehingga proses penginputan dapat

berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator aplikasi *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang.

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam rencana (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang. sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.

“Penggunaan aplikasi *e-planning* sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musrenbang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis *web* sehingga proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musrenbang dilaksanakan sehingga proses penginputan dapat berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya”

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis *e-planning* ini juga bisa memudahkan integrasi antara perencanaan dengan *e-budgeting*, *database* yang dihasilkan dalam perencanaan dan penganggaran menjadi satu sehingga memudahkan dalam pengendalian pelaporan. Penyelenggaran perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* bisa lebih terarah dan konsistensinya bisa terjamin kedepannya dengan diterbitkan penyelenggaran pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik maupun sistem online sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan hasil musrenbang sebagai pedoman. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni, S.Kom selaku Kasubid Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang.

“sistem *e-planning* Kabupaten Enrekang sangat mudah diakses menggunakan komputer tanpa perlu melakukan proses instalasi aplikasi karena berbasis *web*”

“Penggunaan *e-planning* sangat memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan karena dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* memudahkan dalam penyelenggaraan perencanaan sehingga semua program kerja perangkat daerah dapat terarah dan konsiten serta memudahkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi”

Manfaat dari implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* :

1. Membantu pihak badan perencanaan pembangunan daerah dan OPD dalam merumuskan suatu rencana kerja sesuai dengan usulan-usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang, pada usulan-usulan masyarakat dan juga usulan-usulan oleh anggota DPRD.

2. Membantu pihak badan perencanaan pembangunan daerah dan OPD dalam menyusun suatu indikator kinerja yang terukur, sistematis, efisien, dan efektif.
3. Membantu pihak badan perencanaan pembangunan daerah dan OPD dalam menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah baik menengah maupun tahunan sesuai dengan arahan dan indikator target kinerja yang telah disusun.
4. Membantu pihak badan perencanaan pembangunan daerah dan OPD dalam mempublikasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tingkat daerah, provinsi, maupun tingkat pusat sebagai bentuk akuntabilitas.

Didalam implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* dimana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah mempunyai sebuah prioritas yaitu adanya matriks prioritas perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka penganggaran, terdapat adanya matriks prioritas perencanaan pembangunan berdasarkan kebijakan umum dan adanya program-program pembangunan, selanjutnya adanya matriks prioritas perencanaan pembangunan dengan adanya sasaran, indikator sasaran dan juga kerangka penganggaran dana, selain adanya matriks perencanaan pembangunan sistem *e-planning* ini kedepannya juga bisa menghasilkan rekapitulasi suatu program dan kegiatan berdasarkan setiap organisasi perangkat daerah maupun kecamatan atau desa. Hal tersebut sesuai dengan dinyatakan oleh ibu Marwah M,S.Si selaku Kasubid Monev dan Pelaporan.

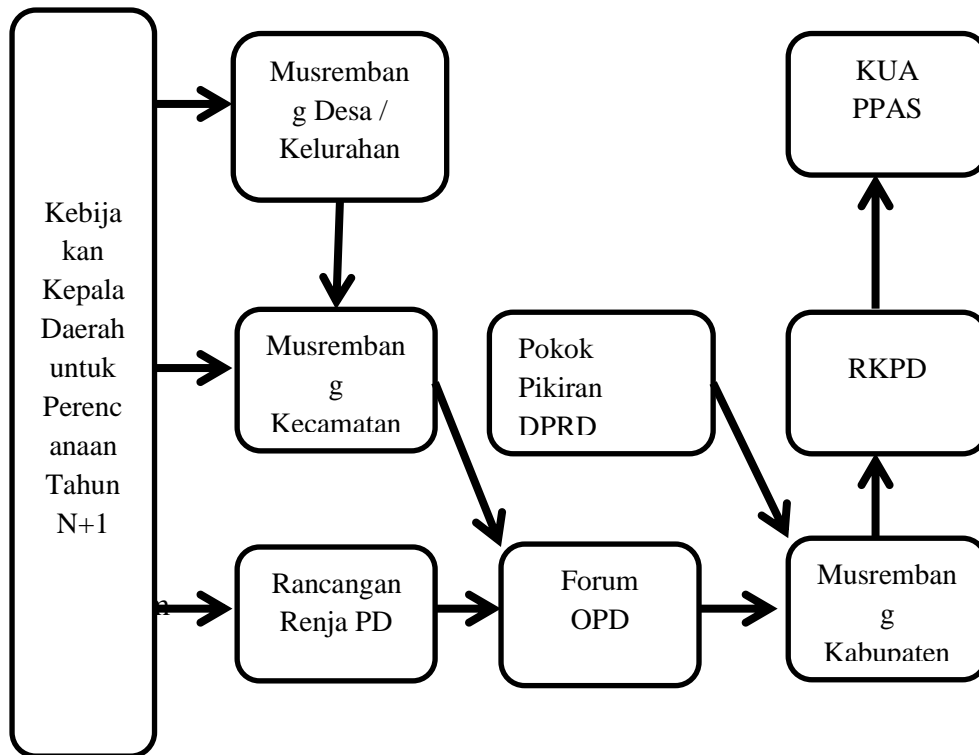
“*e-planning* membantu Bappeda Kabupaten Enrekang untuk menganalisis tentang keselarasan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara menu yang termuat dalam *e-planning* dengan muatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Bappeda juga menganalisis pengaruh sumber daya manusia nya karena bisa memberikan komitmen pejabat pemerintah Kabupaten Enrekang dengan sarana prasarana dan sistem informasi terhadap kesiapan penerapan *e-planning*”

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa dalam suatu tujuan implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-planning*) akan dikendalikan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menerapkan suatu tujuan yang sudah ditetapkan atau dibentuk oleh bappeda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya aplikasi *e-planning* di Kabupaten Enrekang menciptakan kemudahan dimana Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang sebagai penyedia aplikasi *e-planning* untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang serta melakukan koordinasi dengan OPD di Seluruh Kabupaten Enrekang. Dalam perumusan perencanaan daerah tentunya terdapat alur kinerja sebagai sebuah proses berjalannya perumusan perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

Alur Kinerja *e – planning* dalam Perumusan Perencanaan di Kabupaten Enrekang



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar tersebut dijelaskan kebijakan kepala daerah untuk tahun perencanaan mendatang telah ditentukan pada tahun sebelumnya selain menjadi perumusan strategi arah kebijakan daerah. Hal tersebut sesuai denganapayang diungkapkan oleh BapakSumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan MakroPerencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“proses perencanaan dilakukan dimulai dari diajukan usulan yang meliputi usulan politik yang berasal dari visi-misi bupati serta sasaran dan tujuan pembangunan berdasarkan hal tersebut maka disusunlah rencana kerja perangkat daerah serta menghimpun usulan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari musrembang desa/kelurahan yang nantinya di himpun di musrembang kecamatan dan setelah proses ini selesai dilaksanakan forum

OPD untuk menyaring dan memilah usulan berdasarkan tugas organisasi perangkat daerah dan setelah itu dilaksanakan musrembang kabupaten bertujuan untuk menyaring dan memilah usulan yang berasal dari hasil reses anggota DPRD yang merupakan pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun berikutnya dan berdasarkan rencana kerja tersebut maka dibuatlah KUA-PPAS untuk setiap Perangkat Daerahberkat menggunakan *e-planning* semua hal tersebut mudah dilaksanakan”

Tahapan perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Enrekang menggunakan *e-planning*. sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala Daerah pada sisten *e-planning*

a. Input Visi

Gambar 4.2 Form Input Visi RPJPD

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

b. Input Misi

Gambar 4.3 Form Input Misi RPJMD

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

c. Input Tujuan

Gambar 4.4 Form Input Tujuan RPJMD

DATA TUJUAN RPJMD

Misi RPJMD: Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Infrastruktur Pelayanan Umum

Nama Tujuan

TAMBAH KELUAR

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

d. Input Sasaran

Gambar 4.5 Form Input Sasaran RPJMD

DATA SASARAN rpjmd

Tujuan: Untuk Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Infrastruktur Pelayanan Umum yang Baik dan Akurat

Nama Sasaran

TAMBAH KELUAR

No	Tujuan	Sasaran
1	Untuk Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Infrastruktur Pelayanan Umum yang Baik dan Akurat	Meningkatnya ketahanan infrastruktur Pertanian

Jumlah Data : 1

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

e. Input Strategi

Gambar 4.6 Form Input Strategi

Data Strategi RPJMD

Nama Strategi

Periode: 2019 - 2022

TAMBAH KELUAR

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

f. Input Arah Kebijakan

Gambar 4.7 Form Input Arah Kebijakan

NO	Tahun	NAMA KEBIJAKAN	AKSI
1	2019	Optimalisasi Fungsi Infrastruktur Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian	[Edit] [Hapus]
2	2019	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Wilayah / Kawasan (Jalan, Jembatan, Air Bersih, dan Sanitasi)	[Edit] [Hapus]

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

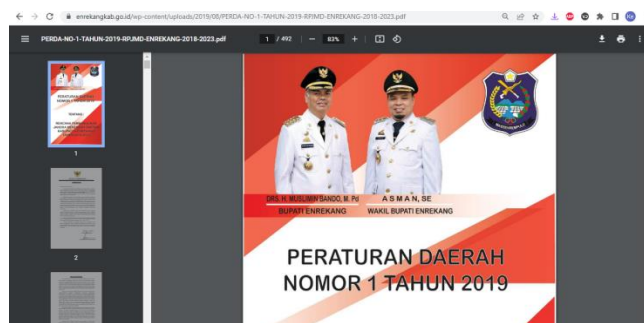
2.Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. Input Program

Gambar 4.8 Form Input Program RPJMD

b. Laporan

Gambar 4.9 Laporan RPJMD



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

3. Musrembang Kecamatan

a. Input Usulan Musrembang

Gambar 4.10 Form Input Usulan Musrembang

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

4. Input Forum Organisasi Perangkat Daerah

Form 4.11 Form Input Forum SKPD

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

5. Input Pokok Pikiran DPRD

a. Input Pokok Pikiran Dewan

Gambar 4.12 Form Input Pokok Pikiran Dewan

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

6. Musrembang Kabupaten

a. Input Musrembang Kabupaten

Gambar 4.13 Form Input Musrembang Kabupaten

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

b. Input Sumber Dana

Gambar 4.14 Form Input Sumber Dana

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

7. RKPD

a. Input RKPD

Gambar 4.15 Form Input RKPD

The screenshot shows a web application interface for inputting RKPD data. The main heading is 'APBD'. The form contains the following fields and values:

- Tahun: 2014
- Nomer Usulan: 0 000000
- Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan dan Budaya
- Program: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Renstra: 1.01.01.00.00.00.20.18 - Bimbingan Belajar dan Try Out
- Detail Kegiatan: Meningkatkan Kualitas lulusan SM
- Volume: 85 %
- Waktu: 12 bin

At the bottom right, there are two buttons: 'SIMPAN' and 'BATAL'.

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

8. KUA PPAS

a. Input PPAS-RKA

Form 4.16 Form Input PPAS-RKA

The screenshot shows a web application interface for inputting PPAS-RKA data. The main heading is 'PPAS-RKA'. The form contains the following fields and values:

- Tahun: 2015
- Nomer Usulan: 79
- Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan
- Program: Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Renstra: 1.01.05.02 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Detail Kegiatan: Kegiatan Ketiaal
- Volume: 3 Paket
- Waktu: 3 bin

At the bottom right, there are two buttons: 'SIMPAN' and 'BATAL'.

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *e-planning* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-planning* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi *e-planning*. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nasir selaku Operator *e-planning* Kabupaten Enrekang.

“penggunaan aplikasi *e-planning* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-planning* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi *e-planning*”

2. Dimensi Manfaat pada Aplikasi *e – budgeting* di Kabupaten Enrekang

Aplikasi *e-budgeting* yang dibuat dan digunakan secara online melalui *website e-budgeting.enrekangkab.go.id* sejak januari 2018. Cakupan layanan aplikasi *e-budgeting* adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang merupakan aplikasi berbasis eletronik untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan Perubahan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten. Tujuan *e-budgeting* Memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD, revisi dan Perubahan Anggaran Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal tersebut sesuai apa yang diungkapkan oleh Permadi Hasan,SE.,M.AP selaku Sekretaris Badan Pengelolah Keuangan Daerah dan Asset Kab.Enrekang.

“*e-budgeting* Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak.

Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya *e-budgeting* antara lain: (1) Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran; (2) Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran; (3) Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan; (4) Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”

Aplikasi *e-budgeting* kini pun mulai membuktikan sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional. Beberapa keunggulan tersebut menjadi tujuan diterapkannya sistem penganggaran secara elektronik. Beberapa keunggulan tersebut seperti:

1. Mencegah tindakan korupsi

Praktik korupsi di sejumlah daerah terkadang bisa disamakan dengan proses manipulasi data keuangan. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional menyebabkan seringnya terjadi penggelapan atau penggelembungan dana yang tiba-tiba terjadi dalam sebuah data keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem *e-budgeting*, upaya-upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah diinput sudah tak bisa dirubah lagi.

2. Prinsip Transparansi Publik

Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan praktik dari demokratisasi keuangan di sebuah pemerintah daerah. Warga bisa langsung melayangkan keluhan jika mencurigai

data yang tidak semestinya. Mereka juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi publik merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah untuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan APBD. Prinsip keterbukaan data informasi keuangan kepada masyarakat juga sudah diatur dalam aturan perundangan yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006. Peraturan inilah yang menjadi pedoman penerapan sistem *e-budgeting* untuk setiap instansi pemerintahan daerah di Indonesia.

3. Efisiensi Pendataan Keuangan

Sistem pendataan keuangan pun bisa berlangsung secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan sistem dan jaringan terpadu, maka pemerintah daerah bisa langsung mengendalikan dan mengevaluasi secara langsung. Di saat bersamaan, warga juga bisa berperan aktif dalam mengawal data yang telah tersimpan secara online tersebut.

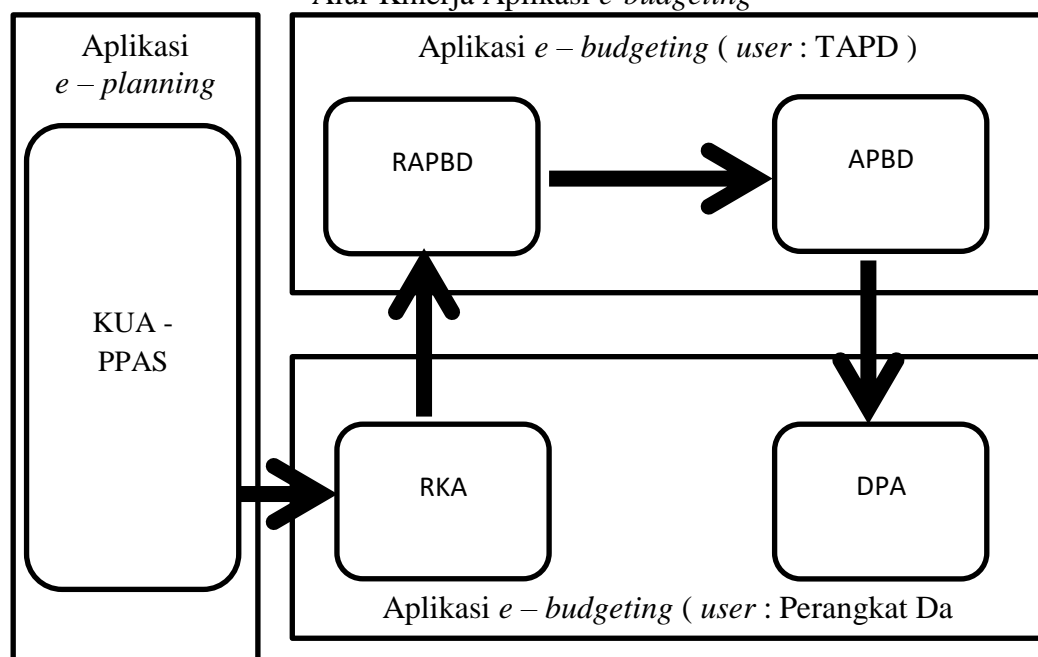
Manfaat penerapan *e-budgeting* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengendalian dan penyusunan anggaran sehingga mudah dilakukan, pengawasan dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan dan transparansi anggaran dapat ditingkatkan. Hal tersebut sesuai apa yang diungkapkan oleh Kasfun Nur selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang

“Manfaat *e-budgeting* adalah:(1)Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Pengendalian penyusunan anggaran sehingga mudah dilakukan;(2)Pengawasan dapat dilakukan sejak tahap perencanaan;(3)Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan;(4)Transparansi anggaran dapat ditingkatkan.”

Meski sering dipuji sebagai sebuah terobosan kebijakan keuangan yang berpihak pada masyarakat,tetap saja ada sebuah kelemahan yang sangat mengkhawatirkan. Kelemahan itu terkait pada rentannya sistem pemerintah yang sering mengalami kerusakan atau terkena pengaruh virus online yang bisa merusak data. Tapi kemungkinan-kemungkinan tersebut pastinya sudah diantisipasi melalui sistem keamanan yang diterapkan dalam *e-budgeting*. Sejah ini, lebih banyak keunggulan yang menonjol dari sistem *e-budgeting*, namun harus tetap mengedepankan optimalisasi dari segi teknis dan kemampuan pengelolaan yang tepat dari SDM yang bertanggungjawab.

Gambar 4.17

Alur Kinerja Aplikasi *e-budgeting*



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar tersebut tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi *e-budgeting* sebagai berikut :

1. Penyusunan RKA – PD

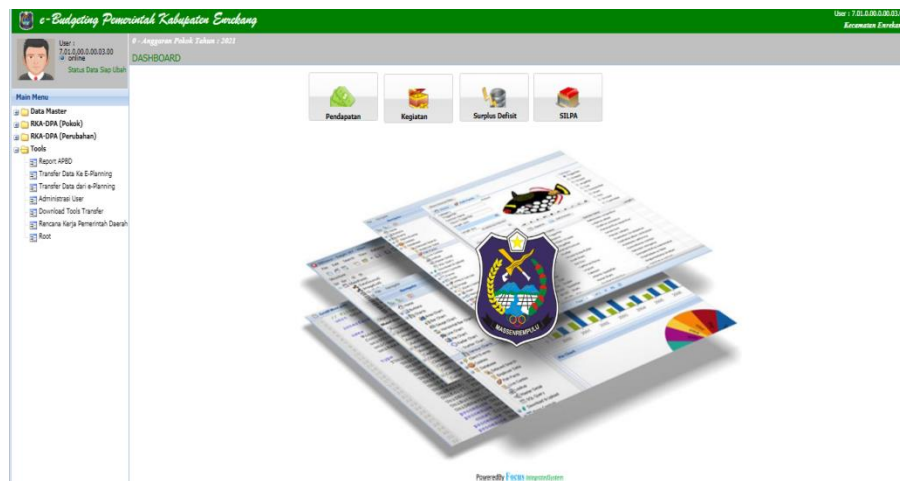
Gambar 4.18
Form Penyusunan RKA – PD

Kode	Uraian	Rpjt. Pokok	Rpjt. Anggaran	Status
7.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.872.000,00	21.872.000,00	✓
7.01.02.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKD	499.800,00	499.800,00	✓
7.01.02.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKD	499.800,00	499.800,00	✓
7.01.02.01.04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKD	499.800,00	499.800,00	✓
7.01.02.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	500.000,00	✓
7.01.02.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	3.968.776.086,00	3.968.776.086,00	✓
7.01.02.02.02	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	✓
7.01.02.02.03	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	✓
7.01.02.02.04	Pengalokasian Rekening Dinas Bersama Untuk Kelengkapan	9.962.000,00	9.962.000,00	✓
7.01.02.02.05	Pembelian dan Realisasi Pengeluaran Belanja Tahunan dan Anggaran	5.900.000,00	5.900.000,00	✓
7.01.02.02.06	Sosialisasi Rencana Perundang-undangan	9.400.000,00	9.400.000,00	✓
7.01.02.02.07	Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.400.000,00	10.400.000,00	✓
7.01.02.02.08	Penyusunan Komponen Anggaran/Perencanaan Anggaran Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	✓
7.01.02.02.09	Penyusunan Rencana dan Pengalokasian Kantor	5.198.000,00	5.198.000,00	✓
7.01.02.02.10	Penyusunan Rencana Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	✓
7.01.02.02.11	Penyusunan Bahan Logistik Kantor	47.862.000,00	47.862.000,00	✓
7.01.02.02.12	Penyusunan Barang/Catatan dan Pengalokasian	5.000.000,00	5.000.000,00	✓
7.01.02.02.13	Pelatihan Karyawan Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	✓
7.01.02.02.14	Pengembangan Riset Kesehatan dan Kesehatan SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	✓
7.01.02.02.15	Pengalokasian Hibah	15.190.000,00	15.190.000,00	✓
7.01.02.02.16	Pengalokasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.648.000,00	20.648.000,00	✓
7.01.02.02.17	Penyusunan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.998.000,00	48.998.000,00	✓
7.01.02.02.18	Penyusunan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.800.000,00	496.800.000,00	✓
7.01.02.02.19	Penyusunan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Repak Kendaraan Persewaan Otas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.800.000,00	20.800.000,00	✓
7.01.02.02.20	Pemeliharaan/Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	✓
7.01.02.02.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.940.000,00	22.940.000,00	✓
7.01.02.02.22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	✓
7.01.02.02.23	Kontribusi/Biaya Pemeliharaan dan Reklamasi Kegiatan Pemeliharaan dengan Penugasan Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	✓
7.01.02.02.24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	✓

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

2. Penyusunan APBD

Gambar 4.19
Form Penyusunan APBD



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

3. Penyusunan DPA - PD

Gambar 4.20
Form Penyusunan DPA –PD

Kode	Uraian	Nilai
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27571250
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	288275598
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82782000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202642590
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Utusan Pemerintahan Daerah	428265000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perungjung Utusan Pemerintahan Daerah	548038802
7.01.01.2.09	Remedian Barang Milik Daerah Perungjung Utusan Pemerintahan Daerah	839600000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90000000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Utusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60000000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Utusan Pemerintahan yang Disampaikan kepada Camat	60000000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	240000000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1677000000
7.01.04.2.01	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterampilan Umum	50000000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Utusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	200000000
7.01.06.2.01	Penilaian, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240000000

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *e-budgeting* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-budgeting* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kasfun Nur selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang.

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-budgeting* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* sangat mudah digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran karena semua program kegiatan telah terinput jadi tinggal dipilih dan tinggal menginput besaran volume dan

anggarannya sehingga proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan cepat dan murah jika dibandingkan proses manual yang membutuhkan banyak biaya dan waktu”

3. Dimensi Manfaat pada Aplikasi *e – monev* di Kabupaten Enrekang

Penerapan aplikasi *e-monev* Bappeda berfungsi untuk memantau serapan anggaran Pemda secara konsisten, efektif dan akurat. *e-monev* Bappeda mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD, DAK, DEKON,TP dan Urusan Bersama. Selain itu *e-monev* Bappeda juga memiliki fitur guna mengelola laporan-laporan Bappeda dalam rangka monitoring dan evaluasi yang disimpan dan dapat dicetak menjadi laporan rekam jejak Bappeda. Aplikasi *e-monev* Bappeda efektif karena dirancang dengan baik menggunakan teknologi yang unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna. tidak membutuhkan hardware yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua perangkat daerah dengan mudah menggunakan link emonev.enrekangkab.go.id. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan MakroPerencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

"*e-monev* berfungsi untuk memantau serapan anggaran pemerintah kabupaten enrekang secara konsisten,efektif dan akurat.penggunaan aplikasi ini dapat mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD,DAK, DEKON,TP dan urusan Bersama.Selain itu emonev memiliki fitur guna mengelolah laporan-laporan Bappeda dalam rangka monitoring dan evaluasiyang dapat disimpan dan dicetak menggunakan teknologi unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna.tidak membutuhkan perangkat keras yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua perangkat daerah menggunakan link emonev.enrekangkab.go.id."

Faktor keunggulan penerapan aplikasi *e-monev* dibandingkan dengan dokumentasi manual di Kabupaten Enrekang antara lain:

1. Mendukung upaya pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Kabupaten Enrekang;

Lompatan terbesar dari upaya reformasi birokrasi melalui pelayanan *e-monev*. ini mendukung upaya tuntutan besar konsep reformasi birokrasi tentang transparansi. *e-monev* membuka permainan baru betapa pentingnya transparansi dalam reformasi birokrasi. Melalui *e-monev* transparansi soal akses publik, tata kelola, transparansi kinerja, dan transparansi keuangan menjadi terang benderang.

Diantara kelebihan-kelebihan setelah pelaksanaan aplikasi *e-monev*, aplikasi ini seolah membuktikan semua konsep-konsep reformasi birokrasi seperti transparansi, partisipasi, efektif, efisiensi, dan akuntabel. Dalam sistem informasi sekarang pelayanan *e-monev* bisa dikatakan sebagai bentuk aplikasi teknologi yang bisa mendorong adanya transparansi. Hal tersebut untuk mendukung tuntutan masyarakat untuk mendapatkan bagiannya dalam hal mengawasi jalannya penyelenggaraan negara. Konsep ini menjustifikasi bahwa era digital sekarang dengan *e-monev*, mempermudah transparansi dimana batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala.

Cara ini memunculkan partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah, dengan pengawasan dari masyarakat pemerintah malah

merasa terbantu, hal ini menandakan bahwa masyarakat lebih perhatian mengawasi anggaran dan pengeluaran pemerintah.

2. Merupakan penerapan asas *good governance* di semua perangkat daerah;

Tidak dapat dimungkiri bahwa *e-monev* merupakan jembatan antara reformasi birokrasi dengan pelaksanaan asas *good governance*. Terdapat kesamaan pemahaman antara tuntutan *good governance* dan tuntutan Reformasi Birokrasi, keduanya dijumpai oleh prinsip-prinsip yang terkait dalam konsep *good governance*. Dengan meminjam istilah Sedarmayanti (2009) reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Secara bersamaan keduanya juga merupakan tuntutan dalam pelaksanaan demokratisasi dalam era reformasi saat ini. Upaya kearah terciptanya tata kelola pemerintahan (*governance*) dapat diukur seberapa banyak transparansi pemerintah yang dilakukan dalam aplikasi *e-monev*.

Dalam konteks pelaksanaan aplikasi *e-monev* dimasing-masing OPD Kabupaten Enrekang, *e-monev* menjadi ujung tombak dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Roh *Good Governance* dalam *e-monev* menjadi ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Sebagai wujud dukungan pelaksanaan asas keterbukaan informasi;

E-monev dalam kerangka reformasi Birokrasi tidak hanya membuktikan bekerjanya konsep-konsep *good governance*, akan tetapi *e-monev* juga memasukan desakan baru tentang keterbukaan informasi publik.

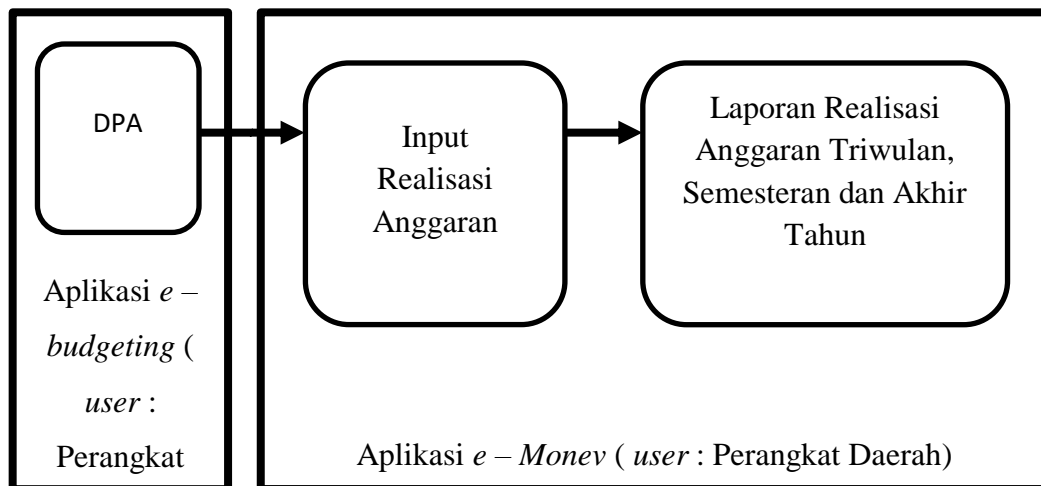
Jembatan untuk menuju kearah sana adalah transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah tranparansi informasi publik. Dengan *e-monev*, (transparansi informasi publik) membuka seluruh informasi ke publik, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga pelaksanaannya. Kedua, keterbukaan informasi publik, memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait kinerja pemerintah. Dengan *e-monev*, pemerintah kabupaten dapat melaporkan seberapa besar realisasi anggaran secara fisik yang telah dilakukan. Dengan *e-monev* dapat menjelaskan seberapa besar kegiatan fisik di Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan. Laporan tersebut diinput ke aplikasi *e-monev*, mulai dari bulanan, triwulan sampai tahunan dengan angka presentasinya semuanya akan kelihatan dalam *e-monev* masing-masing perangkat daerah. Laporan kemajuan tersebut langsung terpublikasi sehingga memudahkan masyarakat mengetahui kinerja pemerintah, di masing-masing OPD. Sistem *e-monev* terkoneksi ke semua OPD dan secretariat melalui perangkat komputer yang telah dipersiapkan di masing-masing OPD.

4. Sebagai wujud menciptakan perubahan budaya dalam birokrasi.

Reformasi Birokrasi dengan *e-monev* bisa menyebabkan perubahan budaya kerja dalam lingkungan instansi pemerintahan. Banyak hal yang membuat birokrasi efektif, dan efisien dengan pelaksanaan *e-monev*. Dalam pendayagunaan aparatur sipil negara misalnya, pemerintah Kabupaten Enrekang dengan *e-monev* sumberdaya lain (personil) bisa

dimanfaatkan atau dilimpahkan untuk mengambil alih pekerjaan lain. Tidak perlu lagi mengirim banyak orang ke Bappeda untuk melaporkan realisasi anggaran dari kegiatan yang telah dilakukan. Dengan penciptaan inovasi elektronik pemerintahan (*e-monev*) perubahan budaya sebagaimana layaknya perubahan zaman yang menuntut pemerintah daerah harus efektif dan kreatifitas dalam hal pelayanan publik. Dalam hal inilah kehadiran elektronik monitoring dan evaluasi (*e-monev*) di Kabupaten Enrekang berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan data informasi yang cepat dan akurat khususnya dalam hal membantu proses laporan dan pemantauan capaian hasil pembangunan dan realisasi anggaran. Di bawah koordinasi Baplitbangda, sistem *e-monev* terkoneksi ke semua OPD dan sekretariat melalui perangkat komputer yang telah dipersiapkan di masing-masing OPD.

Gambar 4.21
Alur Kinerja Aplikasi *e-monev*

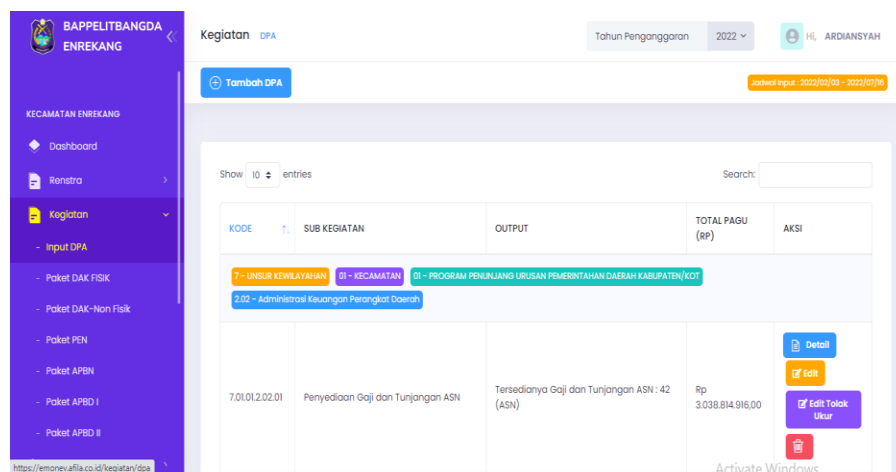


Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar tersebut tahapan penyusunan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi *e-money* sebagai berikut :

1. Form input Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

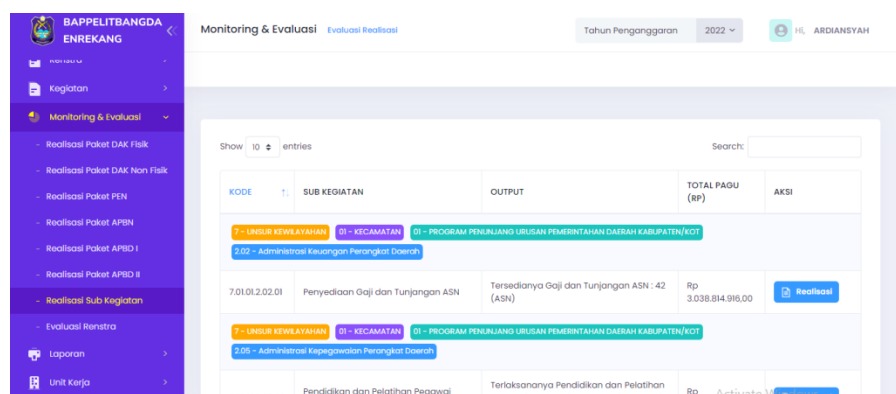
Gambar 4.22
Form input Program dan Kegiatan Perangkat Daerah



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

2. Form Input Realisasi

Gambar 4.23
Form input Realisasi Kegiatan



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

3. Tampilan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun

Gambar 4.24
Tampilan Laporan Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun

No	Kategori	Kode	Uraian Kegiatan	Monev	Realisasi	Target	Persentase	Status
1								
2								
3								

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *e-monev* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-monev* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* sehingga dalam pembuatan laporan menjadi sangat mudah dan cepat menghasilkan yang dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“penggunaan aplikasi *e-monev* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-monev* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* sehingga dalam pembuatan laporan menjadi sangat mudah dan cepat menghasilkan yang dapat di pertanggungjawabkan ”

Sehinggah dapat disimpulkan sistem *e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres* usulan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin, SP., MP selaku Camat Enrekang sebagai pengguna sistem *e-planning* dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Kabupaten Enrekang.

“e-planning berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan

terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres* usulan”

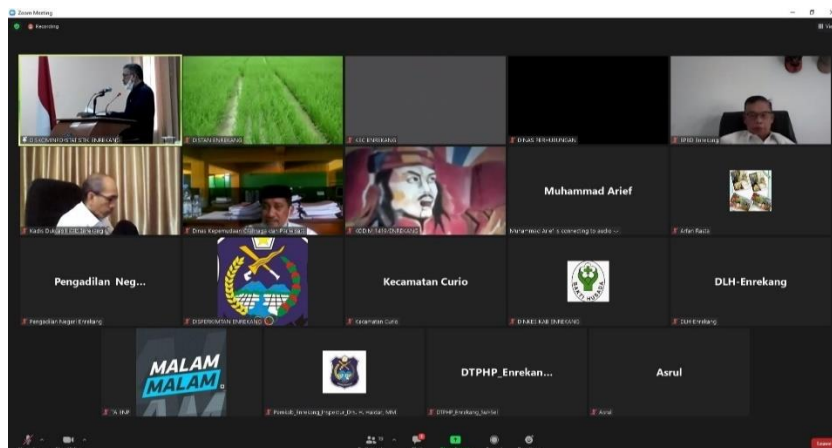
Pernyataan di atas diperkuat berdasarkan wawancara dengan bapak Dr.H.Baba,SE.,MM. selaku Kepala Badan Bappeda Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak;(3)Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* bahkan video conference,sebagai berikut:

“Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat

umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak;(3)Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

Gambar 4.25

Pelaksanaan Musrenbang melalui Zoom



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Dari gambar tersebut dapat dilihat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di masa pandemi virus masih dapat terlaksana melalui aplikasi zoom. Hal ini menunjukkan dengan pemanfaatan aplikasi *e-planning* membuat pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efisien dan meningkatkan partisipasi di masa pandemi virus.

Informasi serupa juga di dapat dari hasil wawancara dengan ibu Nurjannah Mandeha,S.Km selaku Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa *e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrenbang tahun ini

untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*. Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif, beliau mengatakan:

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*. Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

Pelaksanaan sistem ini menjadi semakin lebih bermakna ketika keikutsertaan masyarakat dalam memonitor langsung kinerja pemerintahan, mendorong terjadinya perubahan besar budaya kerja dalam lingkungan instansi pemerintah. Partisipasi masyarakat mendorong terjadinya perubahan budaya kerja ini dapat dirasakan pada responsivitas pelayanan yang dilakukan oleh Birokrasi pemerintah pada masyarakat.

Peneliti telah mewawancarai beberapa pemangku kepentingan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber. Hasil dari wawancara tersebut peneliti olah dengan menggunakan NVIVO 12 untuk melihat jumlah determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

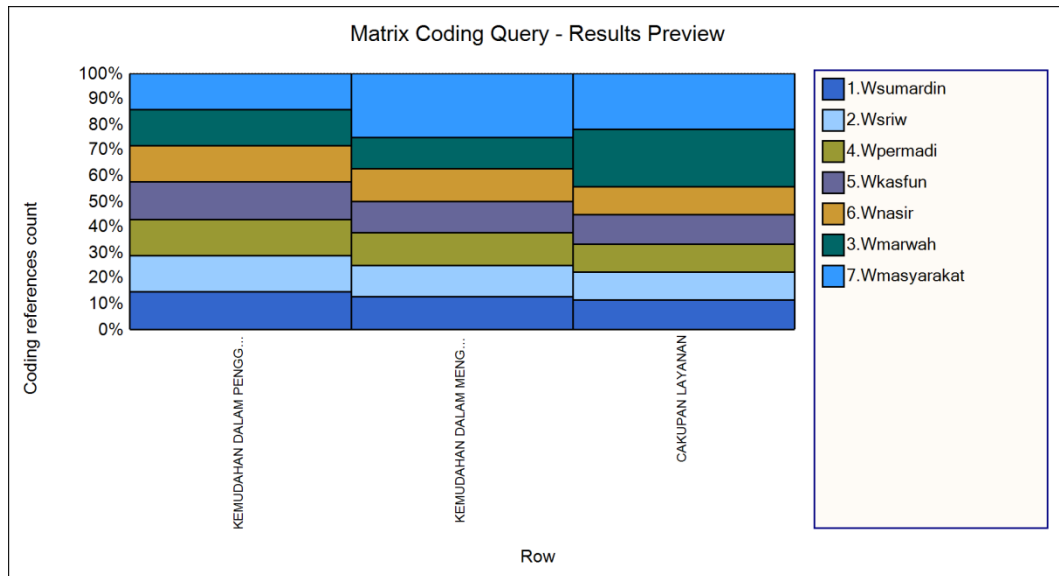
Tabel 4.4 Persentase Wawancara Pada Dimensi Manfaat

Word	Lenght	Count	Weighted Percentage (%)
Perencanaan	11	28	1,79
Planning	8	28	1,79
Aplikasi	8	24	1,53
Perangkat	9	23	1,47
Pembangunan	11	21	1,34
Anggaran	8	18	1,15
Enrekang	8	16	1,02
Penyusunan	10	16	1,02
Kabupaten	9	15	0,96
Pemerintah	10	13	0,83
Budgeting	9	11	0,70
Masyarakat	10	10	0,64

Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya para narasumber menginginkan dalam perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi *e-planning* dapat meningkatkan ketrlibatan masyarakat dalam hal perencanaan daerah hingga penyusunan anggaran atau budgeting di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase angka yang di tunjukan di dalam *word frequency query result* .

Gambar 4.27

Hasil *Matrix Coding* pada Dimensi Manfaat

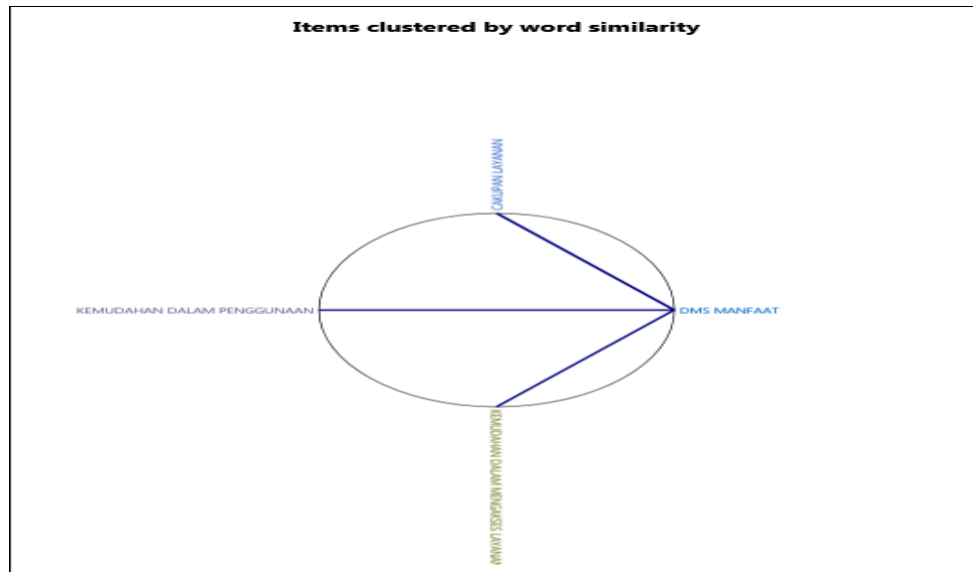
Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi manfaat pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analisis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo.

Seperti gambar berikut :

Gambar 4.28

Hasil *Cluster Analysis* pada Dimensi Manfaat



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi manfaat pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

2.2 Dimensi Efisiensi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang

Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, diantaranya: (a). Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan database yang bisa

berjalan dengan baik ketika dibutuhkan;(b) Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik;(c) Pemanfaatan platform teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek;(d) Kualitas dan ruang lingkup bagi para staf dan pegawai.

Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik menjadi salah satu unsur penting terwujudnya implementasi *e-government*. Selama ini sistem teknologi informasi selalu dikenal sebagai sebuah aktifitas yang menggunakan teknologi canggih, membutuhkan biaya yang besar dan sangat susah diimplementasikan secara cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi ini tentunya tidak perlu sekaligus, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang ada di daerah implementasiannya, tetapi dengan dasar yang kokoh, pembangunan teknologi ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga akhirnya akan membawa efisiensi dan efektifitas dalam sistem pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari pengimplementasian teknologi informasi yaitu mewujudkan sebuah sistem kerja yang efisien, efektif dan terintegrasi.

Menyangkut pola permodalan dalam penerapan *e-government*, permodalan sangat dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan penerapan *e-government*. Hal tersebut dikarenakan permodalan merupakan faktor yang sangat penting dan harus ada untuk dapat melakukan suatu hal. Karena tanpa adanya pembiayaan yang dilakukan, tujuan dari adanya suatu pelaksanaan aktivitas kegiatan tidak dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu pola permodalan yang baik sangat dibutuhkan guna menunjang berbagai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara elektronik online tersebut.

Di Pemerintah kabupaten Enrekang, pola permodalan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jika dalam hal pengadaan sistem, jaringan layanan, pengembangan aplikasi, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan lain sebagainya, modal atau anggaran yang digunakan adalah langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang bersumber dari APBD yang diberikan langsung kepada Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang. Mengenai adanya pola permodalan yang dilakukan di Bappeda dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang, peneliti mencoba mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada Bapak Kasfun Nur selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD dan mengungkapkan sebagai berikut :

“Pembiayaan *e-planning* semua modal berasal dari APBD, Siklus ada di apbd dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai pertanggung jawaban. Mulai dari perencanaan hingga menjadi rkpj setiap tahun, kemudian dari rkpj itu dilanjutkan ke ppas penganggaran, setelah itu uang dibagi sesuai prioritas anggaran”.

Adapun pernyataan lainnya terkait anggaran atau permodalan dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang, baik permodalan terkait pengembangan ataupun pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan sistem dan lain sebagainya. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Marwah selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang, mengungkapkan sebagai berikut:

“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem sistem *e-planning* itu berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD. Jadi kita mempunyai perencanaan yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu dari pihak BPKAD nanti menginput anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan kepada Bappeda maka Bappeda akan membagikan

anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya membayar biaya pengembangan sistem yang sekarang sedang kita lakukan”.

Hal senada pun di ungkapkan oleh ibu Rismawati Selaku Kepala Bidang Telematika Diskominfo Kabupaten Enrekang terkait anggaran dalam pengembangan dan penerapan sistem, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Untuk pihak diskominfo dalam hal anggaran itu menangani terkait pemeliharaan dan pengembangan yang sedang dilakukan untuk saat ini, anggaran infrastruktur dari diskominfo semua. Sumber anggaran yang kami terima itu semua berasal dari APBD”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, dapat diketahui bahwa berbagai anggaran biaya yang tersedia di Bappeda Kabupaten Enrekang dialokasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang. Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Enrekang tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang seperti pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan sistem dan lain sebagainya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“. Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh BPKAD dan Bappeda Kabupaten Enrekang tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang seperti pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan sistem dan lain sebagainya”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi *e-government* melalui sistem aplikasi *e-planning* di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, semua pembiayaan berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk pembiayaannya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Pembiayaan untuk pengembangan aplikasi sistem *e-planning*; (2) Pembiayaan untuk infrastruktur *server e-planning*; (3) Pembiayaan untuk pengembangan sumber daya aparatur. Sumber daya finansial merupakan salah satu element penting dalam menunjang implementasi kebijakan *e-Government* karena setiap kegiatan pasti membutuhkan dana dan anggaran. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk penerapan *e-governmen*, maka pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen dalam menyediakan dana dan anggaran yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin, SE., M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen menyediakan dana dan anggaran untuk pengembangan sumber daya, infrastruktur dan pengembangan aplikasi *e-planning*”

Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen utama penunjang berbagai kegiatan yang dilakukan, karena tanpa ditunjang atau didukung dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai, maka berbagai kegiatan yang dilakukan pun tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan penerapan *e-government* yang dilakukan. Karena pada dasarnya infrastruktur merupakan sarana prasarana penunjang utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *e-government*, terutama di Bappeda Kabupaten Enrekang.

Mengenai ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi yang ada di Bappeda Kabupaten Enrekang, ketersediaan infrastruktur yang ada memang sudah cukup memadai, terutama infrastruktur penunjang layanan sistem *e-planning*. Sebagian infrastruktur yang tersedia masih memiliki kondisi yang cukup baik dan masih cukup memadai untuk dapat digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ruangan operator kondisi ruang operator sistem *e-planning* dalam kondisi baik dan sistem berjalan dengan lancar serta tanpa kendala dalam pengoperasian.

Mengenai hal tersebut diatas, peneliti mencoba mencari informasi mengenai kondisi yang terjadi pada infrastruktur tersebut. Oleh karena itu peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Kasubid Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang, yaitu ibu Sry Wahyuni,S.Kom dan mengungkapkan sebagai berikut :

“Ketersediaan infrastruktur yang ada seperti komputer itu ada yang memakai dari fasilitas kantor dan ada pula yang memakai komputer pribadi, untuk keadaan infrastruktur di Bappeda cukup baik”.

Serta mengenai adanya kerusakan yang terjadi terhadap infrastruktur penunjang sistem *e-planning* seperti komputer, mesin pencetak/*printer* dan jaringan internet yang seringkali terjadi masalah di seluruh Kecamatan tersebut. Infrastruktur penunjang di seluruh kecamatan yang sudah mengalami kerusakan biasanya akan ada perbaikan atau pergantian infrastruktur yang baru. Namun pengadaan infrastruktur tidak mudah dan tidak langsung ada karena untuk proses perbaikan dan pergantian harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.namun, hal tersebut dapat terlaksana dengan cepat sebelum jadwal musrenbang atau

monitoring dilaksanakan. Bapak Yasmin selaku Operator *e-planning* di Kecamatan Baraka mengungkapkan sebagai berikut :

“infrastruktur penunjang sistem *e-planning* seperti komputer, mesin pencetak/printer dan jaringan internet yang seringkali terjadi masalah di seluruh Kecamatan tersebut. Infrastruktur penunjang di seluruh kecamatan yang sudah mengalami kerusakan biasanya akan ada perbaikan atau pergantian infrastruktur yang baru. Namun pengadaan infrastruktur tidak mudah dan tidak langsung ada karena untuk proses perbaikan dan pergantian harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.namun, hal tersebut dapat terlaksana dengan cepat sebelum jadwal musrenbang atau monitoring dilaksanakan”.

Hal senada pun diungkapkan oleh operator *e-planning* dari Kecamatan Cendana yaitu ibu Hasna :

“Untuk keadaan infrastruktur penunjang di kecamatan dalam keadaan berfungsi seperti wifi namun sering terjadi gangguan, infrastruktur pendukung seperti laptop dan printer dianggap sudah memenuhi standarisasi yang sudah ditentukan dalam menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik”.

Selain itu ibu dian selaku operator *e-planning* di Kecamatan Enrekang mengungkapkan pula terkait infrastruktur yang ada di Kecamatan Enrekang sebagai berikut :

“Ketersediaan infrastruktur disini sudah tersedia dengan baik sampai ditingkat kecamatan sampai kelurahan serta tersedianya jaringan internet yang di dukung oleh diskominfo berkat hal tersebut pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi warga ”

Dengan adanya pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kondisi infrastruktur yang tersedia di Bappeda dan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Enrekang seperti komputer, printer, alat pencetak dan lain sebagainya yang ada dalam kondisi yang baik. Infrastruktur sistem e-planning di Bappeda Kabupaten

Enrekang dalam kondisi baik yang berguna untuk memperlancar proses kerja perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan karena berbagai infrastruktur yang dimiliki sudah memiliki kondisi yang baik, selain itu juga maksimalnya pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan terhadap infrastruktur yang ada, baik sarana prasarana maupun infrastruktur jaringan. Sehingga karena hal tersebut berbagai proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *e-planning* dapat berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“kondisi infrastruktur yang tersedia di Bappeda dan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Enrekang seperti komputer, printer, alat pencetak dan lain sebagainya yang ada dalam kondisi yang baik. Infrastruktur sistem *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang dalam kondisi baik yang berguna untuk memperlancar proses kerja perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan karena berbagai infrastruktur yang dimiliki sudah memiliki kondisi yang baik, selain itu juga maksimalnya pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan terhadap infrastruktur yang ada, baik sarana prasarana maupun infrastruktur jaringan. Sehingga karena hal tersebut berbagai proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *e-planning* dapat berjalan efektif dan efisien”

Pemerintah Kabupaten Enrekang menyediakan Infrastruktur pendukung penerapan sistem *e-planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dukungan infrastruktur dalam implementasi kebijakan *e-government* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang melalui sistem aplikasi *e-planning* dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

- a. *Server*

Server merupakan komputer yang digunakan untuk memberikan layanan tertentu pada para pengguna komputer yang terhubung ke server tersebut.

b. Ruang server

Ruang server merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan server (aplikasi dan *database*), perangkat jaringan (*router*, *hub*, dll) dan perangkat lainnya yang terkait dengan operasional sistem sehari-hari seperti UPS, AC, dan lain-lain. Ruang server harus memiliki standar keamanan yang melindungi kerja perangkat-perangkat didalamnya, mulai suhu udara, kelembaban, kebakaran dan akses masuk dari orang-orang yang tidak berkepentingan.

c. Koneksi internet berlangganan.

Koneksi internet merupakan salah satu upaya untuk penerapan aplikasi *e-government*. Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk penyediaan koneksi internet melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sri Wahyuni, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pemerintah Kabupaten Enrekang menyediakan dukungan infrastruktur pendukung sistem *e-planning* berupa server, ruang server dan koneksi internet berlangganan”

Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya *e-government*. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan

keahlian bidang teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *e-government*. Dengan modal sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang merasa cukup mampu untuk mengimplementasikan *e-government* di instansinya. Hal diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya *e-government*. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *e-government*. Dengan modal sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang merasa cukup mampu untuk mengimplementasikan *e-government* di instansinya.”

Pengoperasian sistem aplikasi *e-planning* tidak harus dibutuhkan sumber daya aparatur atau pegawai dengan kualifikasi bidang teknologi informasi melainkan bisa dari berbagai disiplin ilmu dengan syarat sudah pernah mengikuti pelatihan tentang *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Sumber daya aparatur yang bertugas mengoperasikan aplikasi *e-planning* terdiri dari :

1. Koordinator

Koordinator disini adalah aparatur BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang menangani langsung *e-planning*. Koordinator tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan alat bantu *e-planning*;

2. Narasumber

Narasumber dibutuhkan sebagai tenaga pendamping dalam implementasi sistem aplikasi *e-planning*. Narasumber berasal dari konsultan atau pihak swasta yang menyediakan sistem aplikasi *e-planning* dan aparatur BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang menangani langsung sistem aplikasi *e-planning*. Admin Admin merupakan aparatur BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang diberi tugas mengatur aksesibilitas pengguna aplikasi e-Planning.

3. Operator

Operator dibagi menjadi 2, yaitu : operator di BAPPEDA Kabupaten Enrekang dan operator Organisasi Perangkat Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dalam penyusunannya harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang dapat dituangkan dalam modul aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Enrekang (*e-Planning*), yaitu sebagai berikut :

- a. Pemasukan data Renstra
- b. Pemasukan data Renja
- c. Pemasukan data RPJMD
- d. Pemasukan data RKPD

e. Penerbitan KUA-PPAS

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pengoperasian sistem aplikasi *e-planning* tidak harus dibutuhkan sumber daya aparatur atau pegawai dengan kualifikasi bidang teknologi informasi melainkan bisa dari berbagai disiplin ilmu dengan syarat sudah pernah mengikutipelatihan tentang *e-planning*. Pengoperasian *e-planning* ini terdiri dari koordinator, narasumber dan operator”

Untuk *entry* data ke dalam sistem *e-planning*, untuk pengguna dibagi menjadi beberapa level pengguna, yaitu :

a. User Level : ADMIN

Tugas Admin antara lain:

- 1) Menyiapkan User Account dan Password bagi pengguna aplikasi
- 2) Menentukan jadwal input data
- 3) Menyiapkan referensi
- 4) Memberikan pengumuman dan merespon tanya jawab

b. User Level: OPERATOR

Tugas Operator antara lain :

- 1) Input referensi RPJMD (Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan Program).
- 2) Input referensi Renstra.
- 3) Input referensi Urusan Pemerintahan.
- 4) Input rencana pendapatan dan belanja daerah.
- 5) Mengisi Pagu Sementara masing-masing OPD.
- 6) Migrasi database dari RKPD ke KUA-PPAS

7) Menyiapkan laporan dan eksekutif (bila diperlukan)

c. User Level: Organisasi Perangkat Daerah Tugasnya, antara lain :

Proses input data kegiatan perencanaan melalui sistem aplikasi *e-planning* tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu :

1. Input yang meliputi informasi program, kegiatan dan anggaran yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat daerah sesuai dengan visi dan misi;
 2. Proses yang memuat informasi mengenai waktu pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Output yang memuat informasi mengenai hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Outcome yang memberikan informasi mengenai dampak yang akan diperoleh apabila program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.
7. Publikasi penggunaan *e-planning* kepada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang.

“untuk memasukkan data ke dalam sistem *e-planning* terbagi beberapa level pengguna antara lain admin, operator dan level opd yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing”

Pengadaan sdm sangat perlu dan penting dilakukan guna menunjang berbagai aktivitas yang dilakukan. Karena dengan adanya sdm yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam bidangnya, hal tersebut tidak menutup

kemungkinan segala aktivitas pelaksanaan penerapan dengan berbagai sistem yang ada dapat dilakukan secara maksimal jika ditunjang dengan kualitas sdm yang memadai.

Mengenai pengadaan sdm di Bappeda Kabupaten Enrekang, pengadaan sdm di Bappeda memang ada dan dilakukan setiap periodenya. Pengadaan yang dilakukan biasanya dialokasikan untuk beberapa bagian tertentu di Bappeda yang membutuhkan SDM baru/tambahan. Di kantor Bappeda Kabupaten Enrekang sendiri, pengadaan SDM dilakukan jika terjadi adanya kebutuhan pegawai pada ruang/tempat kosong pada posisi tertentu, terutama posisi yang khusus menangani sistem perencanaan. Karena sampai saat ini kondisi jumlah pegawai yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Enrekang terutama pada bagian sistem *e-planning* dapat dikatakan masih sangat kurang dan masih membutuhkan tambahan jumlah pegawai.

Jumlah pegawai yang ada di bidang perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang yaitu hanya ada 9 (Sembilan) termasuk dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan. Pengadaan SDM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang, terutama kebutuhan SDM yang diperuntukkan pada bidang perencanaan pembangunan guna memenuhi posisi sebagai pelaksana penerapan pada sistem *e-planning*.

Jumlah SDM yang ada di bagian perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang saat ini dirasa masih mencukupi. Namun jika memang dibandingkan dengan jumlah perencanaan pembangunan di seluruh

kecamatan Kabupaten Enrekang saat ini dapat dikatakan masih kurang mencukupi. Hal tersebut karena tidak seimbangnya antara jumlah pegawai/operator yang ada dibandingkan dengan jumlah perencanaan pembangunan yang banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya. Maka, dengan adanya hal tersebut, peneliti mencoba menanyakan mengenai hal tersebut kepada Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro, dan mengungkapkan sebagai berikut :

“Pengadaan SDM disetiap tahun atau periode yang ditentukan pasti dilakukan, namun dilain sisi kami juga melihat kondisi SDM yang ada, jika memang dengan kondisi SDM yang ada masih kekurangan dan membutuhkan SDM baru, maka kami pun berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum untuk dapat mengalokasikan pada bagian kami, dari SDM yang sudah ada dan kemudian dilakukan rolling ke bagian kami tapi tidak semudah itu untuk pengadaan SDM, Pengadaan SDM khusus untuk pegawai operator layanan sebenarnya sangat perlu dilakukan, karena jumlah operator yang ada dapat dikatakan masih kurang dari cukup, sehingga karena hal itu kami terkadang tidak dapat mengerjakan pekerjaan melalui sistem *e-planning* yang ada secara baik dan cepat. Karena jika dibandingkan jumlah operator yang ada dapat dikatakan sangat tidak seimbang dengan jumlah data yang ada setiap tahunnya”

Selain itu pernyataan lain diungkapkan mengenai pengadaan SDM yang dilakukan guna menunjang berbagai aktivitas sistem *e-planning* yaitu Bapak Nasir selaku Operator *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang, mengungkapkan sebagai berikut:

“Pengadaan sdm memang ada saja tapi kan tidak semua bidang, unuk sekarang di bidang perencanaan pembangunan hanya 9 (Sembilan) orang termasuk Kepala Bidang dan 9 orang ini di bagi bagi pekerjaannya. Operator khusus *e-planning* ada 2 orang saya dan teman saya tapi teman saya lebih ke penganggarannya. Cukup sibuk sih kalo periode perencanaan masuk ke dalam sistem kan di setiap kecamatan juga tidak hanya satu atau dua perencanaan saja”

Tidak hanya di kantor Bappeda saja untuk pengadaan SDM , di seluruh kecamatan pun di setiap tahun atau periodenya melaksanakan pengadaan SDM guna untuk membantu dan menambah SDM di setiap kecamatan, pengadaan SDM biasanya dilakukan dengan pertukaran (*rolling pegawai*) ataupun penambahan SDM sesuai dengan Kebijakan Kepala camat, untuk di setiap kecamatan SDM yang menangani sistem *e-planning* bisa dibbilang sedikit hanya 2 orang termasuk Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan Kecamatan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Syamsinar selaku operator *e-planning* Kecamatan Maiwa :

“Pengadaan sdm di kecamatan biasanya itu di *rolling*, kalau pun ada penambahan sdm itu atas dasar kebijakan Kepala Camat. Untuk di bidang yang menangani *e-planning* sampai saat ini belum ada penambahan sdm padahal untuk di bidang ini sangat butuh penambahan sdm , walaupun berdua dengan Kepala sub bidang terkadang sulit juga untuk berkoordinasi karena Kepala Seksi pun masih memiliki pekerjaan lain bukan hanya terkait *e-planning* saja”

Hal senada pun di ungkapkan oleh Ibu Hasna selaku operator sistem *e-planning* Kecamatan Cendana:

“Belum ada penambahan sdm untuk dibidang *e-planning*, kalau pun ada itu wewenang dan kebijakan Kepala camat disini. Memang sangat kurang untuk sdm terkait *e-planning* di Kecamatan Cendana hanya ada dua termasuk Kepala Seksi”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai pengadaan sumber daya manusia yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Enrekang, dapat diketahui bahwa pengadaan sumber daya manusia yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Enrekang pengadaannya dilakukan setiap periode. Pengadaan pegawai yang dilakukan biasanya diperoleh dari adanya pengalokasian sdm/pegawaidari pusat, pertukaran (*rolling*) yang dilakukan

didalam instansi maupun perekrutan yang dilakukan dari instansi lain, seperti dari mutasi pegawai dan lain sebagainya. Begitupun halnya dengan pengadaan sumber daya manusia di kecamatan tidak jauh berbeda dengan di Bappeda Kabupaten Enrekang. Pengadaan sumber daya manusia di kecamatan dilakukan di setiap tahun atau periode yang sudah ditentukan, untuk penambahan sumber daya manusia di Kecamatan dilakukan atas wewenang atau kebijakan Camat ataupun pertukaran pegawai/mutasi.

Selanjutnya, mengenai pengembangan kanal akses. Pengembangan kanal akses sangat perlu dilakukan guna menunjang dan memberikan kemudahan bagi OPD terkait agar dapat terintegrasi dengan sistem dan juga OPD atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Enrekang. Didalam sistem *e-planning* ini selain mengakses berbagai informasi terkait perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan, *e-planning* pun terintegrasi ke seluruh OPD di Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu pengembangan kanal akses perlu dikembangkan agar memperlancar kerja sistem *e-planning* dan mempermudah OPD atau Kecamatan di Kabupaten Enrekang dalam mengakses sistem *e-planning*.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Rismawati selaku Kepala Bidang Telematika sebagai berikut :

“Pengembangan kanal akses memang sedang dilakukan dibarengi dengan pengembangan sistem *e-planning*, kanal akses ini sangat penting karena kan bersangkutan dengan seluruh OPD dan Kecamatan Kabupaten Enrekang jadi harus benar benar dikembangkan agar sistem lebih baik dan mudah diakses. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bappeda Banyuwangi terkait *e-planning* karena sistem yang dimiliki Banyuwangi ini mudah diakses dan dimodifikasi jadi dapat mempermudah berbagai pihak yang terkait”.

Hal senada pun diungkapkan oleh Teknisi Diskominfo Kabupaten Enrekang yaitu Bapak Muftah Ali, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Kanal akses itu berada dalam sistem *e-planning* ini jadi berbarengan pengembangannya, tujuan dikembangkannya sistem ini memang untuk mempermudah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti OPD dan kecamatan untuk lebih baik lagi kedepannya”.

Selain itu ibu Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bidang Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang pun mengungkapkan terkait pengembangan kanal akses pada sistem *e-planning* sebagai berikut:

“Pengembangan kanal akses pasti dilakukan karena terkait banyak pihak kan, kita ingin mempermudah OPD dan Kecamatan seluruh Kabupaten dalam mengakses sistem *e-planning* ini. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Diskominfo agar sistem ini yang mudah diakses oleh berbagai pihak”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa pengembangan kanal akses memang sudah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang dibarengi dengan pengembangan sistem *e-planning* dengan bertujuan untuk memudahkan seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Enrekang dalam mengakses sistem *e-planning* dan terintegrasi dengan baik antara sistem *e-planning* dengan seluruh OPD yang terkait. Sehingga baik penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan dapat dengan mudah, efektif dan efisien nantinya.. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“pengembangan kanal akses memang sudah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang dibarengi dengan pengembangan sistem *e-planning* dengan bertujuan untuk memudahkan seluruh OPD dan Kecamatan di

Kabupaten Enrekang dalam mengakses sistem *e-planning* dan terintegrasi dengan baik antara sistem *e-planning* dengan seluruh OPD yang terkait. Sehingga baik penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan dapat dengan mudah, efektif dan efisien nantinya.”

Selain itu juga untuk pengadaan SDM di Bappeda Kabupaten Enrekang dilakukan setiap periode yang ditentukan tetapi tidak setiap periode SDM di bidang Perencanaan pembangunan bertambah karena tidak setiap pengadaan SDM tidak semua bidang bertambah SDM nya termasuk bidang perencanaan pembangunan. Di kantor Bappeda Kabupaten Enrekang sendiri, pengadaan SDM dilakukan jika terjadi adanya kebutuhan pegawai pada ruang/tempat kosong pada posisi tertentu, terutama posisi yang khusus menangani sistem *e-planning*.

Begitu pula halnya di seluruh Kecamatan di Kabupaten Enrekang untuk pengadaan SDM pun dilakukan di setiap periode yang ditentukan atau adanya rolling pegawai kecamatan, adapun penambahan SDM di lain periode yang sudah ditentukan merupakan wewenang ataupun kebijakan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ke beberapa pemangku kepentingan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan dimensi efisiensi pada penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang. Hasil dari wawancara tersebut peneliti olah dengan menggunakan NVIVO 12 untuk melihat jumlah determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Persentase Wawancara pada Dimensi Efisiensi

Word	Lenght	Count	Weighted Percentage (%)
Planning	8	22	2,16 %
Infrastruktur	13	18	1,77 %
Kabupaten	9	11	1,08 %
Kecamatan	9	11	1,08 %
Pengembangan	12	11	1,08 %
Enrekang	8	10	0,98 %
Anggaran	8	9	0,88 %
Dilakukan	9	9	0,88 %
Perencanaan	11	9	0,88 %

Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya para narasumber berpendapat bahwa sistem perencanaan secara eletronik atau *e-planning* di Kabupaten Enrekang membutuhkan pengembangan infrastruktur sehingga nanti memudahkan terhubungnya sistem ini dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten sehingga mempermudah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahunnya.

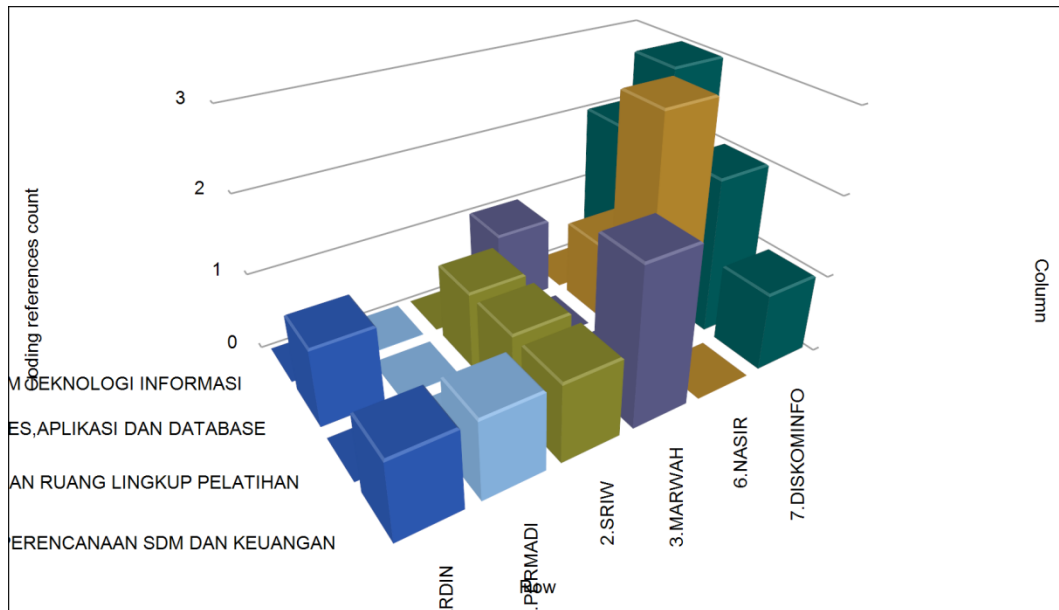
Gambar 4.26

Hasil *Word Cloud* Dimensi Efisiensi

Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus didapatkan hasil yaitu pengembangan, infrastruktur, perencanaan dan anggaran menjadi paling banyak dibicarakan dalam wawancara pada dimensi manfaat pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat semua narasumber dapat mengerti dengan pembahasan mengenai dimensi efisiensi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil *matrix coding* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.30

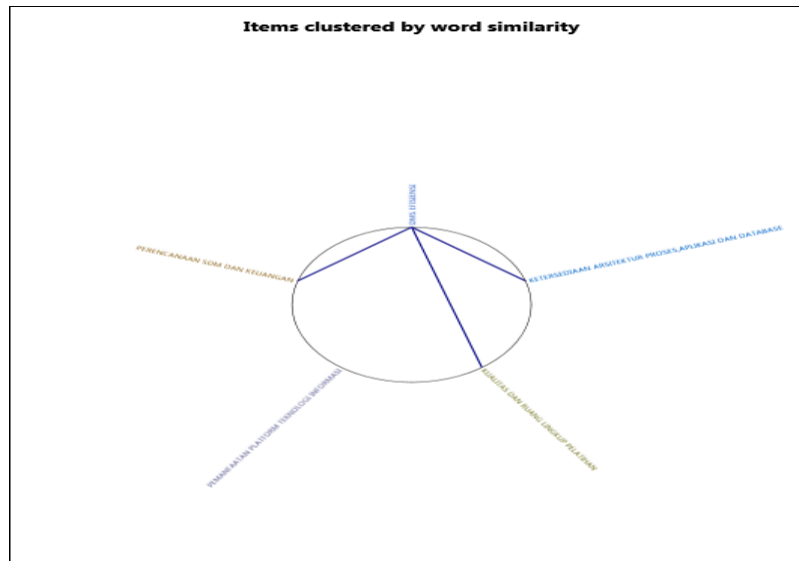
Hasil *Matrix Coding* pada Dimensi Efisiensi

Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi efisiensi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analisis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.31

Hasil *Cluster Analysis* pada Dimensi Efisiensi



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi efisiensi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

2.3 Dimensi Partisipasi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang

Dimensi Partisipasi ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, diantaranya : Akses langsung masyarakat melalui *web*, pertimbangan umpan balik dan keinginan masyarakat, pengaruh dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan tersedianya fasilitas komunikasi langsung dengan masyarakat.

Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya maka telah terjadi perubahan dalam perencanaan pembangunan terutama pelibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam Musrenbang dan menyetujui hasilnya secara langsung serta tidak memantau seberapa banyak usulan program dan kegiatan yang lolos dalam APBD.

Salah satu bentuk implementasi dari *e-government* adalah penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online. *e-planning* sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran terbentuknya *e-planning* berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang

menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Aplikasi *e-planning* memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang. Perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif melalui pemanfaatan dan implementasi *e-planning* dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Aplikasi *e-planning* sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran terbentuknya *e-planning* berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Aplikasi *e-planning* memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang”

Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap tingkatan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelestarian sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan. Dalam hal partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, secara umum masih sulit untuk mewujudkan *e-democracy* di mana masyarakat mampu memberikan banyak pilihan dan proses pengambilan keputusan secara online. Hal

tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin,SP.,MP selaku Camat Enrekang.

“Dalam praktiknya, *e-planning* yang diterapkan di Kabupaten Enrekang tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung yang seharusnya ikut andil dalam melakukan perencanaan. Masyarakat tidak diberi akses secara langsung untuk mengakses aplikasi *e-planning*. Hanya operator tingkat kelurahan, kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*, Masyarakat hanya diikuti sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator “.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat tidak diberi akses langsung untuk mengakses aplikasi *e-planning*. Hanya operator tingkat kelurahan,kecamatan dan OPD yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*. Masyarakat hanya diikuti sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penginputan usulan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada proses penginputan usulan di Aplikasi *e-planning*. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Hanya operator tingkat kelurahan,kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*,Masyarakat hanya diikuti sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penginputan usulan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada proses penginputan usulan di Aplikasi *e-planning*”.

Hal Sama juga diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang, dan dia mengungkapkan bahwa hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi *e-planning* bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrenbang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi *e-planning* dengan bertanya ke operator kelurahan/desa.

“hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi *e-planning* bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrenbang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi *e-planning* dengan bertanya ke operator kelurahan/desa”.

Gambar 4.32
Pelaksanaan Musrenbang





Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin,SP.,MP selaku Camat Enrekang.

“terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulannya”.

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh Aswar Anas selaku Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Dia mengungkapkan bahwa dalam proses penginputan usulan Pokok Pikiran Dewan kedalam Aplikasi *e-planning* terdapat menu Pokok Pikiran Dewan yang dapat diakses secara langsung menggunakan *user name* dan *password* yang di berikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang. Selain itu, Aplikasi *e-planning* memungkinkan Anggota Dewan untuk memantau usulannya secara langsung pada aplikasi.

“proses penginputan usulan Pokok Pikiran Dewan kedalam Aplikasi *e-planning* terdapat menu Pokok Pikiran Dewan yang dapat diakses secara langsung menggunakan user name dan password yang di berikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang. Selain itu, Aplikasi *e-planning* memungkinkan Anggota Dewan untuk memantau usulannya secara langsung pada aplikasi”

Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan

aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*.”

Masyarakat tidak memiliki akses langsung dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada aplikasi *e-budgeting*. Namun, masyarakat dapat melihat rencana anggaran Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* dan dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Enrekang .Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kasfun Nur selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

“Masyarakat tidak memiliki akses langsung dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada aplikasi *e-budgeting*. Namun, masyarakat dapat melihat rencana anggaran Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* dan dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Enrekang”

Pada proses monitoring dan evaluasi realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi *e-monev*. Pada aplikasi *e-monev*, semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang terlibat secara langsung dalam melaporkan realisasi anggaran pada tahun berjalan. Hal ini merupakan kegiatan rutin sehingga semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang memiliki nama pemakai dan kata sandi untuk mengakses aplikasi *e-monev*. Hal diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang memiliki hak akses berupa kata sandi dan nama pemakai untuk mengakses *e-monev* ”

Sedangkan, Hak akses masyarakat pada aplikasi *e-monev* berupa laporan yang di publikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dilaporkan secara langsung kepada para pemangku kepentingan seperti para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan tokoh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Hak akses masyarakat pada aplikasi *e-monev* berupa laporan yang di publikasikan melalui web resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dilaporkan secara langsung kepada para pemangku kepentingan seperti para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan Tokoh masyarakat”

Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada proses musrembang di tingkat desa/kelurahan, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrembang memutuskan usulan prioritas kelurahan / desa menggunakan cara musyawarah dan proses perangkan usulan sehingga hanya usulan prioritas saja yang di masukkan dalam *e-planning* merupakan keinginan masyarakat bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada proses musrembang di tingkat desa/kelurahan, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrembang memutuskan usulan prioritas kelurahan/ desa menggunakan cara musyawarah dan proses perangkan usulan sehingga hanya usulan prioritas saja yang di masukkan dalam *e-planning* merupakan keinginan masyarakat bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran”

Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi laporan realisasi yang diadakan setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Forum tersebut dihadiri semua perangkat daerah serta tokoh masyarakat bertujuan untuk melaporkan hasil realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang:

“terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi laporan realisasi yang diadakan setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Forum tersebut dihadiri semua perangkat daerah serta tokoh masyarakat bertujuan untuk melaporkan hasil realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

Gambar 4.14

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Pada Gambar diatas dapat dilihat terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program / kegiatan bersumber dana APBN dan APBD Kabupaten Enrekang berdasarkan informasi dari data yang dikelolah oleh aplikasi *e-monev* sehingga dapat tersusun dengan baik. Pada forum rapat ini dihadiri oleh semua perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Sehingga, nantinya didapatkan informasi yang aktual mengenai laporan realisasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Enrekang. Pelaksanaan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk saran dan kritik mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempertimbangkan keinginan masyarakat untuk terlibat secara langsung pada proses perencanaan pembangunan secara online. Namun, Pelayanan *online* yang diberikan masih terdapat banyak kendala. Sehingga pelayanan online yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang. Kendala-kendala yang ditemukan akan dievaluasi dan dicarikan jalan keluarnya agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cara peningkatan *platform* teknologi dari *platform* standart ke *platform seluler* yaitu dengan berbasis android. Ibu Rismawati, S.Kom selaku Kepala Bidang Telematika Diskoinfo Kabupaten Enrekang berupaya membuat pelayanan berbasis online lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat yaitu dengan pelayanan berbasis android. Ibu Rismawati mengatakan:

“kami ingin menerapkan pelayanan *online* yang diberikan adalah pelayanan *online* berbasis android, karena praktis dan mudah diakses oleh

seluruh masyarakat. Apalagi jaman sekarang kan masyarakat memiliki hp android sehinggah aplikasi *e-planning* nantinya dapat diakses langsung oleh masyarakat”

Karena banyaknya kendala yang terjadi dalam proses pelayanan *online*, Rismawati mengharapkan Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis kepada masyarakat dalam menggunakan sistem *e-planning* yaitu pelayanan berbasis android. Hal tersebut dipertimbangkan dari masyarakat yang sudah banyak menggunakan *handphone* android dan mudah digunakan.

Informasi serupa juga didapat dari hasil wawancara dengan Sri Wahyuni,S.Kom, sebagai berikut :

“Kita ingin membuat pelayanan online berbasis android agar masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan *online* melalui ponselnya masing-masing. Namun, untuk saat ini aplikasi *e-planning* hanya dapat diakses oleh *user* yang memiliki *password* nya saja yang bertugas untuk menginput usulan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan permasalahan yang terjadi dalam memberikan pelayanan berbasis online, Pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat yaitu pelayanan berbasis android. Masyarakat dapat langsung menyalurkan usulannya ke sistem *e-planning* dengan mudah menggunakan ponselnya masing-masing.

Masyarakat menanggapi dengan positif terkait pelayanan berbasis android yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Seperti pernyataan Mahmuddin sebagai berikut :

“saya berharap pelayanan berbasis android dapat segera diaplikasikan kepada masyarakat. Agar kami dapat lebih mudah dalam mengusulkan usulan dalam musrenbang karena pelayanan berbasis android akan jauh lebih baik dari pada pelayanan berbasis online yang menurut saya belum dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan ke beberapa informan yaitu pemangku kepentingan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai indikator pada dimensi partisipasi pada implementasi *e-planning* di Kabupaten Enrekang. Hasil dari wawancara tersebut peneliti olah dengan menggunakan NVIVO untuk melihat determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Persentase Wawancara Pada Dimensi Partisipasi

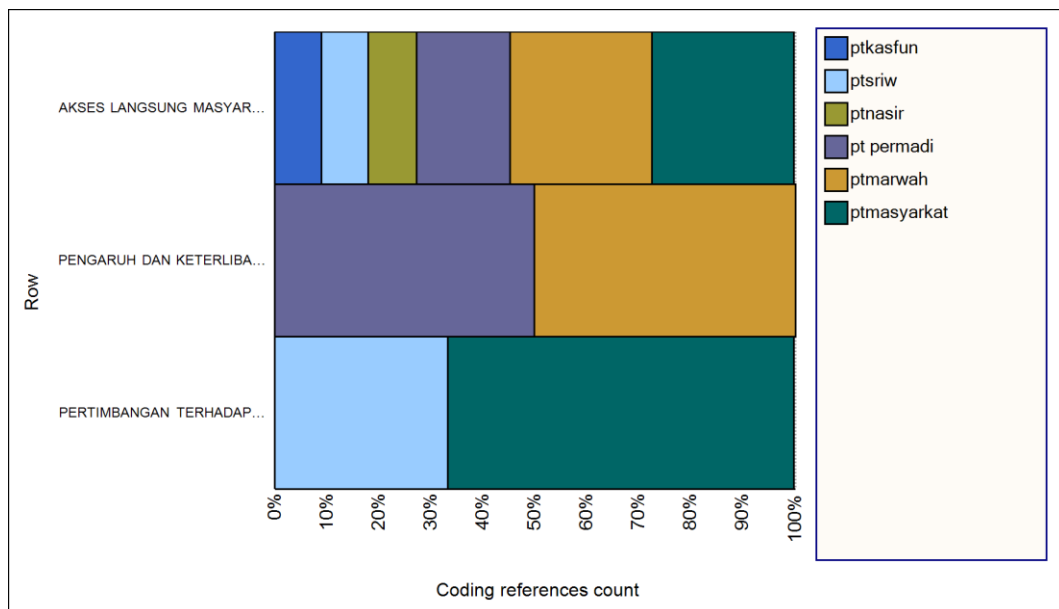
Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Aplikasi	9	28	3,12 %
Masyarakat	10	27	3,10 %
Planning	8	22	2,53 %
Enrekang	8	14	1,61 %
Kabupaten	9	14	1,61 %
Anggaran	8	12	1,38 %
Kelurahan	9	12	1,15 %
Langsung	8	10	0,92 %
Bertujuan	9	8	0,92 %

Sumber : Nvivo 12 Plus

mengerti dengan pembahasan mengenai dimensi partisipasi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil *matrix coding* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.35

Hasil *Matrix Coding* pada Dimensi Partisipasi

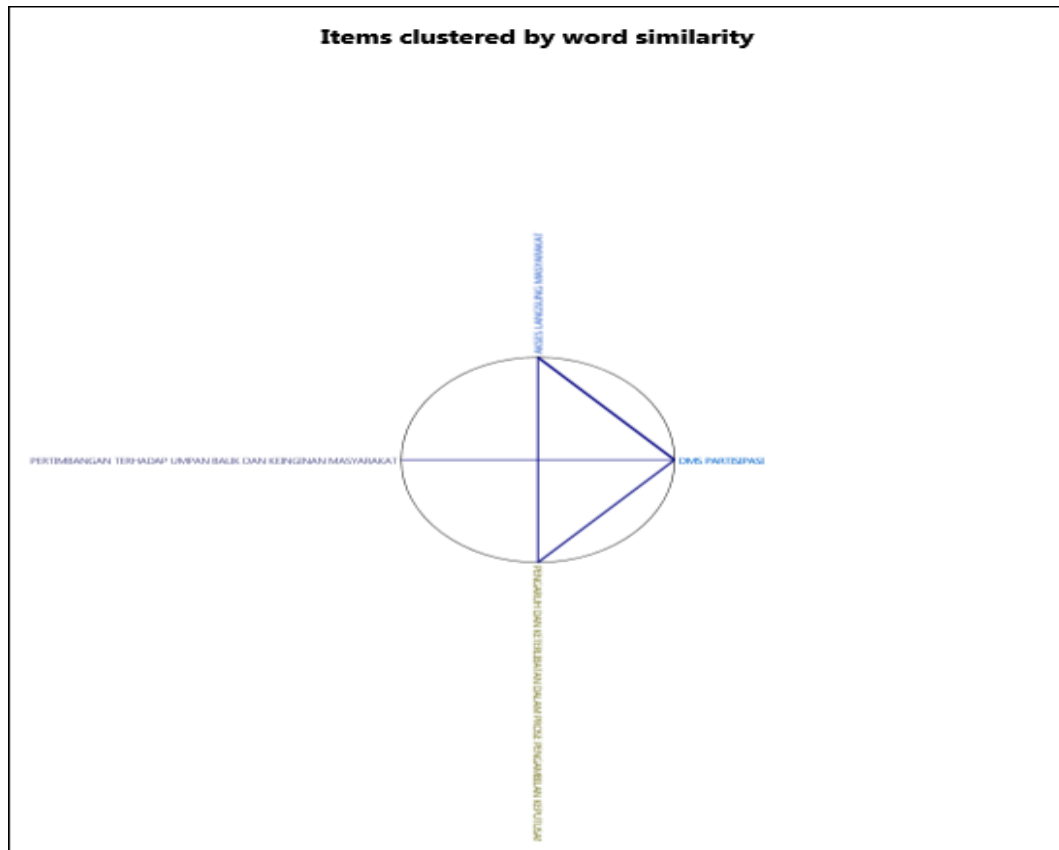


Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi efisiensi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analisis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.35

Hasil *Cluster Analysis* pada Dimensi Partisipasi



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi partisipasi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

2.4 Dimensi Transparansi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang

Dimensi Transparansi yaitu apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, diantaranya : Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, informasi status usulan masyarakat dan Aktualisasi informasi.

Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk informasi mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Masyarakat bebas untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kinerja pemerintah, laporan keuangan, kebijakan pemerintah berikut dokumen pendukung, rencana kerja proyek, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai, dan lain-lain.

Kebebasan dalam mengakses informasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang resmi diundangkan pada tanggal 30 April 2008, setelah mengalami proses penggodokan yang cukup alot. Undang-Undang ini merupakan salah satu wujud dari usaha pemerintah dalam memberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi melalui dibentuknya tatanan hukum formal yang mengatur hal tersebut. Salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mendukung penerapan UU KIP tahun 2008 ini adalah penggunaan aplikasi *electronic goverment (e-goverment)* yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan pemerintahan yang lebih

mudah dan cepat dengan menggunakan situsinternet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan penerapan *e-government* di era keterbukaan informasi publik tersebut menjadi pilar penting dalam pemberantasan korupsi dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiridari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik No.14 tahun2008 dijelaskan bahwa Informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh pemerintah untuk diakses oleh masyarakat meliputi: (1) daftar informasi publik dibawah pengelolaannya; (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan publik; (3) kebijakan berikut dokumen pendukung; (4) rencana kerja proyek;(5) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; (6) kebijakan badan publik;(7) prosedur kerja pegawai; dan (8) laporan pelayanan akses informasi.

Penerapan *e-government* di era keterbukaan informasi publik tersebut salah satu faktor pendorong Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menerapkan perencanaan berbasis eletronik atau *e-planning* sebagai wujud transparansi di pemerintahan.

Pada aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingah semua data usulan dapat dikelola untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal sehingah memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta

memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin,SP.,MP selaku Camat Enrekang sebagai pengguna sistem *e-planning*.

“aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingga semua data usulan dapat dikelola untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal sehingga memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat”

Gambar 4.15

Tampilan Laporan Usulan Musrenbang

No	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	SKPD Tujuan Awal
1	Jumadi	Kepala Desa Cempa	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Membura, Kab. Enrekang	Cempa	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
2	Muh Salata	Kepala Desa Kaluppini	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	lapangan Sepakbola Belum Rata	dusun Tanah Doko, Kab. Enrekang	Kaluppini	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
3	Muh Salata	Kepala Desa Kaluppini	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	lapangan serbaguna perlu diperluas	dusun kajao, Kab. Enrekang	Kaluppini	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
4	Muh. Irfan, S.Pd	Kepala Desa Lembang	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Lanjutan pembangunan Lapangan sepakbola	Dusun Datte, Kab. Enrekang	Lembang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
5	Saim, Sp.Pd	Kepala Desa Ranga	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunana Lapangan Futsal Banua dan suppu	Dusun Tirowali,Ranga, Kab. Enrekang	Ranga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
6	Saim, Sp.Pd	Kepala Desa Ranga	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pengecoran Lapangan SDN 125 Datte Bola	Dusun Ranga, Kab. Enrekang	Ranga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata
7	H. Marsuki	Kepala Desa Rosoan	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	kurangnya kegiatan masyarakat	Desa Rosoan, Kab. Enrekang	Rosoan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga & Pariwisata

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Pada gambar diatas dapat dilihat tampilan laporan usulan musrenbang yang telah diinput oleh *operator e-planning* di tingkat kelurahan/desa. Hal ini bentuk transparansi terhadap masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan dari masyarakat terhadap usulan yang telah di input pada pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan/desa.Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator e-planning Bappeda Kabupaten Enrekang .

“masyarakat dapat melihat hasil inputan operator *e-planning* berupa laporan usulan musrembang sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat”

Pada aplikasi *e-planning* juga terdapat proses dokumentasi terhadap pokok pikiran dewan yang merupakan usulan yang berasal dari masyarakat dihimpun oleh Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Semua usulan tersebut telah di dokumentasikan oleh aplikasi *e-planning* dan di publikasikan di *website* resmi Kabupaten Enrekang. Hal ini sebagai bentuk transparansi kinerja anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan oleh Aswar Anas selaku Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

“kita dapat melihat hasil inputan pokok pikiran yang merupakan hasil dari inputan aplikasi *e-planning* di www.enrekangkab.go.id”

Gambar 4.16

Tampilan Laporan Pokok Pikiran Dewan

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urutan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan	Rekomendasi Setoran	Stat
01-02-2021	ASRUL ANNAS NASIR	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Pagar, Talud, Musholla, WC/Tolilet)	Talud Buttu sawah	Jalan Buttu Sawah, Kab. Enrekang, Puseeran	350 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Arahkan ke Dinas dan Sub Kegiatan yang jelas/ Jadikan Prioritas Koefisien: 350 Meter Anggaran : 500000000	Validasi Mi Bappeda
01-02-2021	ASRUL ANNAS NASIR	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Pagar, Talud, Musholla, WC/Tolilet)	Pembuatan Talud Sungai Mata Allo	Kelurahan Puseeran, Kab. Enrekang, Puseeran	300 Meter	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Arahkan ke Dinas dan Sub Kegiatan yang jelas/ Jadikan Prioritas Koefisien: 300 Meter Anggaran : 500000000	Validasi Mi Bappeda
01-02-2021	HAWA, S PI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Pagar, Talud, Musholla, WC/Tolilet)	PEMBANGUNAN BIRUJUNING TALUD BANGSAWAI-MARENA	Bubun Lamba BANGSAWAI-MARENA, Kab. Enrekang, Anggarja, Bubun Lamba	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Arahkan ke dinas dan sub kegiatan yang tepat Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Validasi Mi Bappeda
01-02-2021	ANDI ASWAN, SE	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Pagar, Talud, Musholla, WC/Tolilet)	PINJATAAN MASJID AL-HADIST CAKKE	cakke, Kab. Enrekang, Anggarja, Anggarja, Seluruh Kelurahan(Desa	1 PAKET	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Arahkan ke Dinas terkait dan Sub Kegiatan yang Tepat Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 100000000	Validasi Mi Bappeda
02-02-2021	DEDY ABRAR HAMDIR, S.kom	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pendidikan	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	perbaikan sekolah ts balombong	balombong, Kab. Enrekang, Baraka, Tirowali	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi : Prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	Validasi Mi Bappeda

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Pada gambar diatas dapat dilihat tampilan laporan usulan Pokok Pikiran Dewan telah diinput oleh para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Hal ini

bentuk transparansi terhadap masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan dari masyarakat terhadap usulan yang telah di input pada pelaksanaan reses di daerah pemilihannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang .

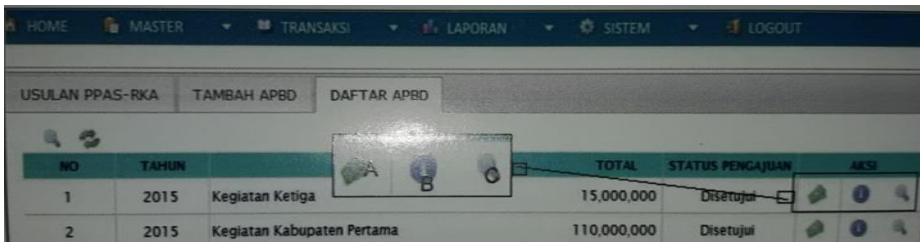
“Laporan usulan pokok pikiran dewan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat terhadap usulan yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Enrekang”

Informasi status usulan masyarakat dalam aplikasi *e-planning* dapat dilihat setelah proses musrembang selesai. Karena hal tersebut di kelolah oleh operator di tingkat perangkat daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah usulannya disetujui atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Informasi status usulan masyarakat dalam aplikasi *e-planning* dapat dilihat setelah proses musrembang selesai. Karena hal tersebut di kelolah oleh operator di tingkat perangkat daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah usulannya disetujui atau tidak”

Gambar 4.17

Form Tampilan Usulan



NO	TAHUN	KEGIATAN	TOTAL	STATUS PENGAJUAN	AKSI
1	2015	Kegiatan Ketiga	15.000.000	Disetujui	[Icons]
2	2015	Kegiatan Kabupaten Pertama	110.000.000	Disetujui	[Icons]

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Pada gambar diatas dapat dilihat tampilan laporan status usulan musrembang setelah terlaksan musrembang di tingkat kabupaten. Pada laporan ini masyarakat mengetahui status usulan apakah disetujui atau ditolak oleh perangkat daerah pengampu usulan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang.

“laporan ini masyarakat mengetahui status usulan apakah disetujui atau ditolak oleh perangkat daerah pengampu usulan tersebut”

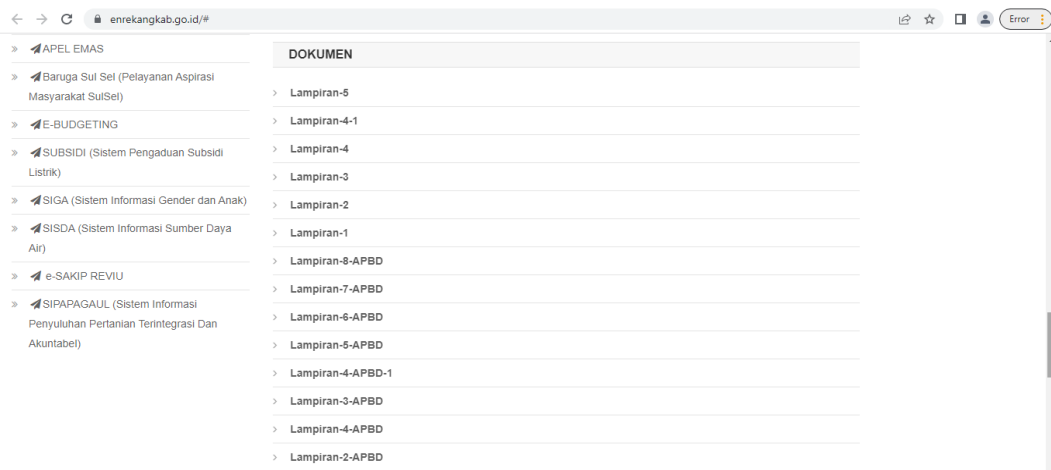
Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-planning* dilihat pada setiap usulan yang telah diinput dalam aplikasi akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan tahapan dari usulan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui usulannya telah sampai tahap tersebut atau di tolak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin, SE., M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-planning* dilihat pada setiap usulan yang telah diinput dalam aplikasi akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan tahapan dari usulan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui usulannya telah sampai tahap tersebut atau di tolak”

Pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang membantu dalam proses penyusunan dan publikasi anggaran agar mudah diakses oleh masyarakat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“Pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang membantu dalam proses penyusunan dan publikasi anggaran agar mudah diakses oleh masyarakat”.

Gambar 4.18
Tampilan Publikasi APBD



Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Pada gambar diatas dapat dilihat Pemerintah Kabupaten Enrekang mempublikasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui *web* resmi Kabupaten Enrekang berisi lampiran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kasfun Nur Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempublikasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui *web* resmi Kabupaten Enrekang berisi lampiran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

Aktualisasi Informasi pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari perbaharuan data setiap terjadi perubahan anggaran

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil dari laporan realisasi anggaran semua perangkat daerah yang dikelola menggunakan aplikasi *e-monev* yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang berisi laporan semua realiasi anggaran perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahun berjalan. Hal diungkapkan oleh oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“laporan realisasi anggaran semua perangkat daerah yang dikelola menggunakan aplikasi *e-monev* yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang berisi laporan semua realiasi anggaran perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahun berjalan”.

Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari perbaharuan informasi mengenai realisasi anggaran yang di *input* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang di laporkan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada setiap tahun yang berjalan. Hal diungkapkan oleh oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari perbaharuan informasi mengenai realisasi anggaran yang di *input* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang di laporkan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada setiap tahun yang berjalan”

Gambar 4.41

Tampilan Publikasi Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2021 KEADAAN BULAN APRIL - JUNI SUMBER DANA APBN, APBD I, APBD II, DAK & PEN													
KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA / DPA	BOBOT	REALISASI KEUANGAN (RP)		REALISASI (%)		TERTIMBANG %		PPTK/PELAKSANA	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)			FISIK	KEUANGAN	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK	KEUANGAN		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.600,000	0.3	20.478,400	82	99.41	0.24	0.29		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			20.600,000	0.3	20.478,400	82	99.41					
7.01.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	499,800	0.01	0	0	0	0	0		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			499,800	0.01	0	0	0					
7.01.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA PD	1 Dokumen	499,800	0.01	0	0	0	0	0		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			499,800	0.01	0	0	0					
7.01.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA PD	1 Dokumen	499,800	0.01	0	0	0	0	0		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			499,800	0.01	0	0	0					
7.01.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- PD	1 Dokumen	499,800	0.01	0	0	0	0	0		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			499,800	0.01	0	0	0					
7.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	1 Dokumen	500,000	0.01	0	0	0	0	0		SUNARTI LEWANG.A.Md	
	Belanja Operasi			500,000	0.01	0	0	0					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												

Sumber : Bappeda Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap para pemangku kepentingan selaku informan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai indikator dimensi transparansi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang. Hasil dari wawancara tersebut peneliti olah dengan menggunakan NVIVO 12 untuk melihat jumlah determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Persentase Wawancara Pada dimensi Transparansi

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Masyarakat	10	10	3,21
Aplikasi	8	9	2,88
Anggaran	8	6	1,92
Informasi	9	6	1,92
Planning	8	5	1,60
Aktualisasi	11	3	0,96

Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya para narasumber menginginkan aplikasi *e-planning* dapat memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten Enrekang.

Gambar 4.42

Hasil Word Cloud Dimensi Transparansi

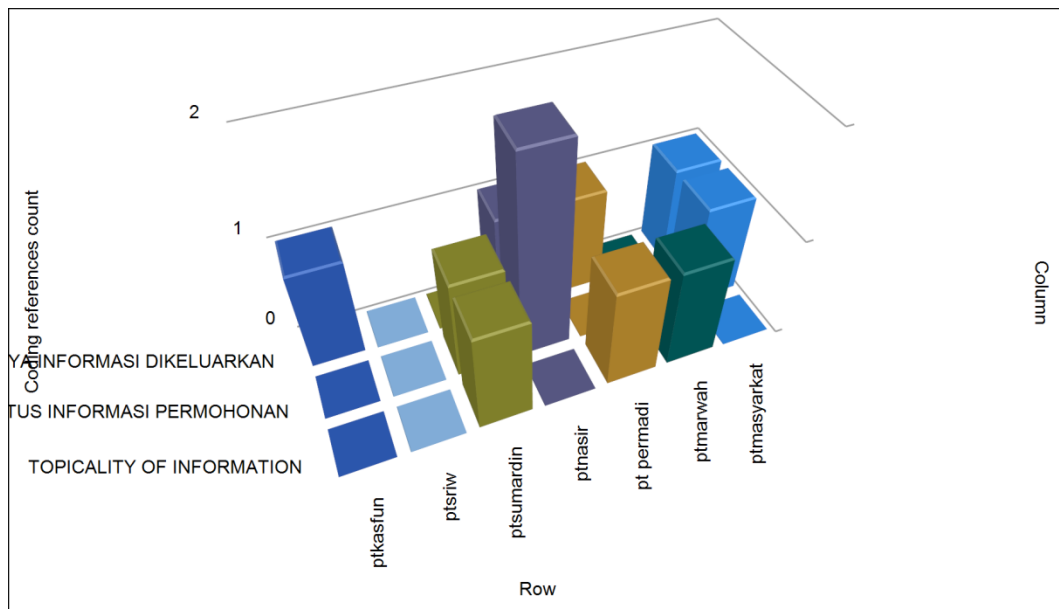


Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus didapatkan hasil yaitu masyarakat, informasi, *planning* dan anggaran menjadi paling banyak dibicarakan dalam wawancara pada dimensi transparansi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat semua narasumber dapat mengerti dengan pembahasan mengenai dimensi transparansi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil *matrix coding* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.27

Hasil *Matrix Coding* pada Dimensi Transparansi



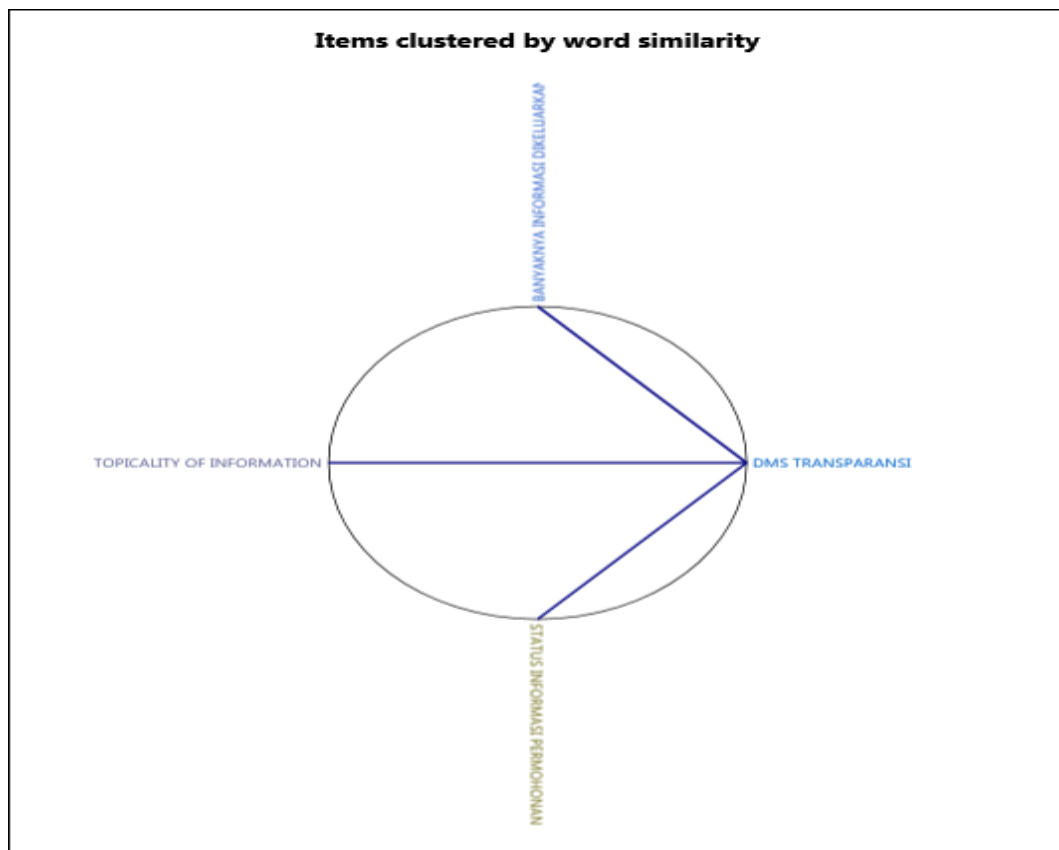
Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi transparansi pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan

informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analysis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.27

Hasil *Cluster Analisis* pada Dimensi Transparansi



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi partisipasi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan.

Sehinggah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

2.5 Dimensi Manejemen Perubahan pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang

Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi. Apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, diantaranya: strategi pengembangan, kualitas kontrol dan review serta keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

Pengembangan aplikasi dalam rangka memodernisasikan dan menyesuaikan kebutuhan sistem daerah yang digunakan dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang sangat perlu dilakukan, terutama pengembangan pada sistem pengajuan data perencanaan pembangunan yang dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan kepada OPD terkait serta dapat lebih mempermudah berbagai proses penginputan data terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Enrekang yang dimulai dari kecamatan sampai dengan Bappeda Kabupaten Enrekang dan OPD lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pengembangan aplikasi dalam rangka memodernisasikan dan menyesuaikan kebutuhan sistem daerah yang digunakan dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang sangat perlu dilakukan, terutama pengembangan pada sistem pengajuan data perencanaan pembangunan yang dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan dalam

rangka memberikan kemudahan kepada OPD terkait serta dapat lebih mempermudah berbagai proses penginputan data terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Enrekang yang dimulai dari kecamatan sampai dengan Bappeda Kabupaten Enrekang dan OPD lainnya”

Pengembangan aplikasi terhadap *e-planning*, seperti pengembangan aplikasi sistem layanan, fitur tampilan, pengembangan program, pengembangan aplikasi sistem data dan lain sebagainya, pengembangan aplikasi terhadap berbagai sistem tersebut telah dilakukan oleh pihak Bappeda, BKAD dan Diskominfo Kabupaten Enrekang melalui bagian/bidang yang secara langsung telah ditunjuk dan memiliki tugas dalam melakukan pengembangan aplikasi terhadap sistem yang ada. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

Pengembangan aplikasi terhadap *e-planning*, seperti pengembangan aplikasi sistem layanan, fitur tampilan, pengembangan program, pengembangan aplikasi sistem data dan lain sebagainya, pengembangan aplikasi terhadap berbagai sistem tersebut telah dilakukan oleh pihak Bappeda, BKAD dan Diskominfo Kabupaten Enrekang melalui bagian/bidang yang secara langsung telah ditunjuk dan memiliki tugas dalam melakukan pengembangan aplikasi terhadap sistem yang ada.

Pengembangan sistem *e-planning* yang dilakukan oleh Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang di latar belakang oleh beberapa hambatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang di hadapi operator – operator sistem *e-planning* dan OPD terkait. Hal ini sangat menghambat proses penginputan data perencanaan dimana data yang diinput tidak sedikit, selain itu sistem *e-planning* BPPT tidak bisa di modifikasi sesuai dengan kebutuhan operator, maka dari itu Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang mencari solusi dengan

melakukan pengembangan sistem perencanaan elektronik. Hal diungkapkan oleh Marwah M, S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pengembangan sistem *e-planning* yang dilakukan oleh Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang di latar belakang oleh beberapa hambatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang di hadapi operator – operator sistem *e-planning* dan OPD terkait. Hal ini sangat menghambat proses penginputan data data perencanaan dimana data yang diinput tidak sedikit, selain itu sistem *e-planning* BPPT tidak bisa di modifikasi sesuai dengan kebutuhan operator, maka dari itu Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang mencari solusi dengan melakukan pengembangan sistem perencanaan elektronik”

Pelaksanaan pengembangan sistem *e-planning* di instruksikan pula oleh KPK yang bertujuan untuk memudahkan kepada OPD yang menangani sistem *e-planning* dan proses perencanaan pembangunan daerah serta penganggarannya bisa diakses lebih mudah. Sebelum Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang melakukan pengembangan sistem *e-planning* , Bappeda Kabupaten Enrekang melakukan pertemuan dengan BPPT yang membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh operator dan OPD di Kabupaten Enrekang.

Hasil dari pertemuan Bappeda Kabupaten Enrekang dengan BPPT terkait sistem *e-planning* yaitu Bappeda dibantu oleh Diskominfo Kabupaten Enrekang akan bekerja sama dengan Pemerintah Banyuwangi dalam pengembangan sistem *e-planning*. Alasan Bappeda Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan Pemerintah Banyuwangi yaitu karena sistem yang dimiliki oleh Pemerintah Banyuwangi untuk saat ini merupakan sistem *e-planning* yang terbaik dan di akui oleh KPK. Selain itu sistem *e-planning* yang dimiliki oleh Pemerintah

Banyuwangi ini dapat di peroleh dengan gratis atau tidak adanya biaya sewa seperti sistem *e-planning* BPPT yang setiap tahunnya harus membayarsewa dan sistem *e-planning* Bappeda Banyuwangi dapat dengan mudah di modifikas sesuai dengan kebutuhan yang berubah – ubah.

Hal tersebut sebagaimana seperti yang di kemukakan oleh Ibu Sri Wahyuni,S.Kom selaku Kasubid PerencanaanMakro Bappeda Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Pengembangan sistem *e-planning* memang ada dan sedang dilakukan dan sudah tahapakhir atau penyelesaian. Dilakukannya pengembangan sistem ini karena suatu hal teknis dan kebijakan dari pimpinan, selain itu agar memudahkan dalam menghitung persentase keberhasilan perencanaan melalui *e-planning*. Kami dalam pengembangan sistem *e-planning* bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Enrekang dan Pemerintah Banyuwangi. Pada saat ini kami menggunakan sistem *e-planning* dari BPPT, alasan kami mengembangkan sistem ini karena mengalami kesulitan-kesulitan secara teknis yang menghambat proses kerja kami. Maka dari itu Kabupaten Enrekang melakukan pengembangan sistem *e-planning* sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan dan menggunakan sistem *e-planning* dari Pemerintah Banyuwangi yang mudah di modifikasi sesuai kebutuhan daerah ”.

Hal senada diungkapkan oleh ibu Rismawati selaku Kepala Bidang Telematika Diskominfo Kabupaten Enrekang :

“Sebelumnya Kabupaten Enrekang menggunakan sistem informasi perencanaan atas dasar instruksi dari KPKawalnya mengarahkan menggunakan sistem yang sudah di kembangkan oleh BPPT dan bekerja sama dengan BPPT. Seiring dengan berjalannya waktu ternyata pengaplikasian sistem yang dari bppt ini sangat sulit untuk dikembangkan, karena kebutuhan daerah berbeda setiap bulan atau minggunya berubah dan

sistem *e-planning* BPPT sulit di custom. Selama masih kerjasama dengan BPPT, Kominfo pun bekerja sama dengan banyuwangi karena sistem di banyuwangi memberikan aplikasinya full dengan gratis sedangkan BPPT memberikan kepada kita dan membayar setiap tahun tanpa kita tidak bisa memodifikasi dengan bebas sedangkan banyuwangi gratis”.

Pengembangan aplikasi memang sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengembangan aplikasi terhadap sistem, berbagai hal yang dilakukan terutama dalam hal penginputan data dapat diakses dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan admin atau operator sistem terpenuhi. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku Operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

“Pengembangan sistem memang perlu dilakukan dan itu sangat penting dan sesuai kebutuhan operator dan admin sistem *e-planning*. Sebenarnya sistem ini sudah cukup baik namun sistem *e-planning* dari BPPT ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya sebagai operator. Untuk saat ini sistem *e-planning* pun sedang dalam tahap pengembangan yang bekerja sama dengan Diskominfo dan Bappeda Banyuwangi, mungkin secepatnya akan selesai pengembangan sistem ini karena akan dipakai untuk perencanaan pembangunan tahun depan”.

Selain itu juga mengenai pengembangan aplikasi yang dilakukan, terutama dalam berbagai sistem aplikasi yang ada dan pada sistem pengolahan datanya ataupun pengembangan aplikasi juga sudah dilakukan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Muftah selaku Teknisi *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang

”Pengembangan sistem sistem *e-planning* itu sudah ada dan sedang dilakukan oleh kami dengan Bappeda yang bekerja sama dengan pemerintah Banyuwangi. Untuk sekarang ini pengembangan data pada sistem sistem *e-planning* sudah sampai dengan perpindahan data sistem *e-planning* BPPT kepada sistem *e-planning* Banyuwangi. Kami

mengharapkan proses pengembangan ini selesai sebelum periode penginputan data perencanaan agar sistem yang baru dapat digunakan oleh operator”.

Dari hasil wawancara dengan berbagai sumber informan dapat diketahui bahwa pengembangan aplikasi yang dilakukan terhadap berbagai sistem *e-planning* ini sedang dilakukan dan sudah dalam tahap akhir. Dilakukannya pengembangan dalam sistem *e-planning* ini dilatar belakangi oleh tidak sesuainya sistem sistem *e-planning* dari BPPT dengan kebutuhan sistem *e-planning* yang di setiap periodenya berubah dan sulit di modifikasi oleh operator sistem *e-planning* dan dapat terhitungnya persentase keberhasilan perencanaan melalui sistem sistem *e-planning*. Sebelum dilakukannya pengembangan sistem *e-planning* ini pihak Bappeda Kabupaten Enrekang melakukan pertemuan dengan pihak BPPT terkait permasalahan yang dihadapi oleh operator sistem *e-planning* dan OPD terkait, hasil dari pertemuan dengan BPPT dalam pengembangan sistem sistem *e-planning* ini pihak Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan Bappeda Banyuwangi karena sistem *e-planning* di banyuwangi merupakan sistem terbaik untuk saat ini dan diakui oleh KPK, selain itu juga memberikan aplikasi sepenuhnya tanpa harus membayar aplikasi tersebut dan sistem sistem *e-planning* banyuwangi mudah di modifikasi yang nanti nya dapat memenuhi kebutuhan operator sistem *e-planning* yang selalu berubah.

Proses pengembangan sistem *e-planning* pun sudah sampai tahap akhir yaitu pada tahap perpindahan data sistem *e-planning* BPPT kepada sistem *e-planning* Banyuwangi. Dengan adanya pengembangan sistem *e-planning* ini menjadikan proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan sistem *e-*

planning dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini diungkapkan oleh ibu Rismawati selaku Kepala Bidang Telematika sebagai berikut :

Proses pengembangan sistem *e-planning* pun sudah sampai tahap akhir yaitu pada tahap perpindahan data sistem *e-planning* BPPT kepada sistem *e-planning* Banyuwangi. Dengan adanya pengembangan sistem *e-planning* ini menjadikan proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan sistem *e-planning* dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap para pegawai di Bappeda Kabupaten Enrekang, terutama untuk pegawai yang khusus menangani pengoprasian sistem *e-planning* sudah dilakukan, baik yang di adakan oleh BPPT melalui Bappeda. Jenis pelatihannya pun bermacam-macam seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan dan Sosialisasi Perencanaan dan Anggaran, Pelatihan Operator, dan sebagainya. Pelatihan yang diadakan oleh Bappeda yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dan seluruh operator yang berada di Kabupaten, selain itu Bappeda pun melakukan sosialisasi dan pengembangan kompetensi juga kepada seluruh OPD di Kabupaten Enrekang karena sistem *e-planning* tidak saja mencakup Bappeda beserta operator seluruh Kecamatan tetapi berhubungan dengan seluruh OPD di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kasubid Monev dan Pelaporan di Bappeda Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Pelatihan dan pengembangan kompetensi pasti ada dan dilakukan oleh setiap instansi kepada pegawainya. Kami pun seperti itu melakukan pelatihan kepada pegawai dan operator terkait sistem *e-planning* seperti bimbingan teknis (bimtek), pelatihan dan sosialisasi perencanaan dan anggaran, pelatihan operator, dan sebagainya”.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan dan diberikan kepada pegawai/operator dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pegawai/operator di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin bahkan masih cukup sering dilakukansetiap terjadi pembaharuan sistem oleh Bappeda Kabupaten Enrekang ataupun pihak yang terkait pemeliharaan atau pengembangan sistem *e-planning*. Hal ini menyebabkan operator – operator *e-planning* dapat paham atau menguasai pengaksesan pada sistem *e-planning*, sedangkan operator *e-planning* memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan sistem *e-planning* ini.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kabid Litbang Monev dan Perencanaan Makro di Bappeda, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Mengenai adanya pelatihan dan pengembangan, hal itu memang sudah dilakukan dari BPPT melalui pihak Bappeda Kabupaten Enrekang seperti bimbingan teknis, pelatihan operator dan lain lain. Namun dalam pelaksanaannya pelatihan tersebut rutin dilakukan setiap periode/tahunnya, waktunya pun tidak menentu kadang beberapa bulan sekali bahkan setahun sekali tergantung pembaharuan aplikasi. Sehingga hal tersebut saya rasa sudah cukup memenuhi kebutuhan operator”.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat diperlukan untuk menjadi seorang operator *e-planning*. Karena operator disini sangat berperan penting dalam proses penyusunan perencanaan pada tahap awal sampai pada tahap akhir, dimana operator *e-planning* ini akan memasukan data perencanaan pembangunan kedalam sistem *e-planning*. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara tidak menentu setiap tahunnya dan terkadang pelatihan yang dilakukan

hanya ketika ada aturan baru atau ada peluncuran aplikasi baru saja. hal tersebut kepada Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro, dan mengungkapkan sebagai berikut :

“Pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat diperlukan untuk menjadi seorang operator *e-planning*. Karena operator disini sangat berperan penting dalam proses penyusunan perencanaan pada tahap awal sampai pada tahap akhir, dimana operator *e-planning* ini akan memasukan data perencanaan pembangunan kedalam sistem *e-planning*. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara tidak menentu setiap tahunnya dan terkadang pelatihan yang dilakukan hanya ketika ada aturan baru atau ada peluncuran aplikasi baru saja”

Hal ini membuat operator *e-planning* kecamatan di kabupaten Enrekang dapat memahami sistem *e-planning* sehingga proses penginputan data terkait perencanaan pembangunan dari mulai perencanaan di kecamatan sampai dengan perencanaan Kabupaten di Bappeda Kabupaten Enrekang dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Apabila suatu perencanaan Apabila suatu perencanaan tertinggal dan tidak terinput ke dalam sistem maka operator harus mendatangi dan mengajukan perencanaan kepada Bappeda, itu pun jika Bappeda mengijinkan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh operator *e-planning* dari Kecamatan Cendana yaitu ibu Hasna, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Untuk pelatihan terkait *e-planning* pernah diadakan oleh Bappeda pada awal sistem ini akan diterapkan, pelatihannya itu lebih ke praktek cara menggunakan sistem sistem *e-planning* ini seperti contohnya memasukan data perencanaan ke dalam sistem. dengan praktek dan pelatihan saya dapat mengerti dengan sistem”.

Hal senada pun diungkapkan oleh operator sistem *e-planning* dari Kecamatan Baraka yaitu bapak yasmin :

“Pelatihan atau bimtek terkait sistem *e-planning* itu pertama awal tahun 2018 dan beberapa bulan yang lalu, untuk pelatihan pada awal tahun itu seluruh operator kecamatan melakukan praktek perencanaan menggunakan sistem *e-planning* dan untuk pelatihan beberapa bulan yang lalu sih lebih ke pelatihan biasa terkait sumber daya manusianya. Saya rasa untuk pelatihan dan praktek *e-planning* ini semua operator langsung memahami sistem ini termasuk saya”.

Selain dari operator Kecamatan Baraka dan operator Kecamatan Cendana yang merasa cukupnya pelatihan dan pengembangan sdm kepada operator adapula dari kecamatan Maiwa yaitu ibu Syamsinar yang mengungkapkan sebagai berikut

“saya pernah mengikuti pelatihan sdm terkait *e-planning*. Pelatihan dan pengembangan sdm seperti saya sebagai operator sistem *e-planning* di kecamatan dinilai sudah cukup paham, karena saya sebagai operator masih sudah mengerti dengan sistem ini. Adapun kalo saya tidak mengerti saya memang langsung menanyakan kepada operator *e-planning* di kecamatan lain atau ke bappeda nya langsung, sehingga semua proses perencanaan daerah dapat berlangsung cepat dan tanpa kendala sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa informan, dapat diketahui bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan terhadap pegawai dan seluruh operator sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh BPPT melalui Bappeda sudah sering dilakukan. Berkas seringnya diadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mereka peroleh. Sehingga, mereka dapat memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan kompetensi mereka mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan bidang yang sedang mereka tekuni, sehingga pengetahuan dan kemampuan pegawai atau operator dalam menguasai sistem *e-planning* dapat berkembang

sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi pegawai atau operator sistem *e-planning* sehingga proses perencanaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien

Berdasarkan pengamatan terjadi peningkatan keterlibatan dan motivasi dari pegawai dalam menjalankan sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang setelah proses pengembangan dilaksanakan karena dalam proses pengembangan ini membuat proses kerja dalam sistem *e-planning* menjadi singkat dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“terjadi peningkatan keterlibatan dan motivasi dari pegawai dalam menjalankan sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang setelah proses pengembangan dilaksanakan karena dalam proses pengembangan ini membuat proses kerja dalam sistem *e-planning* menjadi singkat dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan”

Pada sistem *e-planning* Pemerintah kabupaten Enrekang, Bappeda Kabupaten Enrekang melakukan kontrol terhadap hasil inputan usulan, Kegiatan strategis yang menjadi prioritas nasional serta menentukan batas waktu input aplikasi *e-planning* dan melakukan pemeriksaan ulang terkait usulan kegiatan dan anggaran dari unit terkait melalui aplikasi *e-planning*. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin, SE., M. AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Pada sistem *e-planning* Pemerintah kabupaten Enrekang, Bappeda Kabupaten Enrekang melakukan kontrol terhadap hasil inputan usulan, Kegiatan strategis yang menjadi prioritas nasional serta menentukan batas waktu input aplikasi *e-planning* dan melakukan pemeriksaan ulang terkait usulan kegiatan dan anggaran dari unit terkait melalui aplikasi *e-planning*”.

Pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah kabupaten Enrekang, Badan Pengelolah keuangan dan Aset Kabupaten Enrekang melakukan kontrol terhadap hasil perencanaan anggaran yang telah di input di sistem *e-planning* oleh Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi rencana kerja anggaran. Hal ini Bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses perencanaan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Permadi Hasan selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Enrekang, beliau mengungkapkan :

Pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah kabupaten Enrekang, Badan Pengelolah keuangan dan Aset Kabupaten Enrekang melakukan kontrol terhadap hasil perencanaan anggaran yang telah di input di aplikasi *e-planning* oleh Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi rencana kerja anggaran. Hal ini Bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses perencanaan.

Aplikasi *e-monev* bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran dan kinerja perangkat daerah di Pemerintah kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Enrekang rutin melakukan kontrol dan pengawasan terhadap hasil laporan perangkat daerah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan laporan. Hal diungkapkan oleh Marwah M,S.Si selaku Kepala Sub Bagian Monev dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“Aplikasi *e-monev* bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran dan kinerja perangkat daerah di Pemerintah kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Enrekang rutin melakukan kontrol dan pengawasan terhadap hasil laporan perangkat daerah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan laporan.”

Pelaksanaan kontrol dan pengawasan terhadap sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses perencanaan dan pelaporan sehingga proses tersebut dapat berjalan singkat dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Nasir selaku operator *e-planning* Bappeda Kabupaten Enrekang:

“Pelaksanaan kontrol dan pengawasan terhadap sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses perencanaan dan pelaporan sehingga proses tersebut dapat berjalan singkat dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan”

Berdasarkan wawancara peneliti telah lakukan terhadap informan peneliti yaitu beberapa pemangku kepentingan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai mengenai indikator dimensi manajemen perubahan pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang. Hasil dari wawancara tersebut peneliti olah menggunakan NVIVO 12 untuk melihat jumlah determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat di tabel berikut ini :

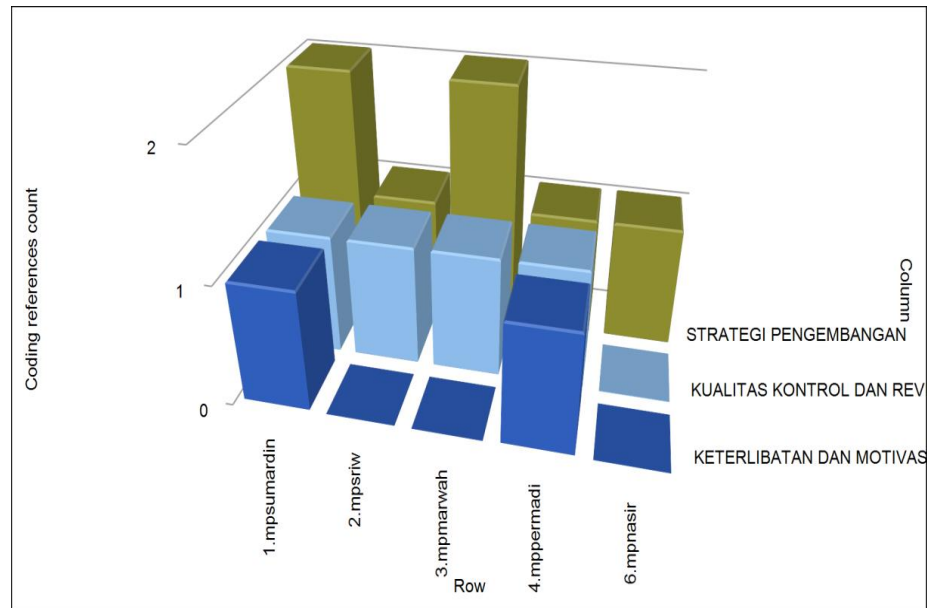
Tabel 4.5 Persentase Wawancara Pada Dimensi Manajemen Perubahan

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Planning	8	26	3,36 %
Pengembangan	12	25	3,23 %
Enrekang	8	17	2,20 %
Kabupaten	9	17	2,20 %
Operator	8	12	1,55 %
Pelatihan	9	10	1,29 %
Perencanaan	11	10	1,29 %

Sumber : Nvivo 12 Plus

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya para narasumber memerlukan pengembangan dalam bentuk pelatihan terhadap operatornya serta peningkatan kualitas terhadap perangkat pada sistem *e-planning* di kabupaten Enrekang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan dalam proses perencanaan.

Gambar 4.27

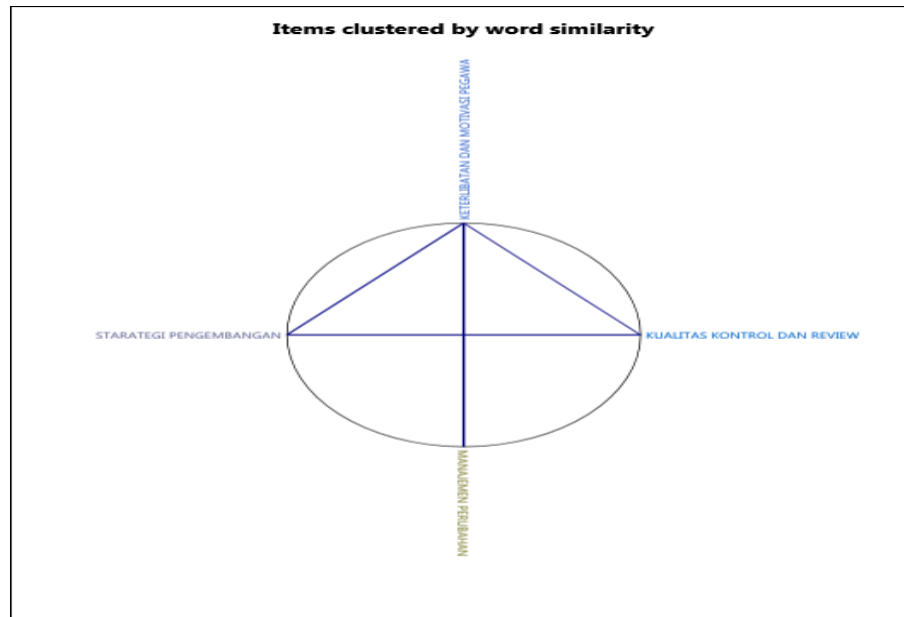
Hasil *Matrix Coding* pada Dimensi Manajemen Perubahan

Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi manajemen perubahan pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analisis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.27

Hasil *Cluster Analisis* pada Dimensi Manajemen Perubahan



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi partisipasi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton yang terdapat lima dimensi *Balanced E-Government* dari wawancara tersebut peneliti olah dengan menggunakan NVIVO 12 untuk melihat determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Persentase Wawancara Lima Dimensi IT BSC Pada Implementasi
Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang

WORD	LENGTH	COUNT	WEIGHTED PERCENTAGE (%)
Planning	8	103	2,27 %
Aplikasi	8	77	1,70 %
Enrekang	8	65	1,43 %
Kabupaten	9	65	1,43 %
Anggaran	8	50	1,10 %
Perencanaan	11	49	1,08 %
Masyarakat	10	47	1,04 %
Perangkat	9	39	0,86 %
Pengembangan	12	36	0,79 %
Pembangunan	11	31	0,68 %

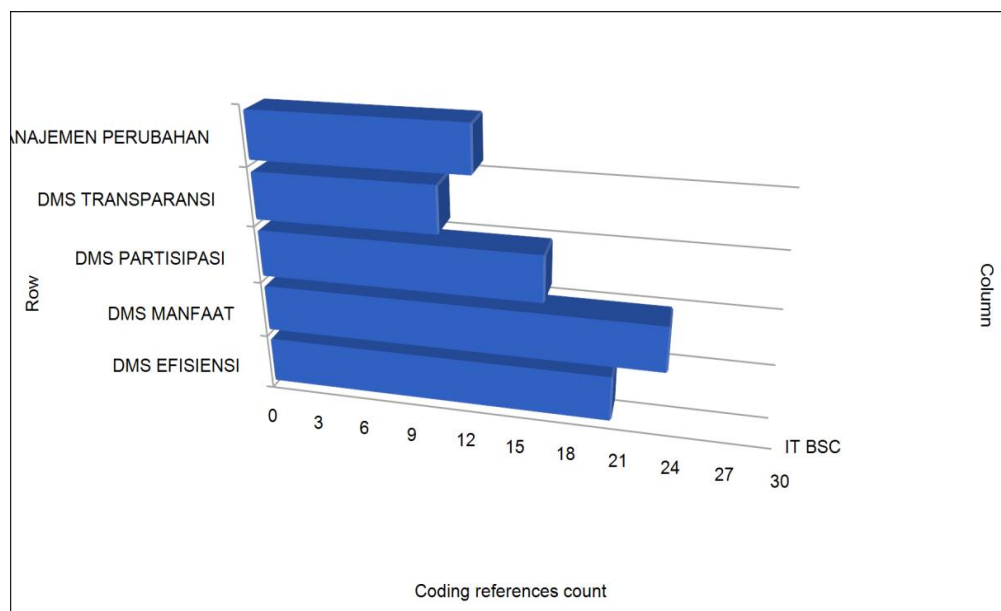
Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya para narasumber mengungkapkan bahwa sistem perencanaan berbasis eletronik atau *e-planning* di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu proses perencanaan hingga penganggaran sehingga menjadi lebih efisien, akuntabilitas dan transparan bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sistem perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang atau *e-planning* terus

Menerapkan *E-Government* pada implementasi perencanaan berbasis elektronik. hal tersebut dapat dilihat dari hasil *matrix coding* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.27

Hasil *Matrix Coding* pada lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard*

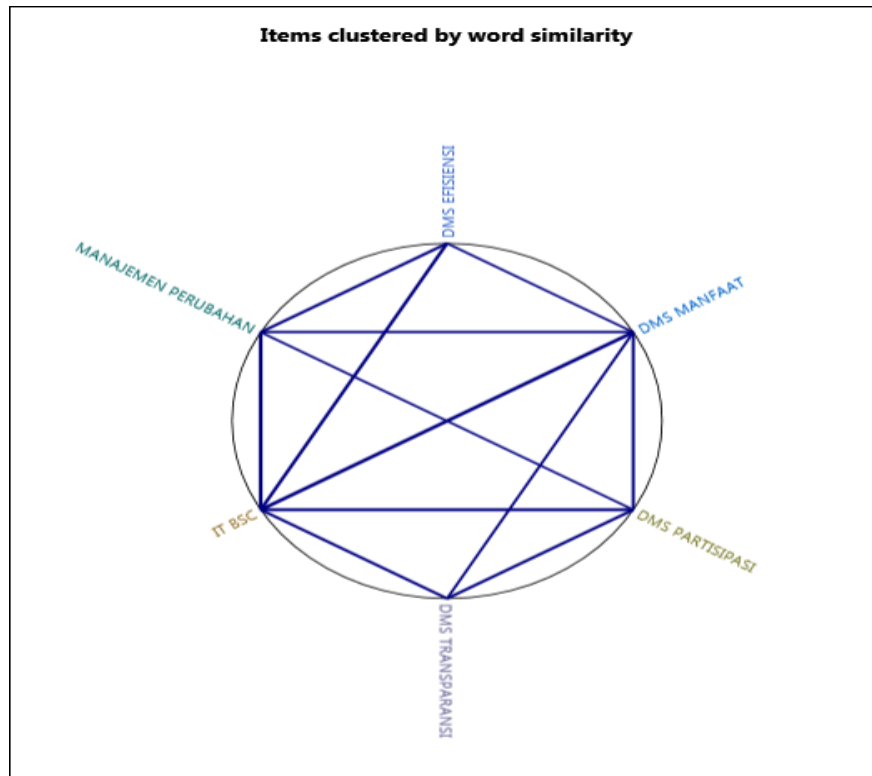


Sumber : Nvivo 12 Plus

Sedangkan keterkaitan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber mengenai topik pembahasan mengenai dimensi manajemen perubahan pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa semua narasumber yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *cluster analisis* dari pengelolaan data wawancara kepada narasumber menggunakan aplikasi Nvivo. Seperti gambar berikut :

Gambar 4.34

Hasil *Cluster Analisis* pada lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard*



Sumber : Nvivo 12 Plus

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara kepada narasumber mengenai dimensi partisipasi pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber bernilai benar.

B. Pembahasan

Apabila di masa lalu konsep *e-government* lebih merujuk kepada komputerasi dan pengembangan Sistem Informasi yang berbasis komputer, konsep *e-government* yang berkembang sekarang di Indonesia mengarah kepada integrasi data dan informasi antar lembaga pemerintah melalui teknologi Internet dengan perangkat lunak yang berbasis *web*. Dengan demikian hampir bisa dipastikan bahwa rujukan tentang *e-government* selalu mengarah kepada upaya pembuatan *website* oleh lembaga pemerintah.

Kinerja pelayanan publik berbasis *e-government* di Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan penelitian pelayanan modern dengan dasar *online* karena teknologi merupakan bentuk perkembangan jaman. Seluruh masyarakat dunia dipaksa membuka pandangan pada perubahan teknologi yang sedemikian cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik. Keberadaan teknologi diharapkan menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan dan dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam hal pelayanan publik berbasis online atau dengan kata lain *Eletronic Government*. Berbicara mengenai pelayanan berbasis online pasti mengenal teori *Balanced E-Goverment Scorecard* membahas beberapa dimensi seperti Dimensi Manfaat, Dimensi Efisiensi, Dimensi Partisipasi, Dimensi Transparansi dan Dimensi Manajemen Perubahan. Dimana dari kelima dimensi *Balanced E-Goverment Scorecard* tersebut dapat membahas hal-hal berkaitan dengan pelayanan berbasis online di sektor publik khususnya Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Maka, dimensi *Balanced E-Government Scorecard* fokus pembahasannya lebih luas, bukan hanya menekankan pada fenomena yang berhubungan tentang pelayanan pengadministrasian melainkan pembahasan yang berkaitan dengan manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen perubahan dalam pelayanan publik. Sehingga sasaran dalam pelayanan publik bukan hanya menyelesaikan permasalahan pelayanan publik melainkan bagaimana publik tersebut dapat berjalan dengan mudah sesuai dengan kemajuan teknologi dan membuka pandangan mengenai teknologi berbasis online agar dapat setara dengan negara-negara di dunia yang perkembangannya sangat cepat tentang teknologi. Seperti yang diterapkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Presiden Republik Indonesia, Menimbang :

- a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *egovernment*;

- d. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional.

Dari rumusan di atas sudah jelas bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governace*) diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-goverment* agar kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatanya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Sehingga, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-goverment*) akan meningkatkan Akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, transparansi dan responsivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi *e-planning* merupakan bentuk pelayanan berbasis *e-government* dan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Serta Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang penerapan Aplikasi *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Pak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kabid Litbang, Monev dan Perencanaan Makro Bappeda Kabupaten Enrekang, yaitu :

“pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 262 itu kan dijelaskan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan. La disitu kita ngomong transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel itu tidak ada kata lain selain kita menggunakan alat, menggunakan alat bantu kalau kita menggunakan manual hal tersebut sulit dilaksanakan. Sehingga, kita harus beranjak ke *e-planning*”

Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang menyatakan bahwasanya dalam rencana pembangunan harus menyangkut beberapa point yang terdiri dari:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan , dan rahasia negara.
- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Melihat isi dari salah satu pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta hasil wawancara dari Kabid Litbang Monev dan Perencanaan Makro BAPPEDA Kabupaten Enrekang dapat

dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan haruslah memenuhi beberapa poin yang didalamnya termasuk transparansi, responsif, efisien, efektif. Dimana dalam proses tersebut transparansi, responsif, efektif, efisien akan sulit tercapai apabila tidak menggunakan alat atau masih bekerja secara manual, maka sangat dibutuhkan suatu alat berupa aplikasi *e-planning*.

Pada penelitian Implementasi Perencanaan Berbasis Elektronik di Kabupaten Enrekang peneliti menggunakan teori *Balanced E-Government Scorecard* sebagai dasar acuan peneliti melakukan penelitian agar dapat mengetahui kinerja pelayanan berbasis online. Teori *Balanced E-Government Scorecard* memiliki lima dimensi seperti dimensi manfaat, dimensi efisiensi, dimensi transparansi, dimensi transparansi dan dimensi manajemen perubahan. Dari kelima dimensi tersebut dapat diartikan untuk mengetahui mengenai kinerja pelayanan berbasis online dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur dan faktor lain yang perlu di perbaharui.

Pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada Kinerja Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Enrekang. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dan observasi lapangan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan tujuh informan yaitu : Kabid Litbang Monev dan Perencanaan Makro, Kasubid Perencanaan Makro, Kasubid Monev dan Pelaporan, Kabid Anggaran, Kasubid Penyusunan APBD, Operator e-

planning dan masyarakat mengenai proses perencanaan berbasis eletronik. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan lima jenis dimensi dari teori *Balanced E-Goverment Scorecard* yaitu dimensi manfaat, dimensi efisiensi, dimensi partisipasi, dimensi transparansi dan dimensi manajemen perubahan yang sudah paparkan dari hasil penelitian, kemudian peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti gunakan sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Dimensi Transparansi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada pendapat Yulianto (2005), yaitu sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, ketersediaan informasi, keterbukaan keputusan dan kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa.

Transparansi menurut Ahmad (2012) adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Enrekang proaktif memberikan informasi lengkap tentang proses perencanaan. Pemerintah daerah mendayagunakan berbagai jalur

komunikasi seperti media *website*. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Rutin mengadakan kegiatan publikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan perencanaan.

Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: Kejelasan sistem dan prosedur layanan, ketersediaan informasi, keterbukaan keputusan, kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan telah sesuai dengan ketentuan serta kejelasan hak dan kewajiban bagi para pengguna.

Berdasarkan indikator tersebut serta berdasarkan hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan nvivo 12 maka didapatkan potongan hasil wawancara pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Transparansi

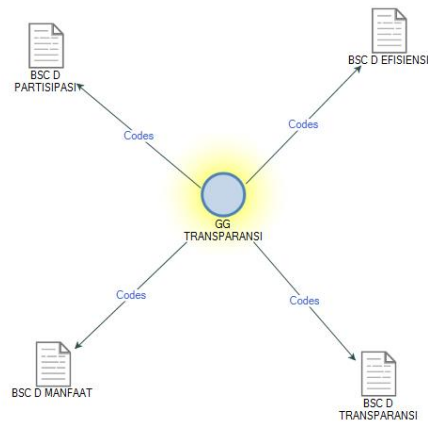
<p>Reference 1 - 1,76% Coverage</p> <p>“<i>e-planning</i> atau <i>electronic planning</i> (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. <i>e-planning</i> sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan <i>e-planning</i> di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.</p>
<p>Reference 2 - 2,60% Coverage</p> <p>”Perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>e-planning</i> (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>online</i> dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan</p>

<p>pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga <i>e-planning</i> mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi <i>e-planning</i> secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang. sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.</p>
<p>Reference 7 - 2,59% Coverage</p> <p>“<i>e-planning</i> berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi <i>e-planning</i> ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. <i>E-planning</i> menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat <i>progres</i> usulan”</p>
<p>Reference 2 - 2,52% Coverage</p> <p>terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi <i>e-planning</i>. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi <i>e-planning</i> Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulanya”.</p>

Sumber : Nvivo 12

perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

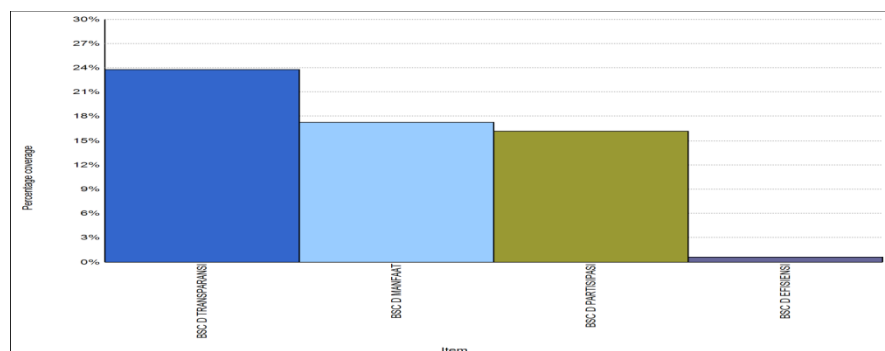
Gambar 4. Tampilan *Explore Diagram* Pada dimensi Transparansi



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi transparansi didapatkan hasil bahwa referensi dari dimensi transparansi berasal dari dimensi partisipasi, dimensi efisiensi, dimensi manfaat dan dimensi transparansi pada *IT Balanced E-Government Scorecard*. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.37 Percentage Coverage Pada Dimensi Transparansi



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Transparansi di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada dimensi transparansi sekitar 24 % dan dimensi lainnya yaitu dimensi manfaat, dimensi partisipasi serta dimensi efisiensi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas *database* dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada, maupun prosedur pengajuan usulan.

Aplikasi *e-planning* memiliki Standar Operasional tersendiri diantaranya operator yang terdapat di OPD harus memahami unit kerjanya dan menguasai penggunaan teknologi informasi. Penyiapan server dan jaringan juga dibutuhkan untuk menunjang penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang. Serta diperlukan adanya pengenalan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis agar *user/operator* dari seluruh OPD di Kabupaten Enrekang yang menggunakan aplikasi ini dapat mengoperasikan dengan baik.

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Tujuan Undang-undang No. 14 tahun 2008 dijelaskan bahwa menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan, serta mengetahui alasan kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam hal keterbukaan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Enrekang berpedoman pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 .Hal tersebut menurut Bapak Permadi Hasan,SE.,M.AP Selaku Kabid Anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

“APBD Pemerintah Kab.Enrekang sudah terbuka dan di unggah dalam portal data Kabupaten Enrekang, namun hanya sampai pada lampiran 4 yaitu program dan kegiatan tidak sampai pada rincian RKA karena masih menjadi pertimbangan. Karena dalam Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik diserahkan ke masing-masing daerah, ada konsekuensi ketika membuka secara rinci karena untuk menghindari penyalahgunaan data.”

Dengan ada atau tidak adanya *e-budgeting* APBD tetap di publikasi pada portal laman Pemerintah Kabupaten Enrekang. Namun, Aplikasi *e-budgeting* membuat proses tersebut proses tersebut menjadi lebih efektif dan transparan . Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kasfun Nur Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

“Dari dulu publikasi APBD tidak tergantung pada *e-budgeting*, karena itu hanya *tools*, karenapada peraturannya setiap RAPBD harus disosialisasikan melalui media massa, dan dipublikasikan ketika sudah menjadi APBD melalui web.Namun, Aplikasi *e-budgeting* membuat proses tersebut menjadi lebih efisien dan transparan”

Hasil dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan Pemerintah Kab. Enrekang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Ada atau tidak adanya penerapan *e-budgeting*, APBD tetap dipublikasi dalam laman portal *enrekangkab.go.id*.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan bahwa Sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) di Kabupaten Enrekang. Sistem *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas setiap data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang LITBANG, Monev dan Perencanaan Makro Kabupaten Enrekang, yaitu:

“Sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan di Kabupaten Enrekang. Sistem *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas setiap data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan *e-planning* dalam penyusunan perencanaan daerah lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan lebih terukur. Selanjutnya, transparansi lebih

terintegritas karena bisa mengetahui seluruh tahapan dalam proses penyusunan perencanaan daerah yang akan terekam dalam sistem *e-planning*.

Berdasarkan Temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang berdampak positif terhadap Dimensi Transparansi untuk mewujudkan *Good governace* di Kabupaten Enrekang.

2. Dampak Terhadap Dimensi Akuntabilitas pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Akuntabilitas menurut Ahmad (2012) adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam bentuk kemitraan pengadaan barang dan jasa. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan memahami kebijakan yang diambil dan dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif menggunakan indikator yang jelas. Sistem pengawasan diperkuat dan hasil audit dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan diberi sanksi.

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan stándar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan

pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme *reward and punishment* .

Berdasarkan indikator tersebut serta berdasarkan hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan nvivo maka didapatkan potongan hasil wawancara pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimesi Akuntabilitas

<p>Reference 2 - 2,60% Coverage</p> <p>”Perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>e-planning</i> (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>online</i> dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga <i>e-planning</i> mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi <i>e-planning</i> secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang.sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif serta akuntabel”.</p>
<p>Reference 3 - 0,94% Coverage</p> <p>“Penggunaan <i>e-planning</i> sangat memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan karena dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi <i>e-budgeting</i> memudahkan dalam penyelenggaraan perencanaan sehingga semua program kerja perangkat daerah dapat terarah dan konsiten serta memudahkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi”</p>
<p>Reference 4 - 0,83% Coverage</p> <p>“penggunaan aplikasi <i>e-planning</i> memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi <i>e-planning</i> telah terintegrasi dengan aplikasi <i>e-budgeting</i> serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi <i>e-planning</i>”</p>
<p>Reference 7 - 0,59% Coverage</p> <p>“penggunaan aplikasi <i>e-budgeting</i> memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi <i>e-budgeting</i> telah terintegrasi dengan aplikasi <i>e-planning</i>”</p>

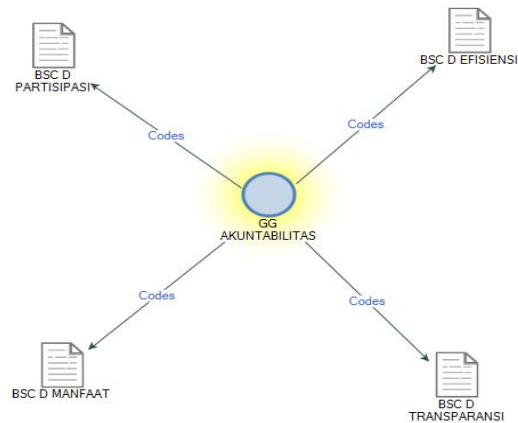
Reference 12 - 2,85% Coverage

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*. Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

Sumber :Nvivo 12

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai dampak penerapan perencanaan berbasis eletronik terhadap terwujudnya dimensi Akuntabilitas pada pemerintahan yang baik maka didapatkan tampilan *word cloud* sebagai berikut :

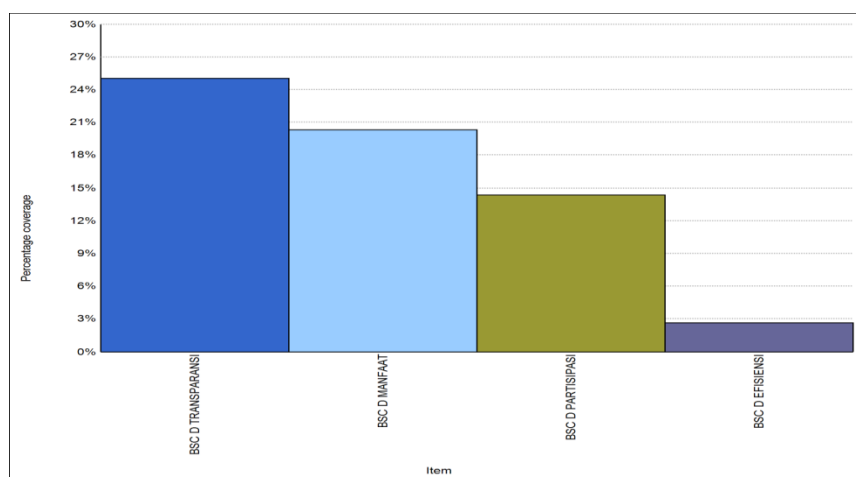
Gambar 4. Tampilan Explore Diagram Pada dimensi Transparansi



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi transparansi didapatkan hasil bahwa referensi dari dimensi transparansi berasal dari dimensi partisipasi, dimensi efisiensi, dimensi manfaat dan dimensi transparansi pada *IT Balanced E-Government Scorecard*. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.40 Percentage Coverage Pada Dimensi Transparansi



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Transparansi di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada dimensi transparansi sekitar 25 % dan dimensi lainnya yaitu dimensi manfaat, dimensi partisipasi serta dimensi efisiensi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Pembangunan memiliki kemungkinan yang lebih besar berhasil apabila perencanaan yang dibuatnya benar-benar terarah dan terkoordinasi dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Begitu pula dengan sebuah sistem, sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan akan memiliki manfaat baik bagi penciptanya maupun penggunaannya. Dalam hal ini sebuah aplikasi *e-planning* memiliki tujuan dan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aplikasi *e-planning* yang dibuat dan digunakan secara online melalui website sejak desember 2019 memiliki tujuan dan manfaat khususnya untuk pemerintahan Kabupaten Enrekang yang menaungi proses dan tahap perencanaan daerah. Dengan harapan bahwa dengan adanya *e-planning* dapat mempermudah pekerjaan dengan cara menjaga konsistensi dengan melakukan proses dokumentasi kegiatan disetiap tahapnya, agar apa yang sudah di rencanakan atau diusulkan bisa tetap konsisten dan tidak berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Sri Wahyuni,S.Kom selaku staf Kasubid Perencanaan Makro, yaitu:

“tujuan utama adalah konsistensi, sehingga ketika OPD merencanakan dari awal sampai akhir itu tetap sama. Kadang kan dulu ada perubahan kebijakan dalam OPD membuat apa yang diusulkan dalam renja kadang tidak sama dengan apa yang ada di sistem. Motifnya bisa jadi beda, atau

nama kegiatannya bisa beda, bisa jadi programnya juga beda. Program yang sudah dipakai tiba-tiba muncul lagi, itu dulu yang terjadi. Ketika sudah pakai *e-planning* otomatis kan sudah baku, ketika sudah ditetapkan kegiatan yang dilaporkan masuk dalam rpjmd ini otomatis OPD , berarti di sistem harus sama”.

Selain menjaga konsistensi, *e-planning* juga memiliki tujuan dan manfaat untuk mensinkronkan prioritas pusat dan propinsi atau daerah sehingga prioritas antara pusat sampai daerah dapat terkoordinasi dan terstruktur dengan baik. Juga sebagai bentuk akuntabilitas atau tanggung jawab dari pihak pemangku kepentingan kepada publik. Meskipun publik hanya bisa melihat atau mendapatkan informasi berupa rekapan atau laporannya saja, namun inilah bentuk akuntabilitas dan transparansi pemangku kepentingan kepada publik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rachamawati,ST.,M.AP selaku sekretaris BAPPEDA, yaitu:

“dengan otomatisasi akan terjadi efisiensi efektivitas pekerjaan itu pasti, yang kedua itu lebih apa namanya memudahkan kita mengambil keputusan kebijakan, mana yang harus didahulukan. Yang kedua tentu untuk sinkronisasi jadi pembangunan ini kan harus sinkron dengan yang di propinsi. Dengan *e-planning* ini arahnya mensinkronkan, mensinergikan prioritas pusat, prioritas propinsi dan prioritas daerah itu di sinergikan jadi tegak lurus program-program pembangunan yang ada di daerah, propinsi maupun secara nasional. Yang kedua bentuk akuntabilitas ke publik lebih mudah. Mau dilihat silahkan boleh, tapi mungkin rekapnya saja dan mudah untuk OPD”

Melihat dua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *e-planning* adalah untuk menjaga konsistensi usulan program dan kegiatan agar tidak berubah-ubah, menjaga sinkronisasi prioritas antara pusat dan propinsi atau daerah, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pihak pemangku kepentingan atau pemerintah kepada publik.

Karena dengan adanya perangkat hukum yang memayunginya, maka pelaksanaan aktivitas penerapan *e-government* dapat dilakukan dan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindunginya. Sehingga jika terjadi pelanggaran yang dilakukan, maka kerangka dan perangkat hukum yang ada dapat dijadikan dasar acuan mengenai aturan hukum yang dapat mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan mengenai penerapan *e-planning* ini. Kerangka dan perangkat hukum yang digunakan dapat berupa Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan, Instruksi-instruksi dan lain sebagainya yang dapat dijadikan pedoman atau dasar acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti pada penerapan *e-government* di instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Permadi Hasan menyatakan bahwa dengan adanya *e-planning*, akuntabilitas penyusunan APBD bisa lebih dipertanggungjawabkan dan terukur, karena dalam hal pembahasan dengan DPRD diberi hak akses untuk membuka *e-planning*. Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Bapak Permadi Hasan, SE., M. AP juga mengungkapkan bahwa:

“Akuntabilitas dalam penyusunan APBD lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada DPRD, karena DPRD diberikan user khusus dan hak akses untuk membuka *e-planning*. Karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat yang diharapkan dapat mewakili dan menjadi pengawal prioritas program dan kegiatan yang nantinya menjadi APBD Kabupaten Enrekang”

Hal tersebut juga didukung dari hasil wawancara Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang LITBANG, MONEV dan Perencanaan Makro yang menyatakan:

“Adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam perencanaan daerah di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan system *e-planning* yaitu RENJA OPD atau RKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil input data MUSRENBANG yang terbukti dengan adanya kondisi peningkatan usulan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Enrekang yang Terakomodir dan kenaikan tingkat partisipasi di Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Enrekang di tahun 2020”

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kasfun Nur, dalam proses penganggaran lebih terukur karena dokumentasi standar harga sudah ada dalam sistem *e-planning*. Dengan diterapkannya *e-planning* menjadi lebih terintegritas, karena mulai dari tahapan perencanaan dalam musrenbang, reses, yang mana diinput dalam aplikasi *e-planning* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Enrekang yang nanti hasil akhirnya bermuara pada aplikasi *e-budgeting*. Dari sisi anggaran akuntabilitas lebih terintegritas karena sudah mengacu pada komponen SSH yang ada dalam *e-budgeting*. Dari sisi anggaran sudah mengacu ke komponen, dari sisi penatausahaan mengacu pada anggaran yang mengacu pada SSH.

“Dengan implementasi *e-planning* memudahkan dalam proses dokumentasi pada proses kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga dapat dipantau oleh masyarakat melalui web”

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan *e-planning* dalam penyusunan APBD lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan lebih terukur. Selanjutnya, akuntabilitas lebih terintegritas karena bisa mengetahui seluruh tahapan dalam proses penyusunan

APBD yang akan terekam dalam aplikasi *e-planning*. Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD tetapi ikut berkontribusi dalam musrenbang, dan dari sisi politisi di wakikan oleh DPRD melalui reses berdasarkan daerah pilihannya.

Berdasarkan Temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang berdampak positif terhadap Dimensi Efisiensi untuk mewujudkan *Good governace* di Kabupaten Enrekang.

3. Dampak Terhadap Dimensi Efisiensi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Indikator efisiensi yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Saidi dan Yared (2001) yaitu efisiensi diukur melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta peningkatan proses pelayanan.

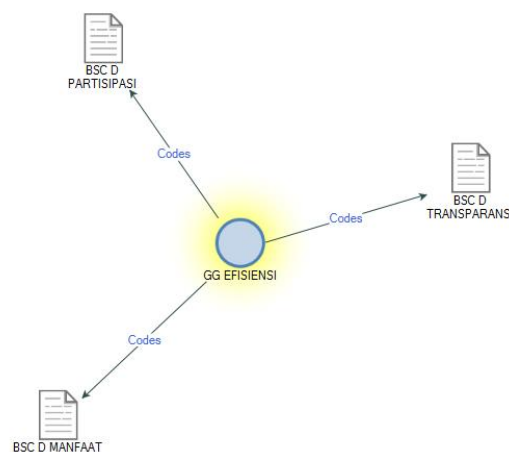
Berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan nvivo maka didapatkan potongan hasil wawancara sebagai berikut:

4.15 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Efisiensi

<p>Reference 4 - 1,77% Coverage</p> <p>“Penggunaan aplikasi <i>e-planning</i> sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musrembang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis <i>web</i> sehingga proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musrembang dilaksanakan sehingga proses penginputan dapat berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya”</p>
<p>Reference 6 - 0,94% Coverage</p> <p>“Penggunaan <i>e-planning</i> sangat memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan karena dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi <i>e-budgeting</i> memudahkan dalam penyelenggaraan perencanaan sehingga semua program kerja perangkat daerah dapat terarah dan konsiten serta memudahkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi”</p>
<p>Reference 8 - 2,23% Coverage</p> <p>“<i>e-budgeting</i> Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara <i>online</i> dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya <i>e-budgeting</i> antara lain:(1) Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran;(2)Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran;(3)Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan;(4)Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”</p>
<p>Reference 11 - 1,01% Coverage</p> <p>“penggunaan aplikasi <i>e-budgeting</i> sangat mudah digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran karena semua program kegiatan telah terinput jadi tinggal dipilih dan tinggal menginput besaran volume dan anggarannya sehingga proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan cepat dan murah jika dibandingkan proses manual yang membutuhkan banyak biaya dan waktu”</p>

Pada tampilan gambar diatas merupakan *word cloud* hasil dari pengolahan data wawancara pada Dimensi Efisiensi didapatkan hasil aplikasi, Planning, Anggaran, Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan yang menjadi paling banyak yang dibicarakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *e-planning* digunakan oleh Pemerintah di Kabupaten Enrekang untuk memudahkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sedangkan, sumber dari hasil tersebut didapatkan dari hasil wawancara mengenai lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard* pada implementasi perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4. Tampilan Explore Diagram Pada Dimensi Efisiensi

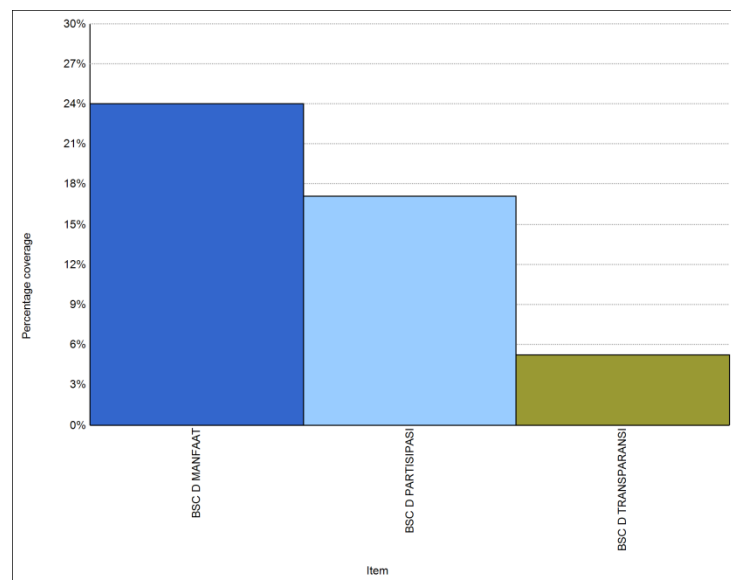


Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi transparansi didapatkan hasil bahwa referensi dari dimensi transparansi berasal dari dimensi partisipasi, dimensi transparansi dan dimensi manfaat pada *IT Balanced E-*

Government Scorecard. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.43 *Percentage Coverange* Pada Dimensi Efisiensi



Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Transparansi di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada dimensi manfaat sekitar 24 % dan dimensi lainnya yaitu dimensi partisipasi dan transparansi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Implementasi sistem *e-planning* yang merupakan suatu inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang yang memiliki banyak manfaat baik bagi bappeda sendiri, opd maupun pihak eksekutif. Sistem *e-planning* yang disajikan dalam bentuk *website* memberikan kemudahan bagi para perencana pembangunan untuk mengefisienkan waktu dalam bekerja sehingga ketepatan waktu dapat terkoordinasi dengan baik serta dapat menghemat dalam

penggunaan anggaran. Sistem *e-planning* yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang dalam penerapannya sudah mengalami peningkatan yang bisa dikatakan sudah optimal, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mahmuddin, SP., MP selaku Camat Enrekang sebagai pengguna sistem *e-planning* dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Kabupaten Enrekang, yaitu:

“sistem *e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.”

Pernyataan di atas diperkuat berdasarkan wawancara dengan bapak Dr.H.Baba, SE., MM. selaku Kepala Badan Bappeda Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* bahkan *video conference*

Serta juga didukung dari hasil wawancara Bapak Sumardin, SE., M.AP selaku Kepala Bidang LITBANG, MONEV dan Perencanaan Makro yang menyatakan:

“Melalui proses Perencanaan menggunakan sistem *e-planning* ini kita bisa tahu cepat apa yang menjadi usulan. Sehingga Bupati dan Anggota Dewan dapat dengan mudah mengaksesnya. Kalau tahun sebelumnya, di tingkat kelurahan dan desa membawa dokumen usulan ke kecamatan, kemudian ditingkat kecamatan bawa juga lagi dokumennya. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi dengan sistem *e-planning* ini, ketika sudah diverifikasi. Oleh verifikator, sudah adaperangkat daerah teknis yang berwenang melaksanakan usulan itu. Misalnya terkait pendidikan nanti langsung ke dinas pendidikan bisa langsung melihat. Jadi akan terlihat keseluruhan rekapan usulan. Hari itu selesai Musrenbang di tingkat kelurahan, hari itu mereka sudah bisa melihat datanya. Di Sistem itu sudah ada program dan Perangkat Daerah terkaitnya sudah bisa kita input. Sehingga menjadi lebih cepat dan murah. sehingga dapat

disimpulkan bahwa penggunaan sistem ini dapat mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwasanya penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang selama berjalan satu tahun sudah efisien. Meskipun sudah efisien namun perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem agar lebih baik dan lebih efisien lagi.

Dengan diterapkannya *e-planning* berperan efisien dalam penggunaan sumber daya secara anggaran dan efektif dalam sisi proses karena ada penyederhanaan proses yang dilakukan. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kasfun Nur Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

“Dengan adanya *e-budgeting* pada sistem *e-planning* membuat efisiensi dalam penggunaan sumber daya secara anggaran bisa lebih merasionalisasi yang tidak diperlukan, dan efektif dalam sisi proses, karena ada penyederhanaan proses yang dilakukan sehingga lebih cepat.”

Jumlah dari total Belanja APBD dari tahun sebelum penerapan *e-planning* jika dibandingkan dengan setelah penerapan *e-planning* menunjukkan penghematan anggaran belanja pada APBD tahun 2019, hal ini berarti bahwa dengan menggunakan *e-planning* membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Enrekang dapat melakukan penghematan komponen belanja-belanja.Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh oleh Bapak Sumardin,SE.,M.AP selaku Kepala Bidang Litbang Monev & Perencanaan MakroPerencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Enrekang.

“terjadi penghematan anggaran setelah penerapan *e-planning* sehingga membuat TIM TAPD dapat melakukan penghematan komponen belanja”

Dengan adanya *e-planning* telah mengambil kebijakan penting untuk melayani aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian proses perencanaan dan penganggaran serta mencegah tindakan korupsi.

“Penerapan *e-planning* merupakan kebijakan penting dalam melayani aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian proses perencanaan dan penganggaran serta mencegah tindakan korupsi”

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam penerapan *e-planning* adalah efisiensi dengan penetapan APBD yang tepat waktu, dan efisiensi dalam anggaran belanja. Sehingga APBD lebih mudah terawasi dan terkendali serta mencegah tindakan korupsi. Hal tersebut menurut Bapak Permadi Hasan, SE., M.AP selaku Kabid Anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

“Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam penerapan *e-planning* adalah efisiensi dalam penetapan APBD yang tepat waktu, dan efisiensi dalam anggaran belanja. Sehingga APBD lebih mudah terawasi dan terkendali serta mencegah tindakan korupsi”

Penerapan sistem *e-planning* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem *e-planning* memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam *e-planning* juga dapat mengantisipasi potensi adanya mark-up

dengan adanya sistem saling mengawasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Enrekang dalam mengelolah anggaran daerah. Hal tersebut menurut Bapak Permadi Hasan,SE.,M.AP Selaku Kabid Anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang:

“*e-planning* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem *e-planning* memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam *E-Budgeting* juga dapat mengantisipasi potensi adanya mark-up dengan adanya sistem saling mengawasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Enrekang dalam mengelolah anggaran daerah”

Berdasarkan Temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang berdampak positif terhadap Dimensi Efisiensi untuk mewujudkan *Good governace* di Kabupaten Enrekang.

4. Dampak Terhadap Dimensi Responsivitas pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Responsivitas yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Responsitas dalam penelitian ini menggunakan indikator kemampuan dalam mengantisipasi pengetahuan, aspirasi dan tuntutan baru, kemampuan dalam

menghadapi keluhan pengguna jasa, kecepatan manangani keluhan, penggunaan jasa sebagai refensi perbaikan layanan publik dan tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan.

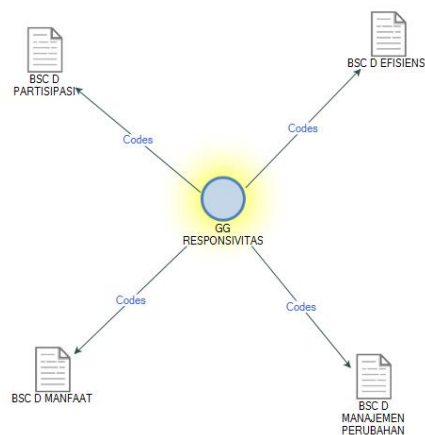
Berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan nvivo maka didapatkan potongan hasil wawancara sebagai berikut :

4.15 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Responsivitas

<p>Reference 1 - 1,64% Coverage</p> <p>“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem sistem <i>e-planning</i>itu berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD. Jadi kita mempunyai perencanaan yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu dari pihak BPKAD nanti menginput anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan kepada Bappeda maka Bappeda akan membagikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya membayar biaya pengembangan sistem yang sekarang sedang kita lakukan”.</p>
<p>Reference 3 - 0,98% Coverage</p> <p>“. Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh BPKAD dan Bappeda Kabupaten Enrekang tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait penerapan <i>e-planning</i> di Bappeda Kabupaten Enrekang seperti pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan sistem dan lain sebagainya”</p>
<p>Reference 11 - 1,46% Coverage</p> <p>“Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya <i>e-government</i>.Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penerapan <i>e-government</i>. Dengan modal sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang merasa cukup mampu untuk mengimplementasikan <i>e-government</i> di instansinya.”</p>
<p>Reference 2 - 2,60% Coverage</p> <p>”Perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>e-planning</i> (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>online</i> dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga <i>e-planning</i> mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan</p>

Pada tampilan gambar diatas merupakan *word cloud* hasil dari pengolahan data wawancara pada Dimensi Responsivitas didapatkan hasil Planning, Aplikasi, Perencanaan, Pengembangan dan Anggaran yang menjadi paling banyak yang dibicarakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wujud responsivitas Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan terus mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran berdasarkan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Sedangkan, sumber dari hasil tersebut didapatkan dari hasil wawancara mengenai lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard* pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.45 Tampilan *Explore Diagram* Pada Dimensi Responsivitas

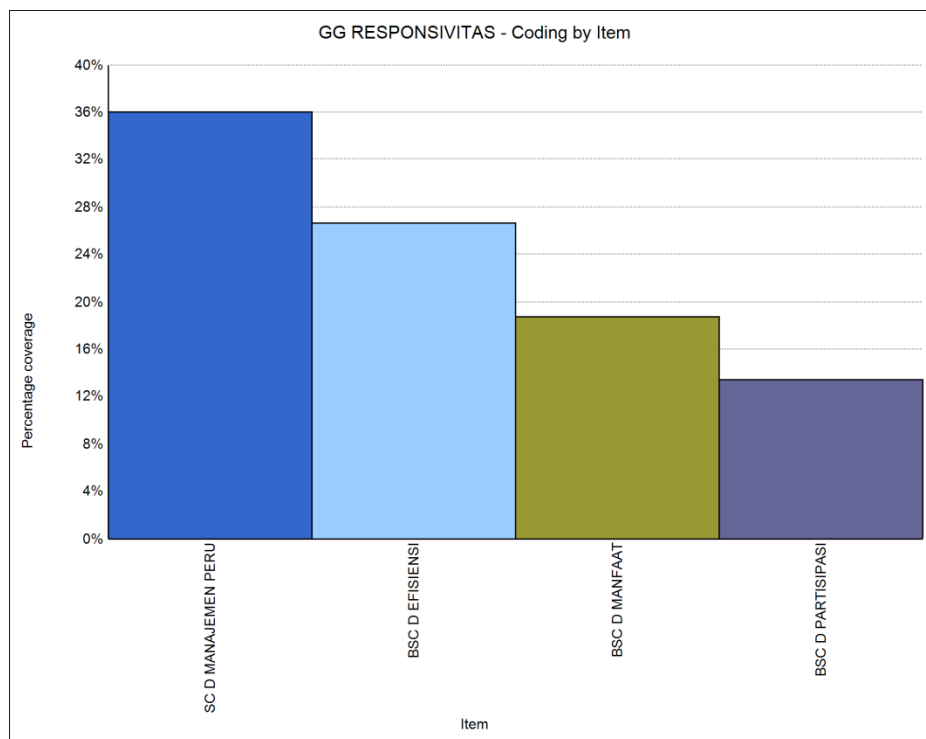


Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi responsivitas didapatkan hasil bahwa referensi dari dimensi responsivitas berasal dari dimensi partisipasi, dimensi efisiensi, dimensi manfaat dan dimensi manajemen perubahan

pada *IT Balanced E-Government Scorecard*. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4. *Persentase Coverange Pada Dimensi Responsivitas*



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Responsivitas di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada dimensi Responsivitas sekitar 36 % dan dimensi lainnya yaitu dimensi efisiensi, dimensi manfaat serta dimensi partisipasi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa sebelum akan diterapkan sistem *e-planning* sebagai inovasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang tentu di anggap sebagai sesuatu yang baru, Bappeda Kabupaten telah berupaya dengan

memberikan pembekalan kepada pegawai, hal ini dapat dilihat dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan oleh Bapelitbang Kabupaten Enrekang, sehingga pada saat aplikasi *e-planning* ini telah diterapkan pegawai sudah siap dan mengerti dalam menggunakannya. Meskipun begitu masih terdapat pegawai yang belum langsung mengerti dalam menggunakan aplikasi *e-planning*. Namun, Bapelitbang Kabupaten Enrekang akan terus berupaya memberi pembekalan berupa pelatihan maupun sosialisasi. Namun, terkadang user/operator system *e-planning* mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini diantisipasi oleh BAPPEDA dengan adanya pembuatan manual *book* yang dapat di *download* dan dibagikan kepada semua perangkat daerah serta adanya media *group Whatsapp* dan kontak admin untuk menerima aduan terkait dengan sistem *e-planning* di Kabupaten Enrekang. Hal ini sangat berdampak baik dalam penerapan sistem *e-planning*.

Berdasarkan Temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang berdampak positif terhadap Dimensi Responsivitas untuk mewujudkan *Good governace* di Kabupaten Enrekang.

5. Dampak Terhadap Dimensi Partisipasi pada Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi diukur menurut indikator sebagai berikut:

Manipulasi, Terapi, pemberian informasi, konsultasi, Penentruman, Kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga .

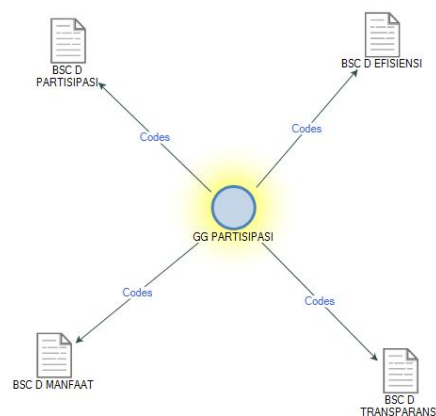
Berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan nvivo maka didapatkan potongan hasil wawancara sebagai berikut :

4.15 Potongan Hasil Wawancara Pada Dimensi Partisipasi

<p>Reference 1 - 1,19% Coverage</p> <p>“Ketersediaan infrastruktur disini sudah tersedia dengan baik sampai ditingkat kecamatan sampai kelurahan serta tersedianya jaringan internet yang di dukung oleh diskominfo berkat hal tersebut pelaksanaan perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi warga ”</p>
<p>Reference 1 - 1,76% Coverage</p> <p>“<i>e-planning</i> atau <i>electronic planning</i> (perencanaan berbasis eletronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. <i>e-planning</i> sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan <i>e-planning</i> di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.</p>
<p>Reference 3 - 2,87% Coverage</p> <p>“hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi <i>e-planning</i> bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrenbang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi <i>e-planning</i> dengan bertanya ke operator kelurahan/desa”.</p>
<p>Reference 1 - 3,92% Coverage</p> <p>“penerapan <i>e-planning</i> merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun .Aplikasie-<i>planning</i> sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran</p>

Pada tampilan gambar diatas merupakan *word cloud* hasil dari pengolahan data wawancara pada Dimensi Partisipasi didapatkan hasil Masyarakat, Pemerintah, Perencanaan, Penyusunan dan Pembangunan yang menjadi paling banyak yang dibicarakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *e-planning* digunakan oleh pemerintah sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Sedangkan, sumber dari hasil tersebut didapatkan dari hasil wawancara mengenai lima dimensi *Balanced E-Government Scorecard* pada implementasi perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang. Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4. Tampilan Explore Diagram Pada dimensi Partisipasi

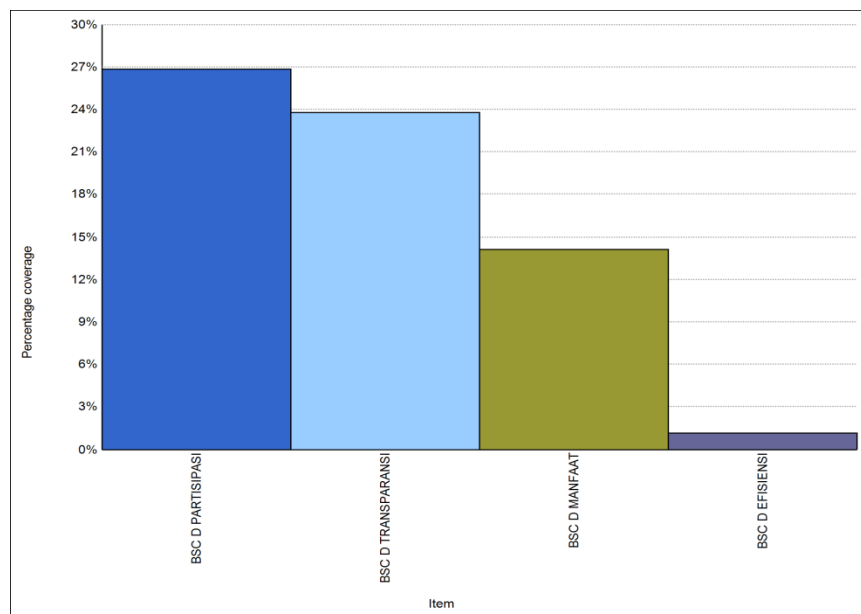


Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi partisipasi didapatkan hasil bahwa referensi dari dimensi partisipasi berasal dari dimensi partisipasi, dimensi efisiensi, dimensi manfaat dan dimensi transparansi pada *IT Balanced E-*

Government Scorecard. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.49 Percentage Coverange Pada Dimensi Partisipasi



Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Partisipasi di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada dimensi Partisipasi sekitar 27 % dan dimensi lainnya yaitu dimensi transparansi, dimensi manfaat serta dimensi efisiensi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Partisipasi merupakan keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat.

Tujuan utama seorang perencana dalam melakukan perencanaan adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka, bagaimana cara untuk memenuhi tujuan tersebut yaitu mencapai kondisi akhir yang diinginkan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat penerima benar-benar telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan yang dikehendaki masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak harus diartikan sebagai pembangunan yang berlangsung secara lancar, mantap tanpa hambatan. Pembangunan masyarakat selalu berjalan bergelombang dan pasang surut, disebut berkelanjutan apabila mampu mematahkan atau mampu menghindari hambatan-hambatannya dan bergerak lebih lanjut ketingkat keseimbangan yang lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintah yang baik. Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak

terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Bintoro Tjokroamidjojo (2004) mengatakan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari kegiatan seluruh rakyat di dalam suatu negara. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan, (Kaho, 2003).

Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Penyelenggaraan Musrenbang khususnya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan setiap tahun menjadi suatu hal yang cukup menarik karena kegiatan ini menjadi sebuah agenda rutin yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada tahapan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bersama oleh Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/Sj tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Musrenbang. Faktanya selama ini pelibatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan masyarakat secara luas.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan hingga pada penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kota memperlihatkan kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hal ini terjadi pada pelaksanaan musrenbang setiap tahunnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang yang masih rendah juga diutarakan oleh lurah maupun camat sebagai fasilitator penyelenggaraan Musrenbang. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diketahui pula tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan dari tahun ketahun masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah lembaga pemantau yang ada di daerah. Laporan pemantau independen mencatat bahwa tingkat

partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrenbang masih rendah. Justru yang hadir hanya pejabat *grass root* (Ketua RT dan RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya maka telah terjadi perubahan dalam perencanaan pembangunan terutama pelibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam Musrenbang dan menyetujui hasilnya secara langsung serta tidak memantau seberapa banyak usulan program dan kegiatan yang lolos dalam APBD. Masyarakat perlu memahami sistem perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses memengaruhi kebijakan, program, dan anggaran pemerintah. Dampak besar yang dialami dari penerapan *e-government* adalah meningkatnya kapasitas masyarakat mengenai siklus pembangunan untuk menggunakan ruang demokrasi yang tersedia, dengan penerapan *e-government* masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Salah satu bentuk implementasi dari *e-government* adalah penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online. Aplikasi *e-planning* merupakan suatu terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Penggunaan aplikasi perencanaan elektronik berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang

menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. perencanaan elektronik memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang. Perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif melalui pemanfaatan dan implementasi *e-planning* dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang membuka ruang kemitraan kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan bersama-sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kemitraan yang dilakukan atas pembagian tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan kegiatan Musrenbang ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Realitas yang masih terjadi yaitu penanggungjawab sekaligus pelaksanaan kegiatan musrenbang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya disharmonisasi hubungan antara lurah dan camat dengan pengurus LPM.

Bappeda sebagai *leading* sektor pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan penyusunan RKPD belum bisa menyediakan informasi yang memadai mengenai hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Informasi tersebut terkait dengan program ataupun kegiatan prioritas yang terakomodir dalam dokumen perencanaan yang belum efektif disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kredibilitas Bappeda bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, bukan hanya proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif, tetapi hasil dari proses panjang dan melibatkan masyarakat juga bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh tingkat kehadiran masyarakat pada penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan kecamatan masih menunjukkan tingkat kehadiran yang rendah. Tingkat kehadiran masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, namun khusus bagi masyarakat perkotaan faktor yang paling dominan memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat adalah rutinitas masyarakat yang tergolong cukup padat. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak untuk ikut terlibat langsung pada kegiatan musrenbang. Keterwakilan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan musrenbang Kelurahan belum sepenuhnya menghadirkan semua elemen masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat belum terwakili termasuk masyarakat marginal, kelompok pendidik, maupun beberapa elemen lain yang ada di masyarakat. Keterwakilan masyarakat adalah pada saat penyusunan dokumen perencanaan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten, Bappeda tidak lagi mengikutsertakan masyarakat untuk ikut menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diakomodir dalam RKPD.

Derajat partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dikaitkan dengan derajat partisipasi masyarakat dari Burn, Hambleton dan Gogget diketahui berada pada derajat partisipasi warga (*citizen participation*). Namun setiap tahapan berbeda anak tangga derajat partisipasinya. Semakin tinggi jenjang pelaksanaan Musrenbang, partisipasi masyarakat semakin rendah anak tangga partisipasinya. Dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat tinggi pada tahapan Musrenbang lebih awal (Kelurahan dan Kecamatan), namun semakin tinggi tingkatan pelaksanaan musrenbang (Kota dan

Provinsi) partisipasi masyarakat justru semakin rendah karena ruang yang diberikan (*public space*) sudah berkurang.

Komitmen pemerintah dalam hal perencanaan partisipatif melalui penyelenggaraan Musrenbang belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari proses tahapan Musrenbang yang belum dijalankan dengan benar seperti proses Pra-Musrenbang padahal proses inilah yang sesungguhnya menjadi *entrypoint* bagi masyarakat secara umum untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat dalam proses penentuan program dan kegiatan prioritas. Masyarakat hanya terlibat dalam bentuk pemberian usulan program sedangkan penetapan program dan kegiatan yang menjadi prioritas sebahagian besar bukan merupakan hasil usulan masyarakat.

Hal lain adalah program dan kegiatan yang telah ditetapkan tidak disampaikan kembali pada kecamatan atau kelurahan. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan informasi tentang usulan prioritas mereka yang disampaikan dalam proses Musrenbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah masih rendah dalam mewujudkan perencanaan partisipatif melalui penyelenggaraan Musrenbang. Rendahnya komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang memicu sikap apatis masyarakat. Hal ini terkait dengan proses penyusunan program dan kegiatan prioritas yang belum transparan. Dengan demikian, masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang rendah karena mereka menganggap bahwa penyelenggaraan Musrenbang belum bisa dijadikan media yang efektif untuk

menyalurkan aspirasi serta mengusulkan program dan kegiatan yang prioritas dari masyarakat untuk ditangani oleh pemerintah.

Saat ini, inovasi yang dikembangkan dalam praktik *e-government* muncul untuk menyelesaikan persoalan khas yang dimiliki suatu daerah, dan disesuaikan dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah. Merujuk pada sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif tidak dapat lepas dari arsitektur perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Ruang kreatif pengembangan *e-government* disesuaikan dengan keperluan perencanaan pembangunan merujuk pada kebijakan serta tata pelaksanaannya. Membangun *e-government*, tidak lepas dari menerjemahkan sistem perencanaan pembangunan dalam sebuah *platform* teknologi informasi.

Terdapat beberapa fase dalam siklus perencanaan disuatu wilayah administrasi. Mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, kemudian masuk dalam tahapan perencanaan. Setelah itu, perencanaan akan menjadi rangka dasar dalam penyusunan anggaran. Memasuki tahapan implementasi, terdapat tahapan pengadaan, pelaksanaan, pemantauan (dan evaluasi), yang kemudian ditutup dengan pelaporan. Secara hakiki, semua tahapan tersebut dapat diterapkan dalam mekanisme digital. Pelaksanaan pemerintahan terbuka melalui *e-government* berada pada sebuah ruang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada sebuah daerah pedesaan, masyarakat secara alamiah mengikuti dan menggunakan ruang dialog

yang disediakan baik yang bersifat tatap muka, *online*, maupun kombinasi keduanya. Melalui ruang-ruang tersebut, pemberdayaan masyarakat terjadi sehingga menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil.

Prinsip partisipasi dimiliki oleh setiap aktor baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat terlibat dengan pemerintah, dalam proses dan isi kebijakan sedangkan pemerintah mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat. Komunikasi yang terjadi baik *offline* maupun *online*, dimana terjadi interaksi antar kedua belah pihak yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Aplikasi *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah lembaga atau lembaga publik. Tujuannya untuk memastikan bahwa hubungan lintas pemerintahan itu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat dihasilkan lebih efisien, produktif dan responsif. Penerapan *e-government* mencakup semua cabang atau lembaga pemerintah, dan itu berarti bahwa *e-government* dapat diterapkan ke eksekutif, legislatif atau lembaga yudikatif. Dalam berbagai literatur, *e-government* dikaitkan dengan konsep digital pemerintah atau pemerintah, internet diharapkan menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran informasi dan juga menjadi struktur untuk penyampaian layanan dan aktivitas transaksi tertentu di seluruh komunitas, pebisnis dan pemerintah.

Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD, tetapi masyarakat berkontribusi dalam musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang biasanya dilakukan di Kecamatan maupun Kelurahan. Dari

sisi politis masyarakat diwakilkan oleh DPRD karena melalui pokok-pokok pikiran (reses). Perencanaan partisipatif dan politis sudah masuk ke dalam RKPD, setelah tahap perencanaan selesai ditetapkan dengan Peraturan Bupati berlanjut ke tahap penyusunan KUA PPAS, di PPAS peranan DPRD yang merupakan representasi perwakilan dari masyarakat berdasarkan daerah pilihannya dan semua proses kegiatan tersebut telah didokumentasikan menggunakan aplikasi *e-planning* dan di publikasikan di www.enrekangkab.go.id. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Kasfun Nur Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

“Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan APBD, tetapi masyarakat berkontribusi dalam musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang biasanya dilakukan di Kecamatan maupun Kelurahan. Dari sisi politis masyarakat diwakilkan oleh DPRD karena melalui pokok-pokok pikiran (reses). Perencanaan partisipatif dan politis sudah masuk ke dalam RKPD, setelah tahap perencanaan selesai ditetapkan dengan Peraturan Bupati berlanjut ke tahap penyusunan KUA PPAS, di PPAS peranan DPRD yang merupakan representasi perwakilan dari masyarakat berdasarkan daerah pilihannya dan semua proses kegiatan tersebut telah didokumentasikan menggunakan aplikasi *e-planning* dan di publikasikan di www.enrekangkab.go.id“

Berdasarkan Temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang berdampak positif terhadap Dimensi Partisipasi untuk mewujudkan *Good governace* di Kabupaten Enrekang.

6. Dampak Terhadap Implementasi Perencanaan Berbasis Eletronik di Kabupaten Enrekang untuk Mewujudkan *Good Governace*

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai dampak penerapan perencanaan berbasis eletronik terhadap terwujudnya *Good Governace* menggunakan NVIVO 12 untuk melihat jumlah determinasi percakapan antara peneliti dan narasumber. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

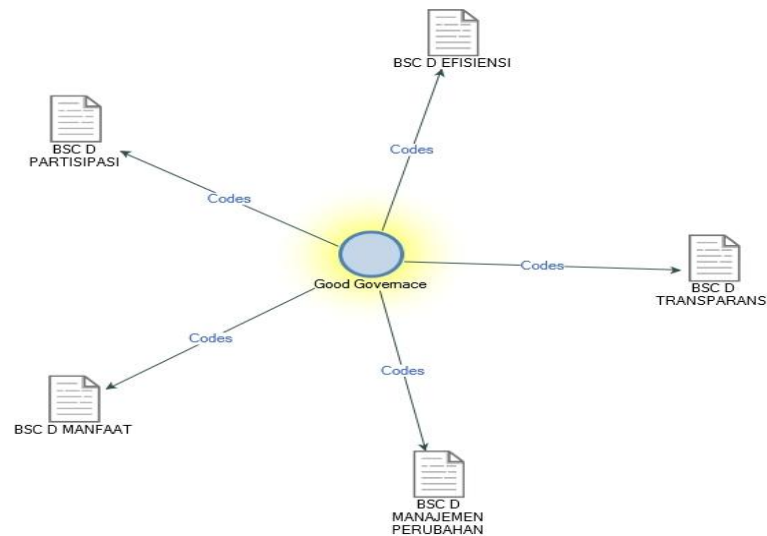
Tabel 4.11 Persentase Wawancara Lima Dimensi *Good Governace*

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
Planning	8	222	2.26 %
Aplikasi	8	173	1.76 %
Masyarakat	10	142	1,45 %
Anggaran	8	135	1,38 %
Perencanaan	11	133	1,36 %
Perangkat	9	96	1,08 %
Pemerintah	10	83	0,85 %
Pembangunan	11	73	0,68 %

Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai dampak penerapan perencanaan berbasis eletronik terhadap terwujudnya dimensi partisipasi pada pemerintahan yang baik maka didapatkan tampilan *word cloud* sebagai berikut :

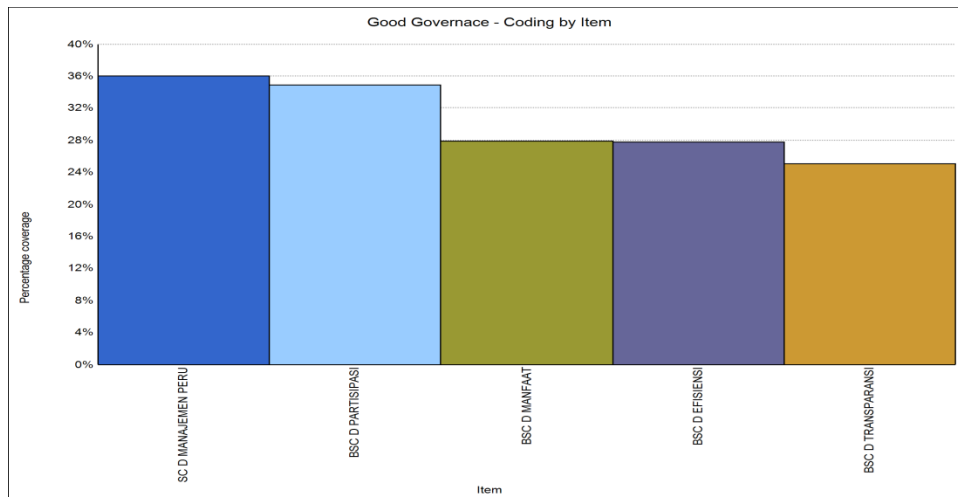
Gambar 4. Tampilan *Explore Diagram* Pada Lima Dimensi *Good Governace*



Sumber : NVIVO 12

Berdasarkan hasil dari *explore diagram* pada dimensi partisipasi didapatkan hasil bahwa referensi dari lima dimensi berasal dari Dimensi Partisipasi, Dimensi Efisiensi, Dimensi Manfaat, Dimensi Transparansi dan Dimensi Manajemen Perubahan pada *IT Balanced E-Government Scorecard*. Sedangkan hasil persentase dapat dilihat pada gambar berikut :

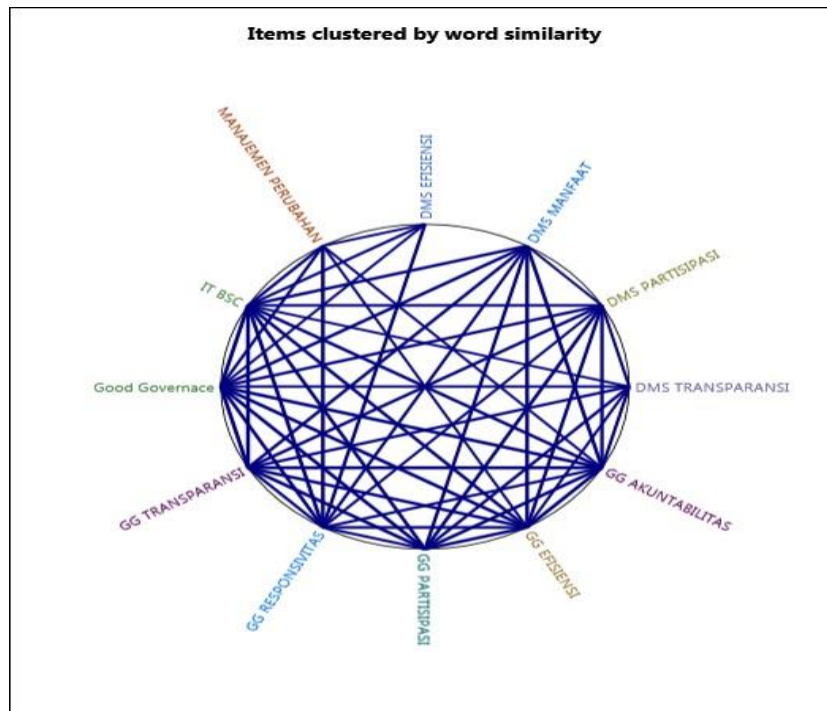
Gambar 4.52 *Persentase Coverange* Pada Lima Dimensi *Good Governace*



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa referensi paling dominan pada Dimensi Transparansi di *Good Governace* berasal dari hasil wawancara pada Dimensi Manajemen Perubahan sekitar 36 % dan Dimensi lainnya yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Partisipasi serta Dimensi Efisiensi dalam *Balanced E-Government Scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menerapkan *e-planning*.

Gambar 4. 53 Hasil *Cluster Analisis* Pada Lima Dimensi *Good Governace*



Sumber : Nvivo 12

Berdasarkan Gambar hasil Cluster Analisis pada Lima Dimensi *Good Governace* dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government pada sistem perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang memiliki dampak positif terhadap terwujudnya Good Governace di Kabupaten Enrekang.

Penerapan *e-government* dalam *e-planning* di Kabupaten Enrekang untuk mencapai *Good Governace* adalah sebuah keniscayaan walaupun masih banyak kelemahan disana-sininya dalam implementasinya namun dalam keadaan seperti itu Penerapan *e-government* dalam *e-planning* harus tetap dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang menuju pelayanan yang prima dan nyaman serta aman bagi masyarakatnya untuk itu melihat pentingnya peran *E-Governmet* maka dilakukan pengkajian untuk mengetahui Pelaksanaan *E-Government* di Indonesia khususnya

di Kabupaten Enrekang dan hasil yang telah dicapai hingga saat ini serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya sehingga mau tidak mau strategi pelaksanaan dan konsep *E-Government* dalam Penerapan *e-planning* memerlukan perbaikan di semua sisi haruslah di jadikan sebagai motivasi membangun yang lebih baik. Keterlambatan penerapan *E-Government* dalam pembangunan hanya akan menjadikan negara ini tetap jauh dari cita-cita reformasi, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan efisiensi birokrasi dan menyadari pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan *E-Government* harus memperhatikan kesiapan pemerintah dan masyarakat, menurut prinsip dasar dan secara bertahap.

Implementasi *e-planning* Dampak positif terhadap terhadap terwujudnya *Good Governace* berdasarkan hipotesis bahwa Teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan *good governance* dalam tiga hal,yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan.Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Magno dan Serafica, 2001). Hasil penelitian Habib (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan *e-government* dengan upaya pelaksanaan *good governance*. Demikian juga dengan hasil penelitian Alaaraj dan Ibrahim (2014) yang menyatakan bahwa praktik-praktik *e-government* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Pendapat ini sejalan Hasil penelitian yang dikukan oleh Rieska Maharani & Ardi Hamzah (2008). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan, transparansi, keadilan dan tanggung jawab dalam penerapan *e-government* dalam *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Pada Pemerintah Provinsi Bali dapat dijelaskan bahwa penerapan *e-procurement* semakin baik maka akan berpengaruh positif juga terhadap terwujudnya *good governance*.

Selain hal tersebut diatas, pendapat itu juga sejalan dengan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Budi Adiana, I Nyoman Mahendra Yasa dan I Gede Wardana (2018). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *e-government* dalam *e-prucurement* berpengaruh positif terhadap *good governace*

Ada banyak literatur substansial pada *e-government* yang membahas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen untuk mengurangi peran birokrasi dalam organisasi pemerintah (Cordella dan Tempini, 2015). Sebagai contoh di Indonesia, pemerintah telah memanfaatkan implementasi *e-government* dengan *e-procurement*, yang merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang berbasis *web* atau *internet*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi pemerintah melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam penerapan *good governance* yang baik (Zawani, 2012). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ternyata cukup membantu dalam efisiensi birokrasi. Pola *e-procurement* ini memangkas praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa.

Pola ini juga membantu menekan pengeluaran anggaran negara 10 hingga 50 persen (Zawani, 2012). Hal ini didukung hasil penelitian Elbahnasawy (2013) yang menunjukkan bahwa *e-government* adalah alat yang ampuh dalam mengurangi korupsi-melalui infrastruktur telekomunikasi dan ruang lingkup dan kualitas layanan-online yang diperkuat dengan adopsi internet yang lebih besar.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, didasarkan pada dua aspek pokok yang pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak masyarakat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam meraih kemandirian dan terciptanya keadilan sosial . Kedua, pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya (Suparto, 2008).

Implementasi Kebijakan *e-planning* dalam Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, dengan sumber daya manusia yang sudah terbiasa dan mumpuni serta sarana dan prasarana yang terus dikembangkan, komunikasi dengan cara sosialisasi yang dilakukan berkali-kali dan bimbingan teknologi, dan penerapan kebijakan *e-planning* dapat dipahami oleh seluruh pegawai sebagai pelaksana kebijakan. Penerapan sistem pengendalian manajemen pada penyusunan APBD melalui *e-planning* ini telah memenuhi syarat dalam penerapan struktur dan proses pengendalian manajemen.

Tujuan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang telah tercapai, hal ini dikarenakan adanya penerapan sistem pengendalian manajemen *e-planning* yang berfokus pada pelaksanaan strategi organisasi yang telah berjalan secara efektif dan efisien. Dilihat dari keberhasilan kebijakan penerapan *e-planning* dan

sistem pengendalian manajemen, dapat dibuktikan dengan terwujudnya transparansi yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, akuntabilitas dalam penyusunan APBD lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih terukur, serta efektifnya penetapan APBD yang dilakukan tepat waktu dan berhasil melakukan efisiensi pada anggaran belanja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan implementasi perencanaan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang untuk mewujudkan *Good Governance* ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus Bersama. Proses sistem *e-planning* ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pendekatan *Bottom Up* yaitu melalui pelaksanaan musrenbang menggunakan sistem *e-planning*.
2. Transparansi, pada sistem *e-planning* ini adalah dimana hasil input usulan program/kegiatan yang di akomodir dapat dilihat secara langsung oleh user/operator dan untuk usulan yang tidak dapat di akomodir terdapat keterangan yang menjadi alasannya serta laporan realisasi anggaran perangkat daerah yang di *publish* di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang. Namun, dari segi transparansi yang dapat di jangkau oleh masyarakat, sistem *e-planning* ini belum dapat menunjukkan transparansinya secara absolute, hanya berupa jaminan sistem yang dapat membuat usulan program.kegiatan dari masyarakat dapat terakomodir.

3. Responsif, Dalam Hal ini sistem *e-planning* sebagai inovasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang tentu di anggap sebagai sesuatu yang baru sehingga terkadang user/operator *e-planning* mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Dalm hal ini di antisipasi oleh BAPPEDA dengan adanya pembuatan *manual book* yang dapat di download datanya. Media group *Whatsapp* dan kontak admin untuk menerima aduan terkait dengan sistem *e-planning*.
4. Efektif dan Efisen, perencanaan pembangunan daerah dengan *e-planning* ini menciptakan kondisi dimana usulan perencanaan dan hasil perencanaan dikelola oleh sistem.
5. Akuntabilitas, Adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam perencanaan daerah di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan sistem *e-planning* yaitu RENJA OPD atau RKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil input data MUSRENBANG yang terbukti dengan adanya kondisi peningkatan usulan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Enrekang yang Terakomodir

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang ditetapkan dan pengujian hipotesis, serta setelah dilakukan pembahasan yang didukung oleh data dan teori yang relevan, maka dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi *Electronic Planning* di Kabupaten Enrekang Berpengaruh Positif Terhadap Perwujudan *Good Governance*.

B.Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan bahwa dimana implementasi *electronic planning* terbukti berpengaruh terhadap perwujudan *good governance*, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada BAPPEDA Kabupaten Enrekang maupun sebagai pengembangan ilmu, adalah sebagai berikut :

1. Sistem *e-planning* dapat di akses oleh Masyarakat, dengan kewenangan akses dapat memonitoring usulan yang di input oleh User/Operator Kelurahan, Kecamatan tersebut hingga proses verifikasi yang dilakukan oleh User/Operator OPD.
2. Sistem *e-planning* ini kedepannya dapat disempurnakan Sehingga dapat terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah lainnya seperti E-SIRUP, LPSE, SIM-Anggaran, dsb untuk menciptakan sinkronisasi hasil usulan program dan kegiatan dengan RPJMD, RENSTRA, OPD dan RENJA.
3. Untuk lebih meningkatkan penerapan *good governance*, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang harus meningkatkan *e-government* pada Sistem *e-planning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kasman.2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Adiana, I Made Budi & Yasa, I Nyoman Mahendra. 2018. Pengaruh Elektronik Procurement Terhadap Good Governace Pada Pemerintah Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 7.5,Bali : Universitas Udayana.
- Adriwati, 2001, Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Ahmad, Jamaluddin.2015.Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sindenreng Rappang, Jurnal Ilmu Administrasi Vol.1 No.1, Sindenreng Rappang : STISIP Muhammadiyah Rappang.
- Anwar, MKhoirul &Oetojo S.,Asianti.2004.Aplikasi sistem informasi manajemen bagi pemerintah di era otonomi daerah. Yogyakarta:PenerbitPustakaPelajar.
- Arikunto,Suharsimi.2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly.2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: PSHTN FHUI.
- Campo, Salvatore Schiavo and Sundaram, Paschampet. 2002. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World. Asean Development Bank. E-governancein Depth.
- Chandler,R.C. & J.C.Plano.1988. The Public Administration Dictionary.Second Editon.Santa Barbara,CA:ABC-CLIO Inc

- Cheema,G.S.2007.Linking Governments and citizens through Democratic Governace dalam Public Administration and Democratic Governace: Governments Serving Citizens.New York: 7 Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, United Nations.
- Creswell.J.W.2010.Research Design,Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif dan Mixed.Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Ikhsan. 2011. “*E-Government* : Studi Pendahuluan Di Kabupaten Sragen”.Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.Banten:LAB-ANE FISIP Untirta.
- Denzin and Lincoln.2009. Handbook of Qualitative Research.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Gordon B, 1995, Sistem Informasi Manajemen.Jakarta:PT.Pustaka BinamanPressindo.
- Gronlund, Ake.2007, Electronic Government, pada: Anttiroiko, Ari-Veiko and Matti Malkia(eds.), Encyclopedia of Digital Government, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
- Grindle, Merilee S. 2010. Good Governance: The Inflation of an Idea. HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-023, John F. Kennedy School of Government, Harvard University
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic government*:strategi pembangunan dan pengembangansistem pelayananpublik berbasis teknologi digital.Yogyakarta: ANDI.
- J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jogiyanto HM. 2003. Sistem Teknologi Informasi.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keban, Yeremias T.2008. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep,Teori dan Isu. Jogjakarta: Gavamedia
- Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.Jakarta:UniversitasIndonesiaPress.

- Kroenke, David and Hatch, Richard.1994.*Management Information System*.New York :McGraw-Hill, Inc.
- Maharani, R. & Hamzah, A. 2008. Pengaruh E-Procurement terhadap terwujudnya Good Governance. *Jurnal Infestasi*, Vol 4, No.1, Juni 2008,Madura,Jawa Timur : Universitas Tronojoyo Madura Jawa Timur.
- Mulyadi, Deddy .2016., *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung: Alfabeta
- Magno, Francisco and Ramonette Serafica.2001.Information Tecnology for Good Governace.https://www.academia.edu/36097691/Information_Technology_for_Good_Governance.16 Mei 2020.hlm :1-32
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad.2005.*Metodologi Penelitian*.Jakarta:Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia
- Nurhakim,Mochamad Ridyan Satya.2014.IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PEMERINTAHAN MODERN, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol.11 No.3,Bandung :STIA LAN Bandung
- Pasolong, Harbani. 2013.*Metode Penelitian Administrasi Publik*,Bandung Alfabeta,
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Rizky Grafis.
- Rondinelli,D.A.2007.*Governments Serving People: The Changing Role Public Administration in Democratic Governance*. Dalam *Public Administration and Democratic Governace: Governments Serving Citizens*. New york : United Nations : Economic and Social Affairs.

- Samodra Wibawa dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scytl.2015. *Scytl Smart Governance for Smart Cities*. Setiawan, H. 2013. *Metode Audit Tata Kelola Teknologi*
- Schwab and D. Kubler.2001. *Metropolitan Governance and the “democratic deficit”*: *Theoretical Issues and Empirical Findings*, Paper in Conference Area-based initiatives in contemporary urban policy, Copenhagen.
- Schaffers, Hans, et.al., 2011, *Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation*”. Future Internet Assembly, LNCS 6656.
- Sedarmayanti.2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiyadi, W. R., .2003. *E Government Sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan Implementasi Government di Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Setiyadi, Wigrantoro Roes. 2004. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Good Governance*.
<https://maswigrs.wordpress.com/2004/12/28/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-penerapan-good-governance/>. 16 Mei 2020. hlm : 1-5
- Silva, Carlos Nunes. 2010. *Handbook of Research on E-Planning ICTs for Urban Development and Monitoring*. New York :Information Science Reference.
- Sjafrizal,2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

- Sofyanigrum, Eviana D. 2010. Tesis, Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di Departemen Komunikasi dan Informatika. (Jakarta : Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia).
- Sosiawan, Edwin Arif. 2007. Tanggapan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia .<http://edwin.dosen.unpyk.ac.id/tantanganegov.pdf>
- Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta
- Suparto, Peni, 2008, Paradigma dan Implementasi Pelayanan Publik, Kanisius, Yogyakarta.
- Sukmadinata. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sutanta, Edhy. 2003. Sistem informasi manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Solichin, A.W. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2014. Demokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana.
- Widjaja, Haw. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik teori dan proses, cetakan kedua, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wirawan, Vani. Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. Dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol 1 No 1. Maret, 2020. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Intruksi Presiden RI No 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika)

Intruksi Presiden RI No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Transparansi

[<Files\\BSC D EFISIENSI>](#) - § 1 reference coded [0,60% Coverage]

Reference 1 - 0,60% Coverage

“untuk memasukkan data ke dalam sistem *e-planning* terbagi beberapa level pengguna antara lain admin, operator dan level opd yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing”

[<Files\\BSC D MANFAAT>](#) - § 8 references coded [17,25% Coverage]

Reference 1 - 1,76% Coverage

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Reference 2 - 2,60% Coverage

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu

tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang. sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.

Reference 3 - 1,27% Coverage

e-planning membantu Bappeda Kabupaten Enrekang untuk menganalisis tentang keselarasan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara menu yang termuat dalam *e-planning* dengan muatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Bappeda juga menganalisis pengaruh sumber daya manusia nya karena bisa memberikan komitmen pejabat pemerintah Kabupaten Enrekang dengan sarana prasarana dan sistem informasi terhadap kesiapan penerapan *e-planning*”

Reference 4 - 2,55% Coverage

“proses perencanaan dilakukan dimulai dari diajukan usulan yang meliputi usulan politik yang berasal dari visi-misi bupati serta sasaran dan tujuan pembangunan berdasarkan hal tersebut maka disusunlah rencana kerja perangkat daerah serta menghimpun usulan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari musrenbang desa/kelurahan yang nantinya di himpun di musrenbang kecamatan dan setelah proses ini selesai dilaksanakan forum OPD untuk menyaring dan memilah usulan berdasarkan tugas organisasi perangkat daerah dan setelah itu dilaksanakan musrenbang kabupaten bertujuan untuk menyaring dan memilah usulan yang berasal dari hasil reses anggota DPRD yang merupakan pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun berikutnya dan berdasarkan rencana kerja tersebut maka dibuatlah KUA- PPAS untuk setiap Perangkat Daerahberkat menggunakan *e-planning* semua hal tersebut mudah dilaksanakan”

Reference 5 - 2,23% Coverage

“*e-budgeting* Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya *e-budgeting* antara lain:(1) Memberikan proses

yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran;(2)Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran;(3)Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan;(4)Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”

Reference 6 - 1,65% Coverage

"*e-monev* berfungsi untuk memantau serapan anggaran pemerintah kabupaten enrekang secara konsisten,efektif dan akurat.penggunaan aplikasi ini dapat mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD,DAK, DEKON,TP dan urusan Bersama.Selain itu emonev memiliki fitur guna mengelolah laporan-laporan Bappeda dalam rangka monitoring dan evaluasiyang dapat disimpan dan dicetak menggunakan teknologi unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna.tidak membutuhkan perangkat keras yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua perangkat daerah menggunakan link emonev.enrekangkab.go.id."

Reference 7 - 2,59% Coverage

"*e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres usulan*"

Reference 8 - 2,60% Coverage

"Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak;(3)Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi

masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

[<Files\\BSC D PARTISIPASI>](#) - § 7 references coded [16,17% Coverage]

Reference 1 - 2,87% Coverage

“hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi *e-planning* bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrenbang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi *e-planning* dengan bertanya ke operator kelurahan/desa”.

Reference 2 - 2,52% Coverage

terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulanya”.

Reference 3 - 1,96% Coverage

“proses penginputan usulan Pokok Pikiran Dewan kedalam Aplikasi *e-planning* terdapat menu Pokok Pikiran Dewan yang dapat diakses secara langsung menggunakan user name dan password yang di berikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang. Selain itu, Aplikasi *e-planning* memungkinkan Anggota Dewan untuk memantau usulannya secara langsung pada aplikasi”

Reference 4 - 3,44% Coverage

“Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*.”

Reference 5 - 1,62% Coverage

Masyarakat tidak memiliki akses langsung dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada aplikasi *e-budgeting*. Namun, masyarakat dapat melihat rencana anggaran Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* dan dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Enrekang”

Reference 6 - 1,48% Coverage

“Hak akses masyarakat pada aplikasi *e-monev* berupa laporan yang di publikasikan melalui web resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dilaporkan secara langsung kepada para pemangku kepentingan seperti para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan Tokoh masyarakat”

Reference 7 - 2,28% Coverage

“terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi laporan realisasi yang diadakan setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Forum tersebut dihadiri semua perangkat daerah serta tokoh masyarakat bertujuan untuk melaporkan hasil realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

[<Files\\BSC D TRANSPARANSI>](#) - § 12 references coded [23,83% Coverage]

Reference 1 - 3,00% Coverage

“aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingga semua data usulan dapat dikelola untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal sehingga memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat”

Reference 2 - 1,16% Coverage

“masyarakat dapat melihat hasil inputan operator *e-planning* berupa laporan usulan musrenbang sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat”

Reference 3 - 1,06% Coverage

“kita dapat melihat hasil inputan pokok pikiran yang merupakan hasil dari inputan aplikasi *e-planning* di www.enrekangkab.go.id”

Reference 4 - 1,33% Coverage

“Laporan usulan pokok pikiran dewan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat terhadap usulan yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Enrekang”

Reference 5 - 2,13% Coverage

“Informasi status usulan masyarakat dalam aplikasi *e-planning* dapat dilihat setelah proses musrembang selesai. Karena hal tersebut di kelolah oleh operator di tingkat perangkat daerah sehinggah masyarakat dapat mengetahui apakah usulannya disetujui atau tidak”

Reference 6 - 1,03% Coverage

“laporan ini masyarakat mengetahui status usulan apakah disetujui atau ditolak oleh perangkat daerah pengampu usulan tersebut”

Reference 7 - 2,27% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-planning* dilihat pada setiap usulan yang telah diinput dalam aplikasi akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan tahapan dari usulan tersebut sehinggah masyarakat dapat mengetahui usulannya telah sampai tahap tersebut atau di tolak”

Reference 8 - 2,69% Coverage

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempublikasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui *web* resmi Kabupaten Enrekang berisi lampiran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

Reference 9 - 1,71% Coverage

“Aktualisasi Informasi pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari perbaharuan data setiap terjadi perubahan anggaran pada setiap tahapan penyusunan anggaran di setiap tahunnya”

Reference 10 - 2,29% Coverage

“Pada aplikasi *e-monev* Pemerintah Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu mempublikasikan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah pada setiap tahun berjalan”

Reference 11 - 2,94% Coverage

“laporan realisasi anggaran semua perangkat daerah yang dikelola menggunakan aplikasi *e-monev* yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang berisi laporan semua realiasi anggaran perangkat daerah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahun berjalan”.

Reference 12 - 2,22% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari perbaharuan informasi mengenai realisasi anggaran yang di *input* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang di laporkan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada setiap tahun yang berjalan”

Akuntabilitas

[<Files\\BSC D EFISIENSI>](#) - § 2 references coded [2,70% Coverage]

Reference 1 - 1,05% Coverage

“Pembiayaan *e-planning* semua modal berasal dari APBD,Siklus ada di apbd dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai pertanggung jawaban.

Mulai dari perencanaan hingga menjadi rkpd setiap tahun,kemudian dari rkpd itu dilanjutkan ke ppas penganggaran, setelah itu uang dibagi sesuai prioritas anggaran”.

Reference 2 - 1,64% Coverage

“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem sistem *e-planning*itu berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD. Jadi kita mempunyai perencanaan yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu dari pihak BPKAD nanti menginput anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan kepada Bappeda maka Bappeda akan membagikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya membayar biaya pengembangan sistem yang sekarang sedang kita lakukan”.

[<Files\\BSC D MANFAAT>](#) - § 12 references coded [20,36% Coverage]

Reference 1 - 1,76% Coverage

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Reference 2 - 2,60% Coverage

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang.sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif serta akuntabel”.

Reference 3 - 0,94% Coverage

“Penggunaan *e-planning* sangat memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan karena dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* memudahkan dalam penyelenggaraan perencanaan sehingga semua program kerja perangkat daerah dapat terarah dan konsiten serta memudahkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi”

Reference 4 - 0,83% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-planning* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-planning* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi *e-planning*”

Reference 5 - 2,23% Coverage

“*e-budgeting* Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya *e-budgeting* antara lain: (1) Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran; (2) Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran; (3) Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan; (4) Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”

Reference 6 - 0,83% Coverage

“Manfaat *e-budgeting* adalah: (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Pengendalian penyusunan anggaran sehingga mudah dilakukan; (2) Pengawasan dapat dilakukan sejak tahap perencanaan; (3) Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan; (4) Transparansi anggaran dapat ditingkatkan.”

Reference 7 - 0,59% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-budgeting* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*”

Reference 8 - 1,65% Coverage

"*e-monev* berfungsi untuk memantau serapan anggaran pemerintah kabupaten enrekang secara konsisten, efektif dan akurat. penggunaan aplikasi ini dapat mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD, DAK, DEKON, TP dan urusan Bersama. Selain itu *e-monev* memiliki fitur guna mengelolah laporan-laporan Bappeda dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dapat disimpan dan dicetak menggunakan teknologi unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna. tidak membutuhkan perangkat keras yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua perangkat daerah menggunakan link emonev.enrekangkab.go.id."

Reference 9 - 0,89% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-monev* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-monev* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* sehingga dalam pembuatan laporan menjadi sangat mudah dan cepat menghasilkan yang dapat di pertanggungjawabkan ”

Reference 10 - 2,59% Coverage

“*e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres* usulan”

Reference 11 - 2,60% Coverage

“Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak; (3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat; (4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

Reference 12 - 2,85% Coverage

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*. Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

[<Files\\BSC D PARTISIPASI>](#) - § 6 references coded [14,39% Coverage]

Reference 1 - 3,35% Coverage

“Dalam praktiknya, *e-planning* yang diterapkan di Kabupaten Enrekang tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung yang seharusnya ikut andil dalam melakukan perencanaan. Masyarakat tidak diberi akses secara langsung untuk mengakses aplikasi *e-planning*. Hanya operator tingkat kelurahan, kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*, Masyarakat hanya diikuti sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator”.

Reference 2 - 2,52% Coverage

terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulanya”.

Reference 3 - 1,96% Coverage

“proses penginputan usulan Pokok Pikiran Dewan kedalam Aplikasi *e-planning* terdapat menu Pokok Pikiran Dewan yang dapat diakses secara langsung menggunakan user name dan password yang di berikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang. Selain itu, Aplikasi *e-planning* memungkinkan Anggota Dewan untuk memantau usulannya secara langsung pada aplikasi”

Reference 4 - 1,62% Coverage

Masyarakat tidak memiliki akses langsung dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada aplikasi *e-budgeting*. Namun, masyarakat dapat melihat rencana anggaran Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* dan dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Enrekang”

Reference 5 - 2,66% Coverage

“Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada proses musrenbang di tingkat desa/kelurahan, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrenbang memutuskan usulan prioritas kelurahan/ desa menggunakan cara musyawarah dan proses perangkan usulan

sehingga hanya usulan prioritas saja yang di masukkan dalam *e-planning* merupakan keinginan masyarakat bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran”

Reference 6 - 2,28% Coverage

“terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi laporan realisasi yang diadakan setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Forum tersebut dihadiri semua perangkat daerah serta tokoh masyarakat bertujuan untuk melaporkan hasil realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

<[Files\BSC D TRANSPARANSI](#)> - § 13 references coded [25,03% Coverage]

Reference 1 - 3,00% Coverage

“aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingga semua data usulan dapat dikelolah untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal sehingga memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat”

Reference 2 - 1,16% Coverage

“masyarakat dapat melihat hasil inputan operator *e-planning* berupa laporan usulan musrenbang sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat”

Reference 3 - 1,04% Coverage

“kita dapat melihat hasil inputan pokok pikiran yang merupakan hasil dari inputan aplikasi *e-planning* di www.enrekangkab.go.id”

Reference 4 - 1,33% Coverage

“Laporan usulan pokok pikiran dewan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat terhadap usulan yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Enrekang”

Reference 5 - 2,13% Coverage

“Informasi status usulan masyarakat dalam aplikasi *e-planning* dapat dilihat setelah proses musrenbang selesai. Karena hal tersebut di kelolah oleh operator di tingkat perangkat daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah usulannya disetujui atau tidak”

Reference 6 - 1,03% Coverage

“laporan ini masyarakat mengetahui status usulan apakah disetujui atau ditolak oleh perangkat daerah pengampu usulan tersebut”

Reference 7 - 2,27% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-planning* dilihat pada setiap usulan yang telah diinput dalam aplikasi akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan tahapan dari usulan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui usulannya telah sampai tahap tersebut atau di tolak”

Reference 8 - 1,22% Coverage

“Pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang membantu dalam proses penyusunan dan publikasi anggaran agar mudah diakses oleh masyarakat”.

Reference 9 - 2,69% Coverage

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempublikasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui *web* resmi Kabupaten Enrekang berisi lampiran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

Reference 10 - 1,71% Coverage

“Aktualisasi Informasi pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari perbaharuan data setiap terjadi perubahan anggaran pada setiap tahapan penyusunan anggaran di setiap tahunnya”

Reference 11 - 2,29% Coverage

“Pada aplikasi *e-monev* Pemerintah Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu mempublikasikan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah pada setiap tahun berjalan”

Reference 12 - 2,94% Coverage

“laporan realisasi anggaran semua perangkat daerah yang dikelola menggunakan aplikasi *e-monev* yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang berisi laporan semua realiasi anggaran perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahun berjalan”.

Reference 13 - 2,22% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari perbaharuan informasi mengenai realisasi anggaran yang di *input* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang di laporkan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada setiap tahun yang berjalan”

Efisiensi

[<Files\\BSC D MANFAAT>](#) - § 16 references coded [24,04% Coverage]

Reference 1 - 0,50% Coverage

“Aplikasi *e-planning* yang dibuat dan digunakan secara online agar mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah melalui *website* <http://eplanning.enrekangkab.go.id> sejak Januari 2018”

Reference 2 - 1,76% Coverage

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang

dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Reference 3 - 2,60% Coverage

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang.sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.

Reference 4 - 1,77% Coverage

“Penggunaan aplikasi *e-planning* sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musrembang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis *web* sehinggah proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musrembang dilaksanakan sehinggah proses penginputan dapat berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya”

Reference 5 - 0,41% Coverage

“sistem *e-planning* Kabupaten Enrekang sangat mudah diakses menggunakan komputer tanpa perlu melakukan proses instalasi aplikasi karena berbasis *web*”

Reference 6 - 0,94% Coverage

“Penggunaan *e-planning* sangat memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan karena dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* memudahkan dalam penyelenggaraan perencanaan sehinggah semua

program kerja perangkat daerah dapat terarah dan konsisten serta memudahkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi”

Reference 7 - 0,83% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-planning* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-planning* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi *e-planning*”

Reference 8 - 2,23% Coverage

“*e-budgeting* Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya *e-budgeting* antara lain:(1) Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran;(2)Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran;(3)Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan;(4)Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”

Reference 9 - 0,83% Coverage

“Manfaat *e-budgeting* adalah:(1)Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Pengendalian penyusunan anggaran sehingga mudah dilakukan;(2)Pengawasan dapat dilakukan sejak tahap perencanaan;(3)Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan;(4)Transparansi anggaran dapat ditingkatkan.”

Reference 10 - 0,59% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-budgeting* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*”

Reference 11 - 1,01% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* sangat mudah digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran karena semua program kegiatan telah terinput jadi tinggal dipilih dan tinggal menginput besaran volume dan anggarannya sehingga proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan cepat dan murah jika dibandingkan proses manual yang membutuhkan banyak biaya dan waktu”

Reference 12 - 1,65% Coverage

"*e-monev* berfungsi untuk memantau serapan anggaran pemerintah kabupaten enrekang secara konsisten, efektif dan akurat. penggunaan aplikasi ini dapat mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD, DAK, DEKON, TP dan urusan Bersama. Selain itu emonev memiliki fitur guna mengelolah laporan-laporan Bappeda dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dapat disimpan dan dicetak menggunakan teknologi unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna. tidak membutuhkan perangkat keras yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua perangkat daerah menggunakan link emonev.enrekangkab.go.id."

Reference 13 - 0,89% Coverage

"penggunaan aplikasi *e-monev* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-monev* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* sehingga dalam pembuatan laporan menjadi sangat mudah dan cepat menghasilkan yang dapat di pertanggungjawabkan"

Reference 14 - 2,59% Coverage

"*e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres usulan*"

Reference 15 - 2,60% Coverage

"Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak; (3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan

adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

Reference 16 - 2,85% Coverage

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*.Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

<Files\\BSC D PARTISIPASI> - § 6 references coded [17,12% Coverage]

Reference 1 - 3,92% Coverage

“penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun .Aplikasi *e-planning* sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran terbentuknya *e-planning* berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan darimasyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Aplikasi *e-planning* memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang”

Reference 2 - 2,75% Coverage

“Hanya operator tingkat kelurahan,kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*,Masyarakat hanya diikut sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / Kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penginputan usulan untuk menghindari terjadi nya kesalahan pada proses penginputan usulan di Aplikasi *e-planning*”.

Reference 3 - 2,87% Coverage

“hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi *e-planning* bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrembang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrembang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi *e-planning* dengan bertanya ke operator kelurahan/desa”.

Reference 4 - 3,44% Coverage

“Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*.”

Reference 5 - 1,48% Coverage

“Hak akses masyarakat pada aplikasi *e-monev* berupa laporan yang di publikasikan melalui web resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dilaporkan secara langsung kepada para pemangku kepentingan seperti para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan Tokoh masyarakat”

Reference 6 - 2,66% Coverage

“Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada proses musrembang di tingkat desa/kelurahan, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrembang memutuskan usulan prioritas kelurahan/ desa menggunakan cara musyawarah dan proses perangkaan usulan sehingga hanya usulan prioritas saja yang di masukkan dalam *e-planning* merupakan keinginan masyarakat bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran”

[<Files\\BSC D TRANSPARANSI>](#) - § 2 references coded [5,29% Coverage]

Reference 1 - 3,00% Coverage

“aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingga semua data usulan dapat dikelola untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal

sehingga memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat”

Reference 2 - 2,29% Coverage

“Pada aplikasi *e-monev* Pemerintah Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu mempublikasikan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah pada setiap tahun berjalan”

Responsivitas

[<Files\\BSC D EFISIENSI>](#) - § 20 references coded [26,70% Coverage]

Reference 1 - 1,64% Coverage

“Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem sistem *e-planning*itu berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD. Jadi kita mempunyai perencanaan yang sudah di input dengan berbagai tahap, lalu dari pihak BPKAD nanti

menginput anggarannya. Setelah anggaran sudah diberikan kepada Bappeda maka Bappeda akan membagikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti contohnya membayar biaya pengembangan sistem yang sekarang sedang kita lakukan”.

Reference 2 - 0,85% Coverage

“Untuk pihak diskominfo dalam hal anggaran itu menangani terkait pemeliharaan dan pengembangan yang sedang dilakukan untuk saat ini, anggaran infrastruktur dari diskominfo semua.Sumber anggaran yang kami terima itu semua berasal dari APBD”

Reference 3 - 0,98% Coverage

“. Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh BPKAD dan Bappeda Kabupaten Enrekang tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang seperti pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan sistem dan lain sebagainya”

Reference 4 - 0,55% Coverage

“Pemerintah Kabupaten Enrekang berkomitmen menyediakan dana dan anggaran untuk pengembangan sumber daya,infrastruktur dan pengembangan aplikasi *e-planning*”

Reference 5 - 0,68% Coverage

“Ketersediaan infrastruktur yang ada seperti komputer itu ada yang memakai dari fasilitas kantor dan ada pula yang memakai komputer pribadi, untuk keadaan infrastruktur di Bappeda cukup baik”.

Reference 6 - 2,02% Coverage

“infrastruktur penunjang sistem *e-planning* seperti komputer, mesin pencetak/printer dan jaringan internet yang seringkali terjadi masalah di seluruh Kecamatan tersebut. Infrastruktur penunjang di seluruh kecamatan yang sudah mengalami kerusakan biasanya akan ada perbaikan atau pergantian infrastruktur yang baru. Namun pengadaan infrastruktur tidak mudah dan tidak langsung ada karena untuk proses perbaikan dan pergantian harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.namun, hal tersebut dapat terlaksana dengan cepat sebelum jadwal musrenbang atau monitoring dilaksanakan”.

Reference 7 - 1,08% Coverage

“Untuk keadaan infrastruktur penunjang di kecamatan dalam keadaan berfungsi seperti wifi namun sering terjadi gangguan,infrastruktur pendukung seperti laptop dan

printer dianggap sudah memenuhi standarisasi yang sudah ditentukan dalam menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik”.

Reference 8 - 1,19% Coverage

“Ketersediaan infrastruktur disini sudah tersedia dengan baik sampai ditingkat kecamatan sampai kelurahan serta tersedianya jaringan internet yang di dukung oleh diskominfo berkat hal tersebut pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi warga ”

Reference 9 - 2,64% Coverage

“kondisi infrastruktur yang tersedia di Bappeda dan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Enrekang seperti komputer, printer, alat pencetak dan lain sebagainya yang ada dalam kondisi yang baik. Infrastruktur sistem e-planning di Bappeda Kabupaten Enrekang dalam kondisi baik yang berguna untuk memperlancar proses kerja perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan karena berbagai infrastruktur yang dimiliki sudah memiliki kondisi yang baik, selain itu juga maksimalnya pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan terhadap infrastruktur yang ada, baik sarana prasarana maupun infrastruktur jaringan. Sehingga karena hal tersebut berbagai proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *e-planning* dapat berjalan efektif dan efisien”

Reference 10 - 0,55% Coverage

“Pemerintah Kabupaten Enrekang menyediakan dukungan infrastruktur pendukung sistem e-planning berupa server, ruang server dan koneksi internet berlangganan”

Reference 11 - 1,46% Coverage

“Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya *e-government*. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *e-government*. Dengan modal sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang merasa cukup mampu untuk mengimplementasikan *e-government* di instansinya.”

Reference 12 - 1,18% Coverage

“Pengoperasian sistem aplikasi *e-planning* tidak harus dibutuhkan sumber daya aparatur atau pegawai dengan kualifikasi bidang teknologi informasi melainkan bisa dari berbagai disiplin ilmu dengan syarat sudah pernah mengikuti pelatihan tentang *e-*

planning. Pengoperasian *e-planning* ini terdiri dari koordinator, narasumber dan operator”

Reference 13 - 0,60% Coverage

“untuk memasukkan data ke dalam sistem *e-planning* terbagi beberapa level pengguna antara lain admin, operator dan level opd yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing”

Reference 14 - 3,00% Coverage

“Pengadaan SDM disetiap tahun atau periode yang ditentukan pasti dilakukan, namun dilain sisi kami juga melihat kondisi SDM yang ada, jika memang dengan kondisi SDM yang ada masih kekurangan dan membutuhkan SDM baru, maka kami pun berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum untuk dapat mengalokasikan pada bagian kami, dari SDM yang sudah ada dan kemudian dilakukan rolling ke bagian kami tapi tidak semudah itu untuk pengadaan SDM, Pengadaan SDM khusus untuk pegawai operator layanan sebenarnya sangat perlu dilakukan, karena jumlah operator yang ada dapat dikatakan masih kurang dari cukup, sehingga karena hal itu kami terkadang tidak dapat mengerjakan pekerjaan melalui sistem *e-planning* yang ada secara baik dan cepat. Karena jika dibandingkan jumlah operator yang ada dapat dikatakan sangat tidak seimbang dengan jumlah data yang ada setiap tahunnya”

Reference 15 - 1,54% Coverage

“Pengadaan sdm memang ada saja tapi kan tidak semua bidang, unuk sekarang di bidang perencanaan pembangunan hanya 9 (Sembilan) orang termasuk Kepala Bidang dan 9 orang ini di bagi bagi pekerjaannya. Operator khusus *e-planning* ada 2 orang saya dan teman saya tapi teman saya lebih ke penganggarannya. Cukup sibuk sih kalo periode perencanaan masuk ke dalam sistem kan di setiap kecamatan juga tidak hanya satu atau dua perencanaan saja”

Reference 16 - 1,52% Coverage

“Pengadaan sdm di kecamatan biasanya itu di rolling, walaupun ada penambahan sdm itu atas dasar kebijakan Kepala Camat. Untuk di bidang yang menangani e-planning sampai saat ini belum ada penambahan sdm padahal untuk di bidang ini sangat butuh penambahan sdm , walaupun berdua dengan Kepala sub bidang terkadang sulit juga untuk berkoordinasi karena Kepala Seksi pun masih memiliki pekerjaan lain bukan hanya terkait e-planning saja”

Reference 17 - 1,71% Coverage

“Pengembangan kanal akses memang sedang dilakukan dibarengi dengan pengembangan sistem *e-planning*, kanal akses ini sangat penting karena kan

bersangkutan dengan seluruh OPD dan Kecamatan Kabupaten Enrekang jadi harus benar benar dikembangkan agar sistem lebih baik dan mudah diakses. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bappeda Banyuwangi terkait *e-planning* karena sistem yang dimiliki Banyuwangi ini mudah diakses dan dimodifikasi jadi dapat mempermudah berbagai pihak yang terkait”.

Reference 18 - 0,90% Coverage

“Kanal akses itu berada dalam sistem *e-planning* ini jadi berbarengan pengembangannya, tujuan dikembangkannya sistem ini memang untuk mempermudah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti OPD dan kecamatan untuk lebih baik lagi kedepannya”.

Reference 19 - 0,98% Coverage

“Pengembangan kanal akses pasti dilakukan karena terkait banyak pihak kan, kita ingin mempermudah OPD dan Kecamatan seluruh Kabupaten dalam mengakses sistem *e-planning* ini. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Diskoinfo agar sistem ini yang mudah diakses oleh berbagai pihak”

Reference 20 - 1,62% Coverage

“pengembangan kanal akses memang sudah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang dibarengi dengan pengembangan sistem *e-planning* dengan bertujuan untuk memudahkan seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Enrekang dalam mengakses sistem *e-planning* dan terintegrasi dengan baik antara sistem *e-planning* dengan seluruh OPD yang terkait. Sehingga baik penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan dapat dengan mudah, efektif dan efisien nantinya.”

[<Files\\BSC D MANAJEMEN PERUBAHAN>](#) - § 3 references coded [7,27% Coverage]

Reference 1 - 2,59% Coverage

“Pengembangan aplikasi dalam rangka memodernisasikan dan menyesuaikan kebutuhan sistem daerah yang digunakan dalam penerapan *e-planning* di Bappeda Kabupaten Enrekang sangat perlu dilakukan, terutama pengembangan pada sistem pengajuan data perencanaan pembangunan yang dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan kepada OPD terkait serta dapat lebih mempermudah berbagai proses penginputan data terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Enrekang yang dimulai dari kecamatan sampai dengan Bappeda Kabupaten Enrekang dan OPD lainnya”

Reference 2 - 2,06% Coverage

Pengembangan aplikasi terhadap *e-planning*, seperti pengembangan aplikasi sistem layanan, fitur tampilan, pengembangan program, pengembangan aplikasi sistem data

dan lain sebagainya, pengembangan aplikasiterhadap berbagai sistem tersebut telah dilakukan oleh pihak Bappeda, BKAD dan Diskominfo Kabupaten Enrekang melalui bagian/bidang yang secara langsung telahditunjuk dan memiliki tugas dalam melakukan pengembangan aplikasi terhadap sistem yang ada.

Reference 3 - 2,62% Coverage

“Pengembangan sistem *e-planning* yang dilakukan oleh Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang di latar belakang oleh beberapa hambatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang di hadapi operator – operator sistem *e-planning* dan OPD terkait. Hal ini sangat menghambat proses penginputan data data perencanaan dimana data yang diinput tidak sedikit, selain itu sistem *e-planning* BPPT tidak bisa di modifikasi sesuai dengan kebutuhan operator, maka dari itu Bappeda dan Diskominfo Kabupaten Enrekang mencari solusi dengan melakukan pengembangan sistem perencanaan elektronik”

[<Files\\BSC D MANFAAT>](#) - § 10 references coded [18,71% Coverage]

Reference 1 - 1,76% Coverage

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis elektronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Reference 2 - 2,60% Coverage

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang. sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.

Reference 3 - 1,77% Coverage

“Penggunaan aplikasi *e-planning* sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musrembang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis *web* sehingga proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musrembang dilaksanakan sehingga proses penginputan dapat berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya”

Reference 4 - 0,83% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-planning* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-planning* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* serta didukung oleh operator yang telah mengikuti pelatihan mengenai aplikasi *e-planning*”

Reference 5 - 2,23% Coverage

“*e-budgeting* Kabupaten Enrekang dapat akses melalui link ebudgeting.enrekangkab.go.id dan merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di daerah. Setiap orang dapat mengakses informasi penyusunan anggaran oleh semua perangkat daerah pemerintah kabupaten Enrekang sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan. Tujuan diterapkannya *e-budgeting* antara lain:(1) Memberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran;(2)Menghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan anggaran;(3)Meningkatkan pengawasan terhadap anggaran baik penggunaan maupun pada saat penyusunan;(4)Mengatasi tindak korupsi melalui penyelewengan anggaran.”

Reference 6 - 0,59% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-budgeting* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-budgeting* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*”

Reference 7 - 0,89% Coverage

“penggunaan aplikasi *e-monev* memudahkan perangkat daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara efektif , efisien dan akuntabel karena aplikasi *e-monev* telah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* sehingga dalam pembuatan

laporan menjadi sangat mudah dan cepat menghasilkan yang dapat di pertanggungjawabkan ”

Reference 8 - 2,59% Coverage

“*e-planning* berfungsi sebagai alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang Cq BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi dan membantu dalam mewujudkan transparansi dan meningkatkan partisipasi di masyarakat serta mudah akses karena berbasis web serta mudah digunakan karena hanya perlu mengisi usulan melihat *progres* usulan”

Reference 9 - 2,60% Coverage

“Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak;(3)Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

Reference 10 - 2,85% Coverage

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*.Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan

memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

<Files\\BSC D PARTISIPASI> - § 6 references coded [13,40% Coverage]

Reference 1 - 3,92% Coverage

“penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun .Aplikasi *e-planning* sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran terbentuknya *e-planning* berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan darimasyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Aplikasi *e-planning* memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang”

Reference 2 - 3,44% Coverage

“Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*.”

Reference 3 - 0,72% Coverage

“semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang memiliki hak akses berupa kata sandi dan nama pemakai untuk mengakses *e-monev* ”

Reference 4 - 1,67% Coverage

“kami ingin menerapkan pelayanan *online* yang diberikan adalah pelayanan *online* berbasis android, karena praktis dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Apalagi jaman sekarang kan masyarakat memiliki hp android sehingga aplikasi *e-planning* nantinya dapat diakses langsung oleh masyarakat”

Reference 5 - 1,84% Coverage

“Kita ingin membuat pelayanan online berbasis android agar masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan *online* melalui ponselnya masing-masing. Namun, untuk saat ini aplikasi *e-planning* hanya dapat diakses oleh *user* yang memiliki *password* nya saja yang bertugas untuk menginput usulan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang”

Reference 6 - 1,82% Coverage

“saya berharap pelayanan berbasis android dapat segera diaplikasikan kepada masyarakat. Agar kami dapat lebih mudah dalam mengusulkan usulan dalam musrenbang karena pelayanan berbasis android akan jauh lebih baik dari pada pelayanan berbasis online yang menurut saya belum dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat”

[<Files\\BSC D EFISIENSI>](#) - § 1 reference coded [1,19% Coverage]

Reference 1 - 1,19% Coverage

“Ketersediaan infrastruktur disini sudah tersedia dengan baik sampai ditingkat kecamatan sampai kelurahan serta tersedianya jaringan internet yang di dukung oleh diskominfo berkat hal tersebut pelaksanaan perencanaan berbasis eletronik di Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi warga ”

[<Files\\BSC D MANFAAT>](#) - § 6 references coded [14,14% Coverage]

Reference 1 - 1,76% Coverage

“*e-planning* atau *electronic planning* (perencanaan berbasis eletronik) di Kabupaten Enrekang, diawali pada tahun 2018 yang lalu, sejalan dengan penerapan. *e-planning* sendiri merupakan inovasi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah data usulan pembangunan. Data atau dokumen usulan rencana kegiatan pembangunan diinput secara online. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Enrekang dilaksanakan dan saling terintegrasi, mulai dari penginputan data usulan Musrenbang tingkat kelurahan,kecamatan, forum perangkat daerah, kemudian musrenbang tingkat kabupaten”.

Reference 2 - 2,60% Coverage

”Perencanaan pembangunan daerah berbasis *e-planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis *online* dengan konsistensi yang baik, sehingga para OPD (Organisasi perangkat daerah) bisa merencanakan dari awal hingga akhir itu tetap stabil atau sama. Karena, dalam perjalanan perencanaan pembangunan daerah secara manual dulu ada perubahan pada kebijakan dalam organisasi perangkat daerah apa yang diusulkan dalam renja (rencana kerja) kadang tidak sama dengan apa yang ada di dalam perencanaan. Selain itu juga *e-planning* mampu menciptakan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga apa yang diusulkan masyarakat bisa di sampaikan melalui aplikasi *e-planning* secara langsung pada saat pelaksanaan musrenbang.sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara efektif, efisien, responsif, transparan dan partisipatif”.

Reference 3 - 1,77% Coverage

“Penggunaan aplikasi *e-planning* sangat mudah diakses oleh staf kelurahan/desa dalam menginput usulan musrenbang. Hal ini disebabkan oleh aplikasi ini berbasis

web sehingga proses penginputan dapat langsung dilakukan di kantor desa/lurah setelah proses musrembang dilaksanakan sehingga proses penginputan dapat berjalan secara cepat, murah dan singkat karena tidak perlu lagi mengantar usulan ke kantor kecamatan seperti tahun sebelumnya yang masih menggunakan proses manual yang menyebabkan proses berjalan lama karena semua usulan perlu disusun kembali berdasarkan bidang kerjanya dan dibawa ke kantor kecamatan untuk proses selanjutnya”

Reference 4 - 2,55% Coverage

“proses perencanaan dilakukan dimulai dari diajukan usulan yang meliputi usulan politik yang berasal dari visi-misi bupati serta sasaran dan tujuan pembangunan berdasarkan hal tersebut maka disusunlah rencana kerja perangkat daerah serta menghimpun usulan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari musrembang desa/kelurahan yang nantinya di himpun di musrembang kecamatan dan setelah proses ini selesai dilaksanakan forum OPD untuk menyaring dan memilah usulan berdasarkan tugas organisasi perangkat daerah dan setelah itu dilaksanakan musrembang kabupaten bertujuan untuk menyaring dan memilah usulan yang berasal dari hasil reses anggota DPRD yang merupakan pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun berikutnya dan berdasarkan rencana kerja tersebut maka dibuatlah KUA- PPAS untuk setiap Perangkat Daerahberkat menggunakan *e-planning* semua hal tersebut mudah dilaksanakan”

Reference 5 - 2,60% Coverage

“Kebijakan *e-government* pada sistem *e-planning* dalam sistem pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah karena dipandang memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor; (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak;(3)Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat;(4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conference.”

Reference 6 - 2,85% Coverage

“*e-planning* digunakan untuk membantu dalam mengelolah data dari hasil pelaksanaan musrembang tahun ini untuk proses perencanaan tahun selanjutnya, proses penyampaian usulan, baik dari Musrembang kelurahan, Musrembang Kecamatan dan hasil reses DPRD serta kegiatan perangkat daerah diinput dan di

verifikasi kedalam aplikasi *e-planning*. Usulan program dan kegiatan yang telah diverifikasi melalui *e-planning* selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah. Dengan penerapan *e-planning*, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran akan tersistem dan memiliki batas waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan APBD. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa sanksi administratif”.

<Files\\BSC D PARTISIPASI> - § 11 references coded [26,82% Coverage]

Reference 1 - 3,92% Coverage

“penerapan *e-planning* merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Aplikasi *e-planning* sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik saran terbentuknya *e-planning* berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Aplikasi *e-planning* memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang”

Reference 2 - 3,35% Coverage

“Dalam praktiknya, *e-planning* yang diterapkan di Kabupaten Enrekang tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung yang seharusnya ikut andil dalam melakukan perencanaan. Masyarakat tidak diberi akses secara langsung untuk mengakses aplikasi *e-planning*. Hanya operator tingkat kelurahan, kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *e-planning*, Masyarakat hanya diikuti sertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa / kelurahan yang nantinya hasil dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa / kelurahan akan di input kedalam aplikasi *e-planning* oleh operator”.

Reference 3 - 2,87% Coverage

“hanya operator di tingkat kelurahan, kecamatan yang di beri akses langsung ke aplikasi *e-planning* bertujuan untuk mempermudah dalam proses penginputan usulan. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi warga dalam proses musrenbang serta peningkatann jumlah usulan dari warga yang diinput kedalam aplikasi musrenbang serta warga dapat memantau usulan di aplikasi *e-planning* dengan bertanya ke operator kelurahan/desa”.

Reference 4 - 2,52% Coverage

terlaksananya musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta meningkatnya jumlah usulan yang diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-planning* Pemerintah Kabupaten Enrekang karena pada Aplikasi ini masyarakat dapat mengawasi secara langsung proses penginputan dan status usulanya”.

Reference 5 - 1,96% Coverage

“proses penginputan usulan Pokok Pikiran Dewan kedalam Aplikasi *e-planning* terdapat menu Pokok Pikiran Dewan yang dapat diakses secara langsung menggunakan user name dan password yang di berikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang. Selain itu, Aplikasi *e-planning* memungkinkan Anggota Dewan untuk memantau usulannya secara langsung pada aplikasi”

Reference 6 - 3,44% Coverage

“Proses penginputan usulan dari masyarakat dan pokok pikiran dewan bertujuan untuk menyusun rencana anggaran Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dengan mudah terlaksana karena pada sistem perencanaan di Kabupaten Enrekang. Aplikasi *e-planning* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut didukung oleh keterlibatan secara langsung pada aplikasi *e-budgeting* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang. karena, semua perangkat daerah tersebut telah memiliki *password* dan *username* pada aplikasi *e-budgeting*.”

Reference 7 - 1,62% Coverage

Masyarakat tidak memiliki akses langsung dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada aplikasi *e-budgeting*. Namun, masyarakat dapat melihat rencana anggaran Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* dan dipublikasikan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Enrekang”

Reference 8 - 0,72% Coverage

“semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang memiliki hak akses berupa kata sandi dan nama pemakai untuk mengakses *e-monev* ”

Reference 9 - 1,48% Coverage

“Hak akses masyarakat pada aplikasi *e-monev* berupa laporan yang di publikasikan melalui web resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dilaporkan secara langsung

kepada para pemangku kepentingan seperti para Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan Tokoh masyarakat”

Reference 10 - 2,66% Coverage

“Pengaruh dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada proses musrembang di tingkat desa/kelurahan, masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrembang memutuskan usulan prioritas kelurahan/ desa menggunakan cara musyawarah dan proses perangkingan usulan sehingga hanya usulan prioritas saja yang di masukkan dalam *e-planning* merupakan keinginan masyarakat bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran”

Reference 11 - 2,28% Coverage

“terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi laporan realisasi yang diadakan setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Forum tersebut dihadiri semua perangkat daerah serta tokoh masyarakat bertujuan untuk melaporkan hasil realisasi anggaran yang di kelolah oleh aplikasi *e-monev* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

[<Files\\BSC D TRANSPARANSI>](#) - § 12 references coded [23,83% Coverage]

Reference 1 - 3,00% Coverage

“aplikasi *e-planning* pada semua proses telah terdokumentasi dengan baik sehingga semua data usulan dapat di kelolah untuk proses selanjutnya. Pada data usulan musrenbang telah terpilah berdasarkan pengusul dan perangkat daerah tujuan awal sehingga memudahkan dalam proses kegiatan selanjutnya serta memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat”

Reference 2 - 1,16% Coverage

“masyarakat dapat melihat hasil inputan operator *e-planning* berupa laporan usulan musrembang sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat”

Reference 3 - 1,06% Coverage

“kita dapat melihat hasil inputan pokok pikiran yang merupakan hasil dari inputan aplikasi *e-planning* di www.enrekangkab.go.id”

Reference 4 - 1,33% Coverage

“Laporan usulan pokok pikiran dewan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat terhadap usulan yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Enrekang”

Reference 5 - 2,13% Coverage

“Informasi status usulan masyarakat dalam aplikasi *e-planning* dapat dilihat setelah proses musrembang selesai. Karena hal tersebut di kelolah oleh operator di tingkat perangkat daerah sehinggalah masyarakat dapat mengetahui apakah usulannya disetujui atau tidak”

Reference 6 - 1,03% Coverage

“laporan ini masyarakat mengetahui status usulan apakah disetujui atau ditolak oleh perangkat daerah pengampu usulan tersebut”

Reference 7 - 2,27% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-planning* dilihat pada setiap usulan yang telah diinput dalam aplikasi akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan tahapan dari usulan tersebut sehinggalah masyarakat dapat mengetahui usulannya telah sampai tahap tersebut atau di tolak”

Reference 8 - 2,69% Coverage

Pemerintah Kabupaten Enrekang mempublikasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui *web* resmi Kabupaten Enrekang berisi lampiran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang dikelola oleh aplikasi *e-budgeting* sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat.

Reference 9 - 1,71% Coverage

“Aktualisasi Informasi pada aplikasi *e-budgeting* Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari perbaharuan data setiap terjadi perubahan anggaran pada setiap tahapan penyusunan anggaran di setiap tahunnya”

Reference 10 - 2,29% Coverage

“Pada aplikasi *e-monev* Pemerintah Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membantu mempublikasikan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah pada setiap tahun berjalan”

Reference 11 - 2,94% Coverage

“laporan realisasi anggaran semua perangkat daerah yang dikelola menggunakan aplikasi *e-monev* yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang berisi laporan semua realiasi anggaran perangkat daerah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahun berjalan”.

Reference 12 - 2,22% Coverage

“Aktualisasi informasi pada aplikasi *e-monev* dapat dilihat dari perbaharuan informasi mengenai realisasi anggaran yang di *input* oleh semua perangkat daerah di Kabupaten Enrekang yang di laporkan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada setiap tahun yang berjalan”